



Pemerintah Daerah
Kota Sukabumi

LKIP

Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2024

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Suryakencana No. 24 Telepon (0266) 215136 Faks (0266) 221128 Kota Sukabumi 43111
Provinsi Jawa Barat, e-mail : inspektorat@sukabumikota.go.id
Website : <https://inspektorat.sukabumikota.go.id>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sukabumi untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kota Sukabumi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sukabumi, 27 Maret 2025

INSPEKTUR DAERAH KOTA SUKABUMI

EEN RUKMINI, S.H.,M.H.,CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP.197202101999012001



IKHTISAR EKSKLUSIF



H. Ayep Zaki
Wali Kota Sukabumi

Dalam rangka mewujudkan ke pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil, Pemerintah Kota Sukabumi melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara

periodik. Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi selaku pengemban amanah masyarakat Kota Sukabumi melaksanakan kewajiban tersebut dengan menyajikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Sukabumi Tahun 2024.**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Sukabumi Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Pada Tahun 2024, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

Sukabumi Tahun 2024, terdapat 8 (Delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator sasaran strategis dan 4 (Empat) indikator Tujuan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2024. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap IKU yang merupakan indikator dari sasaran strategis RPJMD dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah

kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Untuk mempermudah interpretasi atas penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, digunakan interpretasi pencapaian IKU pada aplikasi *SIPEKA* sebagai berikut :

TABEL
INTERPRETASI PENCAPAIAN KINERJA UTAMA

NO	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	WARNA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap capaian IKU Tahun 2024, rata-rata capaian IKU Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah **101,83%** atau dengan kata lain memiliki kinerja **SANGAT TINGGI** terhadap seluruh IKU **8 (delapan IKU yang menembak 4 (empat) Tujuan** yang ada di RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026.

Untuk pencapaian IKU pada seluruh sasaran strategis yang ada dalam RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, ditembak oleh 82 Program, 112 Kegiatan dan 284 Sub kegiatan menunjukkan efektivitas pencapaian kinerja **SANGAT TINGGI** yang didukung dengan sumber daya anggaran total alokasi anggaran sebesar **295.755.693.912** Milyar dan terdapat **efisiensi anggaran sebesar 9,5 Milyar** dari APBD II Kota Sukabumi Tahun 2024.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator sasaran strategis RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 yang telah disepakati

dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024, dapat dipenuhi sesuai target dengan rata-rata tingkat capaian $\geq 91\%$ (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh satu persen) atau memiliki kinerja **SANGAT BAIK**. Pemerintah Daerah Kota Sukabumi akan terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui berbagai inisiatif strategis, langkah-langkah inovatif dan sinergis seluruh sektor.

Semoga akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi **semakin meningkat** sehingga bisa mencapai pemerintahan yang kapabel, bersih dan akuntabel yang mendorong peningkatan reformasi birokrasi yang mendukung terwujudnya *Good Governance* di Kota Sukabumi.





KONTEN

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL.....	VI
DAFTAR GAMBAR	VIII
DAFTAR GRAFIK.....	X

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh

Puji dan syukur Kami panjatkan hanya kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Kami dapat menyelesaikan penyusunan **“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024”** ini. Penyusunan **“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024”** merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja.

“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024” disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024**

Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Secara substantif, **“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024”** merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota guna mewujudkan *Clean Government* dan *Good Governance*.

Akhir kata, semoga **“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024”** ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Wassalamualaikum warrahmatullaahi wabarakatuh

Sukabumi, 25 Maret 2025

WAKIL KOTA SUKABUMI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL.....	VI
DAFTAR GAMBAR	VII
DAFTAR GRAFIK.....	X
BAB I	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN LKJIP.....	2
1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	3
1.3.1. Aspek Geografis Kota Sukabumi	4
1.3.2. Aspek Demografis Kota Sukabumi	11
1.3.3. Aspek Daya Saing Daerah Kota Sukabumi	14
1.3.3.1 Kemampuan Ekonomi Daerah	14
1.3.3.2 Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur	17
1.3.3.3 Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).....	20
1.3.4. Aspek Pemerintahan Kota Sukabumi	22
1.4. ISU STRATEGIS.....	29
BAB II	31
2.1. RPD KOTA SUKABUMI TAHUN 2024-2026	31
2.2. PERJANJIAN KINERJA.....	51
BAB III	53
3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA.....	54



3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024..... 56

3.2.1	Pencapaian IKU Tahun 2024	57
3.2.2	Perbandingan Capaian IKU 2024 dengan Target Tahun 2023.....	60
3.2.3	Pencapaian IKU Tahun 2024 dengan Target Akhir RPD 2024-2026	63
3.2.4	Perbandingan Capaian IKU 2024 dengan Capaian Tingkat Provinsi & Nasional	65
3.2.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2024 serta Solusi yang Telah dilakukan	69
3.2.5.1	Penjelasan Pencapaian IKU 1 : Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB.....	70
3.2.5.2	Penjelasan Pencapaian IKU 2 : Indeks Kota Kreatif....	74
3.2.5.3	Penjelasan Pencapaian IKU 3 : Indeks Pendidikan.....	78
3.2.5.4	Penjelasan Pencapaian IKU 4 : Indeks Keluarga Sehat	82
3.2.5.5	Penjelasan Pencapaian IKU 5 : Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	87
3.2.5.6	Penjelasan Pencapaian IKU 6 : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	89
3.2.5.7	Penjelasan Pencapaian IKU 7 : Indeks Rasa Aman	94
3.2.5.8	Penjelasan Pencapaian IKU 8 : Indeks Inovasi Daerah	96
3.2.5.9	Implementasi Rencana Aksi LHE SAKIP Tahun 2023 Tingkat Kota Sukabumi.....	102



3.2.6	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Kinerja Tahun 2024	110
3.2.6.1	IKU 1 : Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	110
3.2.6.2	IKU 2 : Indeks Kota Kreatif.....	115
3.2.6.3	IKU 3 : Indeks Pendidikan.....	116
3.2.6.4	IKU 4 : Indeks Keluarga Sehat	121
3.2.6.5	IKU 5 : Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	123
3.2.6.6	IKU 6 : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	125
3.2.6.7	IKU 7 : Indeks Rasa Aman	127
3.2.6.8	IKU 8 : Indeks Inovasi Daerah.....	131
3.2.7	Analisis Efektifitas dan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian IKU Wali Kota Sukabumi Tahun 2024.....	138
3.3.	REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024	142
BAB IV		147
4.1.	KESIMPULAN	147
4.2.	RENCANA TIDAK LANJUT	148
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Luas Dataran Masing-masing Kecamatan di Daerah	4
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Menurut Kecamatan di Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2024	12
Tabel 1.3	Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2024	20
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Sukabumi, per Desember 2024	27
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Sukabumi, per Desember 2024	28
Tabel 2.1	Matriks Tujuan, Sasaran dan Indikator RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026	38
Tabel 2.2	Logical Framework Pencapaian Tujuan Kesatu	47
Tabel 2.3	Logical Framework Pencapaian Tujuan Kedua	48
Tabel 2.4	Logical Framework Pencapaian Tujuan Ketiga.....	49
Tabel 2.5	Logical Framework Pencapaian Tujuan Empat	50
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pemerintah Kota Sukabumi	52
Tabel 3.1	Capaian IKU Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024	58
Tabel 3.2	Capaian IKU Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024 dibandingkan dengan Capaian Tahun 2023	61



Tabel 3.3	Capaian IKU Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir RPD (Tahun 2026)64
Tabel 3.4	Capaian IKU Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024 serta Perbandingannya Terhadap Capaian Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2024.....68
Tabel 3.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2024 serta Solusi yang Telah dilakukan 108
Tabel 3.6	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Kinerja Tahun 2024 134
Tabel 3.7	Analisis Efektifitas dan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian IKU Wali Kota Sukabumi Tahun 2024 140
Tabel 3.8	Analisis Realisasi Anggaran dalam Pencapaian IKU Wali Kota Sukabumi Tahun 2024 143



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Persentase Luas Wilayah Daerah Menurut Kecamatan	5
Gambar 1.2	Peta Administrasi Kota Sukabumi.....	6
Gambar 1.3	Peta Topografi Kota Sukabumi	7
Gambar 1.4	Peta Kemiringan Lereng Kota Sukabumi	8
Gambar 1.5	Peta Geologi Kota Sukabumi	9
Gambar 1.6	Peta Daerah Aliran Sungai di Kota Sukabumi	10
Gambar 1.7	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sukabumi	16
Gambar 1.8	Fasilitas Umum di Kota Sukabumi.....	19
Gambar 3.1	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	70
Gambar 3.2	Info Grafis Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2024	73
Gambar 3.3	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Indeks Kota Kreatif Kota Sukabumi Tahun 2024	73
Gambar 3.4	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 : Indeks Pendidikan Kota Sukabumi Tahun 2024	78
Gambar 3.5	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 4 : Indeks Keluarga Sehat Kota Sukabumi Tahun 2024.....	82
Gambar 3.6	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 5 : Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sukabumi Tahun 2024	87



Gambar 3.7	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 6 : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kota Sukabumi Tahun 2024	89
Gambar 3.8	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 : Indeks Rasa Aman Kota Sukabumi Tahun 2024.....	94
Gambar 3.9	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 8 : Indeks Inovasi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024	96



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Capaian IP SPM Kesehatan Kota Sukabumi tahun 2020 - 2024	84
Grafik 3.2	Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2024.....	112





BAB I

Pendahuluan

KONTEN

BAB I	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN LKJIP	2
1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	3
1.4. ISU STRATEGIS	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota, wajib menyelenggarakan ke pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan ke pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah sistem yang mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP di Kota Sukabumi didasarkan pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP Pemerintah Kota Sukabumi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Kota Sukabumi Tahun 2024, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN LKIP

Maksud dari penyusunan LKIP Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah untuk menyampaikan kinerja organisasi Pemerintah Kota Sukabumi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sarana bagi Pemerintah Kota Sukabumi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kota Sukabumi;
2. Bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;



3. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya *Good Governance*;
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis; dan
5. Mendorong Pemerintah Kota Sukabumi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Sukabumi.

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Gambaran umum organisasi yaitu dalam hal ini Kota Sukabumi dijelaskan melalui beberapa aspek yaitu aspek geografis, aspek demografis, aspek daya saing daerah dan aspek pemerintahan, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Aspek geografis menggambarkan luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, dan penggunaan lahan;
2. Aspek demografi menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu;
3. Aspek daya saing daerah menggambarkan potensi strategis yang dimiliki Kota Sukabumi; dan
4. Aspek pemerintahan menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Sukabumi.



1.3.1. ASPEK GEOGRAFIS KOTA SUKABUMI

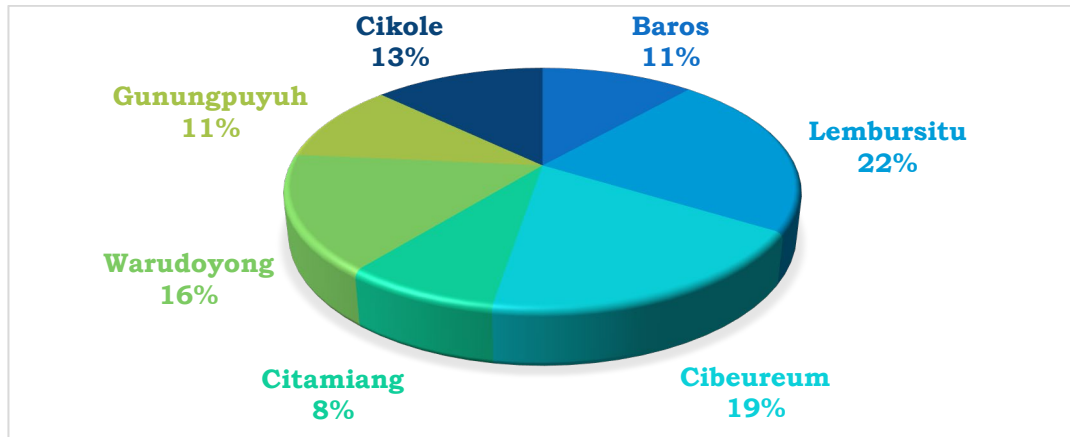
Wilayah Kota Sukabumi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 terbagi dalam 5 (lima) kecamatan dan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 27 September 2000, wilayah administrasi Kota Sukabumi mengalami pemekaran menjadi 7 (tujuh) kecamatan dengan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan. Kecamatan Baros dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Lembursitu, Kecamatan Baros, dan Kecamatan Cibeureum. Dengan demikian, wilayah administrasi Kota Sukabumi terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Gunungpuyuh, Kecamatan Cikole, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Warudoyong, Kecamatan Baros, Kecamatan Lembursitu, dan Kecamatan Cibeureum. Luas dataran masing-masing kecamatan disajikan pada Tabel 1.1 sedangkan persentase luas wilayah Daerah per kecamatan disajikan pada Gambar 1.1.

Tabel 1.1.
Luas Dataran Masing-masing Kecamatan di Daerah

No.	Kecamatan	Luas (KM ²)
1	Baros	5,583
2	Lembursitu	10,692
3	Cibeureum	9,122
4	Citamiang	4,004
5	Warudoyong	7,563
6	Gunungpuyuh	5,151
7	Cikole	6,216
Luas Total		48,332

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2024, BPS





Gambar 1.1
Persentase Luas Wilayah Daerah Menurut Kecamatan
(Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2024, BPS)

Kota Sukabumi terletak pada posisi 106°45'50" Bujur Timur - 106°45'10" Bujur Timur dan 6°50'44" Lintang Selatan dan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi, yaitu sebagai berikut:

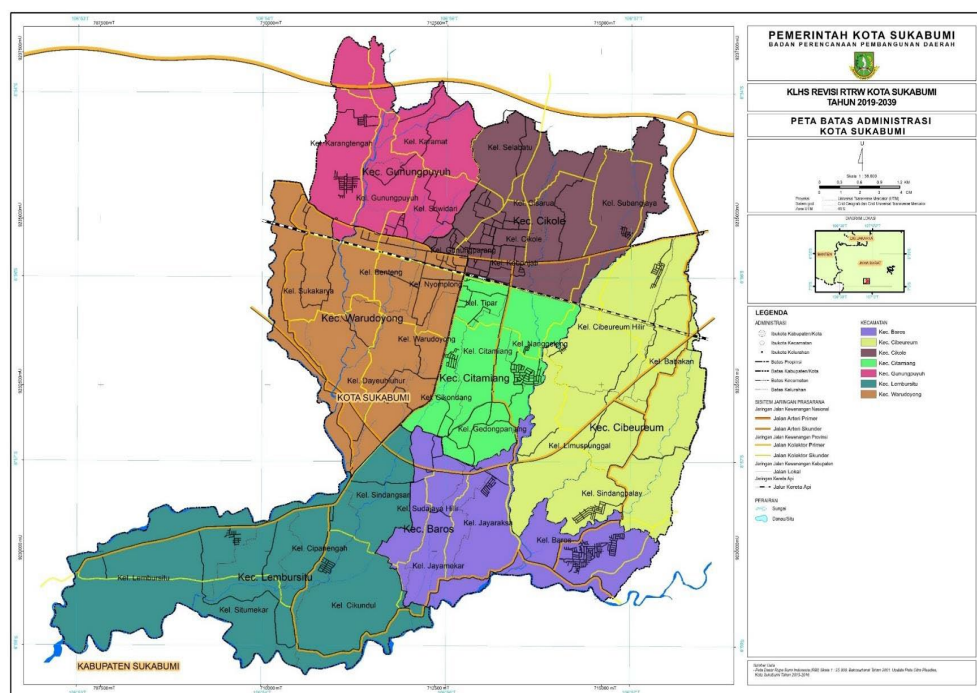
1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi; dan
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.

Jarak terjauh dari Balai Kota Sukabumi adalah Kecamatan Lembursitu, yakni sejauh 7 (tujuh) kilometer.

Kota Sukabumi berjarak 120 (seratus dua puluh) kilometer dari Ibukota Negara yaitu DKI Jakarta atau 96 (sembilan puluh enam) kilometer dari Ibukota Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Bandung. **Cukup dekatnya jarak membuat tingginya pergerakan orang dan barang dari kota-kota tersebut.** Letak Kota Sukabumi yang strategis yaitu berada pada jalur lintasan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dengan Ibu Kota Negara (Jakarta) serta didukung oleh infrastruktur yang cukup memadai,



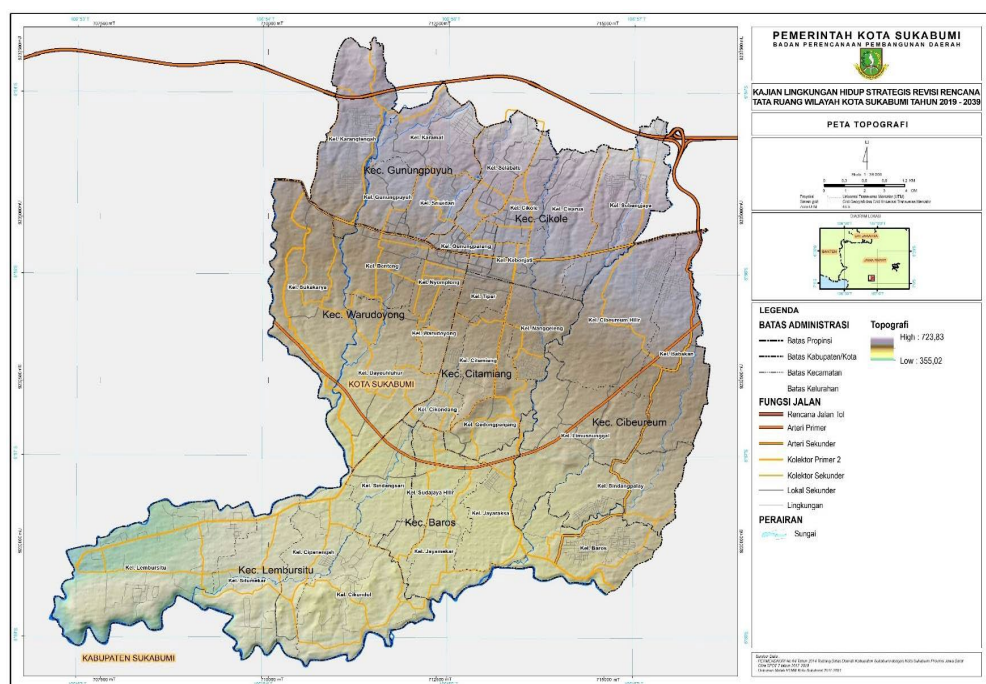
menjadikan Kota Sukabumi sebagai salah satu tujuan para migran dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal baik sebagai penanam modal maupun sebagai pencari kerja. Secara ekonomis hal tersebut menguntungkan Kota Sukabumi, karena dapat menciptakan lapangan kerja baru serta dapat meningkatkan pendapatan baik dari sektor jasa, perdagangan dan sektor lainnya. Peta administrasi wilayah Kota Sukabumi disajikan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2
Peta Administrasi Kota Sukabumi
(Sumber: Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2024)

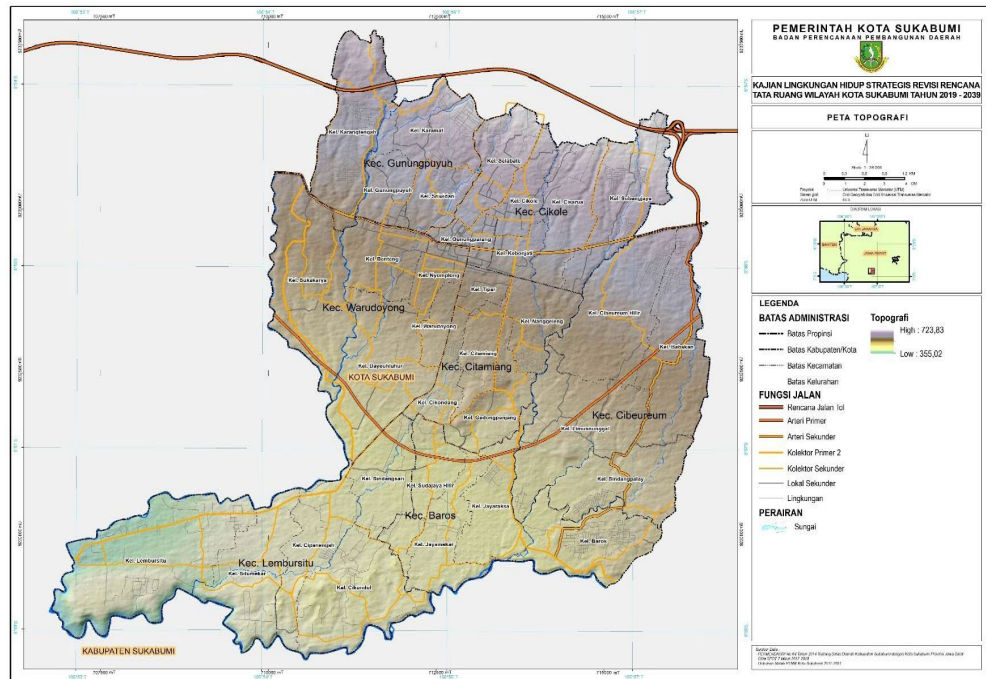
Kota Sukabumi merupakan dataran rendah yang terletak di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya mencapai 584 (lima ratus delapan puluh empat) meter di atas permukaan laut dengan bentuk bentang alam yang relatif datar sampai bergelombang dengan kemiringan lahan (lereng) diperkirakan relatif beragam. Secara morfologi, Kota Sukabumi dapat dibagi menjadi 5 (lima) satuan morfologi, yaitu morfologi

daratan dengan elevasi 385–600 mdpl, morfologi medan bergelombang dengan elevasi 350–975 mdpl, morfologi pegunungan ber-relief sedang dengan elevasi 375–975 mdpl, dan pegunungan ber-relief kasar dengan elevasi 375–900 mdpl. Dari kelima satuan tersebut, sebagian besar morfologi daerah Kota Sukabumi berupa **medan bergelombang**. Adapun kondisi topografi dan kemiringan lereng di wilayah Kota Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 1.3 dan Gambar 1.4 berikut.



Gambar 1.3
Peta Topografi Kota Sukabumi
(Sumber: Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2024)

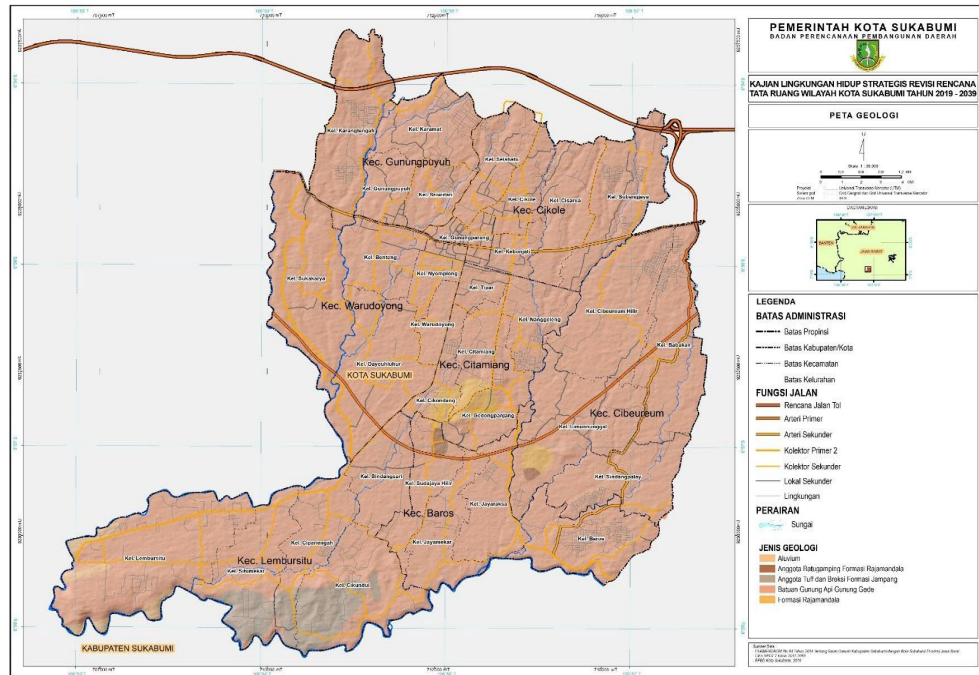




Gambar 1.4
Peta Kemiringan Lereng Kota Sukabumi
(Sumber: Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2024)

Ditinjau dari aspek geologis, susunan litologi batuan di Kota Sukabumi dan sekitarnya didominasi oleh singkapan batuan vulkanik yaitu produk gunung api dari aktivitas Gunung Gede dan Gunung Pangrango berumur holosen. Secara regional, stratigrafi wilayah ini ditandai oleh batuan sedimen dari formasi walat berumur oligosen awal yang merupakan satuan tertua yang dapat dijumpai di daerah ini. Formasi walat ditutupi oleh batuan sedimen dari Formasi Rajamandala dengan kisaran umur dari oligosen akhir sampai miosen awal. Satuan ini selanjutnya ditutupi oleh Formasi Jampang yang berumur miosen awal. Satuan batuan sedimen ini tersingkap di bagian selatan-tenggara dan barat-barat daya dari wilayah Kota Sukabumi. Adapun Peta Geologi Kota Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 1.5.



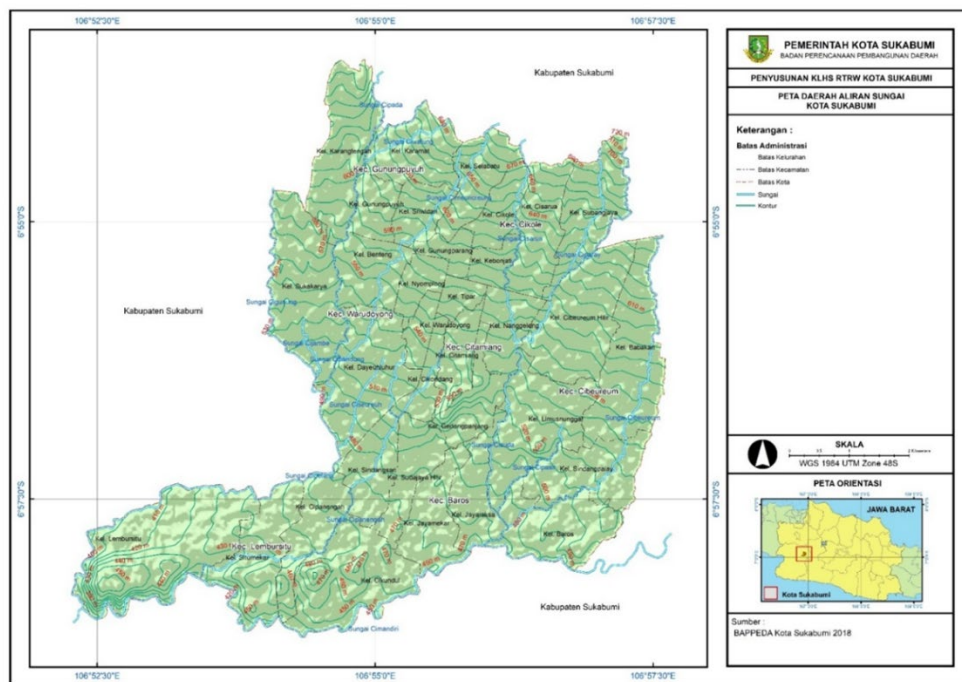


Gambar 1.5
Peta Geologi Kota Sukabumi
(Sumber: Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2023)

Seperti halnya wilayah lain di Indonesia, wilayah Kota Sukabumi sangat dipengaruhi oleh **iklim tropika khatulistiwa**. Suhu udara rata-rata di wilayah Kota Sukabumi berkisar antara **26°C–28°C**. Intensitas hujan harian rata-rata merupakan jumlah hujan selama setahun dibagi dengan jumlah hari hujan dalam tahun tersebut. Perhitungan intensitas curah hujan di Kota Sukabumi menggunakan stasiun terdekat yaitu Stasiun Cimandiri yang berada di dalam dan sekitar DAS Cimandiri. Nilai intensitas curah hujan harian maksimal sebesar 76 (tujuh puluh enam) mm dan curah hujan tahunan sebesar 3.794 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) mm. Jumlah bulan kering berkisar 1-2 bulan per tahun, namun mendapat pengaruh hujan orografis di sepanjang sungai merupakan perbukitan dan dataran bergelombang. Menurut *Schmidt Ferguson*, ciri-ciri iklim tersebut digolongkan sebagai iklim basah Tipe Af. Curah hujan minimum umumnya terjadi pada musim bulan Agustus.



Sedangkan ditinjau dari sisi hidrologi, kondisi air permukaan maupun air tanah atau *groundwater* baik dari sisi pergerakan, distribusi, maupun kualitasnya di Kota Sukabumi sangat erat kaitannya dengan sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kota Sukabumi. Daerah Aliran Sungai atau DAS dan sungai-sungai yang melewati wilayah Kota Sukabumi disajikan pada Gambar 1.6 berikut ini.



Gambar 1.6
Peta Daerah Aliran Sungai di Kota Sukabumi
(Sumber: Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2024)

Aspek Strategis : Secara administratif, wilayahnya relatif tidak begitu luas, iklim tropika khatulistiwa (26-28°C) dan jarak dengan pusat provinsi dan Ibu Kota Negara yang dekat membuat tingginya pergerakan barang dan orang disertai dengan desain wilayah bermedan yang tidak terlalu bergelombang cukup menjanjikan untuk menarik investor/modal.

Strategic Issued : peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pada jenis layanan administrasi kewilayahan yang mendukung terhadap peningkatan akses kependudukan masyarakat yang masih perlu mendapatkan perhatian.

1.3.2. ASPEK DEMOGRAFIS KOTA SUKABUMI

Letak Kota Sukabumi sangat strategis karena berada pada jalur lintasan Ibukota Provinsi Jawa Barat dengan Ibukota Negara, serta didukung oleh infrastruktur yang cukup memadai, sehingga menjadikan Kota Sukabumi sebagai salah satu tujuan para migran dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal baik sebagai penanam modal maupun sebagai pencari kerja.

Jumlah penduduk Kota Sukabumi tahun 2024 adalah **365.740** (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh) jiwa yang terdiri atas **183.757** (Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh) jiwa penduduk laki-laki atau sebesar **50,24%** (Lima Puluh koma Dua Empat Persen) dan **181.978** (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh) jiwa penduduk perempuan atau sebesar **49,76%** (Empat puluh Sembilan koma Tujuh Enam persen). Jumlah ini sebanding dengan luas wilayah yang telah disampaikan pada data geografis diatas, Kecamatan Lembursitu yang memiliki luas wilayah 10.692 (Sepuluh ribu enam ratus Sembilan puluh dua) Km² memiliki jumlah penduduk 42.707 (Empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh) jiwa berbanding terbalik dengan Kecamatan Citamiang dengan luas wilayah 4.004 (Empat ribu empat) Km² memiliki jumlah penduduk 54.864 (Lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat) jiwa. Jumlah penduduk, rasio jenis kelamin, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan tingkat kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Sukabumi tahun 2022 disajikan pada Tabel 1.2 di bawah ini :



Tabel 1.2.
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dibandingkan
dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Menurut
Kecamatan di Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (Ribuan)			Analisis Dasar		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	LPP	Kepadatan
1	Baros	20.300	19.979	41.320	101,60	2,45	7.405
2	Lembursitu	21.828	21.718	44.698	99,82	2.04	4.178
3	Cibeureum	23.597	23.032	49.506	102,11	2.60	5.421
4	Citamiang	27.890	27.844	55.110	100,04	1.02	13.769
5	Warudoyong	31.286	30.567	61.343	102,21	1.06	8.112
6	Gunungpuyuh	25.609	25.096	50.030	102,09	0.95	9.745
7	Cikole	32.822	33.344	63.736	98,43	0.79	10.270
Tahun 2024		183.757	181.978	365.735	101.98	1,46	7.570
Tahun 2023		183.332	181.580	364.912	100,96	1,69	7.550
Tahun 2022		180.141	178.713	358.854	100,80	1,48	7.425
Tahun 2021		177.449	176.182	353.631	100,72	1,21	7.317
Tahun 2020		176.539	174.920	351.459	100,93	1,44	7.114
Tahun 2019		175.391	173.554	348.945	101,06	0,73	6.929
Tahun 2018		173.376	171.421	344.797	101,14	0,77	6.919

Sumber: Data Agregat Penduduk Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB)
Disdukcapil Kota Sukabumi, 2024

Dari Tabel 1.2 diatas, berdasarkan data diatas tampak bahwa jumlah penduduk Kota Sukabumi mengalami **kenaikan 0,02% (823 jiwa)** pada tahun 2024 dibandingkan dengan data tahun 2023 dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Cikole yang berbanding lurus dengan rasio jenis kelamin dan LPP terkecil. Berbanding terbalik dengan Kecamatan Cibeureum yang menunjukkan tren kenaikan jumlah penduduk dengan rasio jenis kelamin dan LPP terbesar di tahun 2024. Hal ini terjadi karena adanya migrasi penduduk Kota Sukabumi yang



mulai mengisi wilayah selatan Sukabumi yakni Kecamatan Cibeureum.

Analisis kependudukan berdasarkan rasio jenis kelamin menunjukkan kenaikan **0,09** dari tahun 2024 dengan angka **100,96** (dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan). Rasio tertinggi terdapat pada tahun 2019 dan terendah di tahun 2023. Kecamatan Cikole menunjukkan nilai terendah yakni 98,43 dan tertinggi di Kecamatan Warudoyong. Data ini sejalan dengan analisis laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Kota Sukabumi naik pada tahun 2023 dan menunjukkan angka tertinggi sejak tahun 2019 dengan angka **1,69** dan terendah pada tahun 2019 dengan hasil 0,73. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Cibeureum yakni 2,41 dan terendah ada di Kecamatan gunung puyuh yakni 1,32.

Efek lain penambahan jumlah penduduk adalah tingkat kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk Kota Sukabumi Tahun 2024 mencapai **7,570 jiwa/km²** dan merupakan angka tertinggi sejak 2020. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Citamiang yakni 13.920 jiwa/km² dan terendah ada di Kecamatan Lembursitu yakni 4,073 jiwa/km². Hal ini sebanding dengan perbedaan luas wilayah kedua kecamatan tersebut, luas wilayah Kecamatan Lembursitu yang merupakan 2 kali lipat dari Kecamatan Citamiang.

Aspek Strategis : Secara administratif, wilayahnya relatif tidak begitu luas, iklim tropika khatulistiwa (26-28°C) dan jarak dengan pusat provinsi dan Ibu Kota Negara yang dekat membuat tingginya pergerakan barang dan orang disertai dengan desain wilayah bermedan yang tidak terlalu bergelombang cukup menjanjikan untuk menarik investor/modal.



Strategic Issued : peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pada jenis layanan administrasi kewilayahan yang mendukung terhadap peningkatan akses kependudukan masyarakat yang masih perlu mendapatkan perhatian & Perbaikan Infrastruktur.

1.3.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH KOTA SUKABUMI

Aspek daya saing daerah kota Sukabumi dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim investasi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

1.3.3.1 KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah bruto atau balas jasa faktor produksi yang dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah (*region*) yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu, pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (tahun dasar 2010).

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga



berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Berdasarkan data dari BPS Kota Sukabumi dalam Laporan **“Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2025”**, data PDRB Kota Sukabumi yang disajikan adalah PDRB dari sisi produksi atau juga dikenal sebagai PDRB menurut lapangan usaha, yang diperoleh melalui penjumlahan nilai tambah seluruh lapangan usaha. PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dengan tujuan untuk melihat struktur (distribusi) perekonomian. Berikut adalah data-data umum terkait PDRB Kota Sukabumi yang bisa dijadikan dasar analisis :

- ❖ Ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2024 **tumbuh 5,11** (Lima Koma Sebelas Persen) dengan kontribusi perdagangan besar dan eceran : reparasi mobil dan sepeda motor dengan andil 1,74% adalah merupakan penyumbang andil pertumbuhan tertinggi dari sisi lapangan usaha.
- ❖ Pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan andil sebesar 3,48% (Tiga koma empat delapan) persen memberikan andil pertumbuhan paling dominan dari sisi pengeluaran tahun 2024.
- ❖ Perekonomian Kota Sukabumi Tahun 2024 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga yang berlaku mencapai **16,37 Triliun Rupiah** dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai **10,30 Triliun Rupiah**, **PDRB Per Kapita (ADHB)** mencapai **44,76 Juta**.





Gambar 1.7
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sukabumi
(Sumber: BPS : Kota Sukabumi Dalam Angka 2024)

Aspek Strategis : Berdasarkan kemampuan ekonomi daerah yang diukur dengan PDRB Tahun 2024, didapatkan hasil yang sangat baik dibandingkan dengan tahun 2023, ada kenaikan pada PDRB dan laju pertumbuhannya terutama pada 3 sektor penting (perdagangan, jasa keuangan dan transportasi/pergudangan), maka hal ini menunjukkan Kota Sukabumi sangat strategis untuk menarik minat investor untuk membuka lahan pekerjaan baru.

Strategic Issued : sebagai upaya untuk meningkatkan PDRB yang berdampak terhadap Pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi, maka harus mampu mempersiapkan Pendidikan yang berkualitas (terutama lama sekolah), penyediaan lahan pekerjaan dan

menumbuhkan iklim investasi berupa penanaman modal asing/lokal terutama pada 3 sektor utama (perdagangan, jasa keuangan dan transportasi/pergudangan) yang menunjukkan daya saing ekonomi Kota Sukabumi.

1.3.3.2 FASILITAS WILAYAH ATAU INFRASTRUKTUR

Pembangunan akan semakin meningkat jika lalu lintas perhubungan darat tidak mengalami hambatan, karena perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang sangat besar peranannya dalam pembangunan untuk membuka isolasi suatu daerah. Salah satu indikator keberhasilan sektor perhubungan adalah dengan ***tersedianya fasilitas jalan***. Terus membaiknya perekonomian, baik domestik maupun global, serta positifnya prospek perekonomian daerah ke depan, mendorong semakin besarnya peluang investasi yang dapat masuk ke Kota Sukabumi.

Namun demikian peluang tersebut harus didukung pula oleh penciptaan situasi dan kondisi Kota Sukabumi yang kondusif bagi investasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Iklim investasi yang positif dapat dilihat dari ***tingkat keamanan*** dan ketertiban yang ada serta ***kemudahan regulasi***. Tingkat keamanan dan ketertiban dapat dilihat dari upaya penanggulangan pelanggaran perda dan unjuk rasa yang mencapai 100 % (seratus persen), artinya walaupun terdapat pelanggaran perda dan unjuk rasa, pemerintah Kota Sukabumi dapat menanggulangi sehingga kondusifitas tetap terjaga. Dari sisi regulasi, terdapat 8 (delapan) buah perda yang mendukung investasi serta tersedia 38 (tiga puluh delapan) layanan perizinan dan 3 (tiga) layanan non perizinan, yang masing-masing sudah dilengkapi dengan standar operasional prosedur atau SOP.



Aspek penting lain yang menunjukkan daya saing suatu daerah adalah infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perkotaan karena infrastruktur adalah suatu sarana yang mendukung perkembangan suatu kota, baik perkembangan ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Salah satu manfaat infrastruktur adalah untuk meningkatkan perekonomian suatu kota. Kota yang memiliki potensi ekonomi dapat dikembangkan dengan pembangunan infrastruktur agar ekonomi daerah tersebut berkembang. Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian.

Dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Salah satu indikator keberhasilan sektor perhubungan adalah dengan tersedianya fasilitas jalan. Panjang jalan dapat menunjukkan tingkat keterbukaan dan perkembangan masyarakat suatu wilayah. Semakin panjang suatu jalan, maka tingkat keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi. Oleh karena itu tersedianya fasilitas jalan sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan lalulintas perekonomian di perkotaan. Berikut ini adalah data umum infrastruktur di Kota Sukabumi :

- ❖ Menurut statusnya jalan terbagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Panjang jalan negara di Kota Sukabumi pada tahun 2023 mencapai 8,80 Km, panjang jalan provinsi mencapai 37,74 Km, sementara panjang jalan Kota Sukabumi mencapai **115,74 Km**.



- ❖ Rincian kondisi jalan di Kota Sukabumi : sepanjang 36,99 Km memiliki kondisi jalan baik, sepanjang 60,86 Km memiliki kondisi jalan sedang, sepanjang 12,88 Km memiliki kondisi jalan rusak serta sepanjang 5,03 Km memiliki kondisi jalan rusak berat.



Gambar 1.8
Fasilitas Umum di Kota Sukabumi
(Sumber: BPS : Kota Sukabumi Dalam Angka 2024)

Aspek Strategis : secara kualitas dan kuantitas infrastruktur yang ada di Kota Sukabumi telah sangat baik dan lengkap. Dengan melihat Panjang jalan yang masih tinggi, tentu masih memerlukan pengembangan, perbaikan dan pengelolaan agar tetap terjaga kualitasnya untuk mendukung pembangunan di Kota Sukabumi.

Strategic Issued : peningkatan dukungan infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan di Kota Sukabumi.

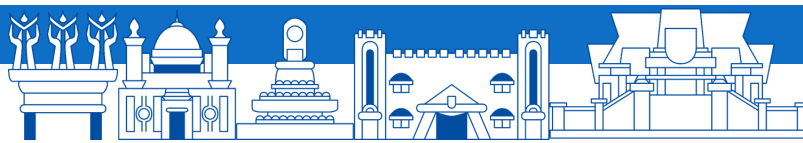
1.3.3.3 KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Salah satu kunci utama dalam menciptakan daya saing daerah adalah kualitas Sumber Daya Manusia atau SDM yang dapat dilihat dari indikator rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan atau *dependency ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 (enam puluh lima) tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan penduduk di Kota Sukabumi Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 1.3

Tabel 1.3
Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Sukabumi
Tahun 2018 – 2024

No.	Tahun	Nilai Rasio Ketergantungan
1	2018	45,95
2	2019	48,16
3	2020	46,53
4	2021	46,40
5	2022	44,93
6	2022	46,49
7	2023	46,56

Sumber: Data Agregat Penduduk Berdasarkan DKB 2018-2024, Disdukcapil diolah, 2024



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan penduduk di Kota Sukabumi paling tinggi terjadi pada tahun 2019 dimana rasio ketergantungan penduduk mencapai 48,16 (empat puluh delapan koma enam belas) dan terendah pada tahun 2023 ini dengan mencapai **46,49** (Empat puluh Enam koma Empat Sembilan) yang artinya setiap 100 (seratus) orang produktif menanggung 46-47 (empat puluh enam sampai empat puluh tujuh) orang yang tidak produktif. Data Kualitas SDM lainnya di antaranya :

- ❖ **99,58%** penduduk Kota Sukabumi yang Wajib KTP telah memiliki KTP.
- ❖ **98,90%** angka melek huruf pada usia diatas 45 tahun.
- ❖ Angka Partisipasi Murni (APM) pada setiap jenjang Pendidikan SD/MI 99,98%, SMP/MTS 82,96% dan SMA/MA 72,50% mengalami kenaikan rata-rata **1,5-2,0%**.
- ❖ Angka partisipasi Kasar (APK) pada setiap jenjang Pendidikan SD/MI 105,05%, SMP/MTS 87,65% dan SMA/MA 72,50% mengalami kenaikan rata-rata **1,10-1,58%**.
- ❖ Sebaran agama di Kota Sukabumi : **Islam 96,35%**, Kristen Protestan 2,07%, Kristen Katolik 1,31%, Hindu 0,014% dan Budha 1,12%.
- ❖ Sebaran usia yang telah selesai menempuh jenjang Pendidikan di Kota Sukabumi, SD/MI 29,01%, SMP/MTs 21,24%, **SMA/MA 37,38%**, D3 1,08% dan S1 3,00%.
- ❖ Sebaran jenis pekerjaan aktif di Kota Sukabumi, **karyawan swasta 11,24%**, Buruh Harian Lepas 10,58%, PNS/TNI/Polri/Pensiunan 3,75% dan Petani/ternak 0,36%.



Aspek Strategis : dengan rasio ketergantungan penduduk diangka 44,56, maka setiap 100 orang produktif menanggung 45 orang. Potensi SDM yang ada cukup beragam dengan sebaran pada karyawan swasta, lulusan SMA, beragama Islam dan mampu membaca menulis dengan baik.

Strategic Issued : Peningkatan kualitas SDM, ketahanan keluarga dan sosial kemasyarakatan/kesejahteraan masyarakat terlebih dalam masa pemulihan sosial ekonomi, agar sektor usaha industri, pertokoan, jasa wisata, hotel dan kuliner bisa menyerap kembali potensi sebaran tenaga kerja yang ada.

1.3.4. ASPEK PEMERINTAHAN KOTA SUKABUMI

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah Kota Sukabumi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pemerintah Kota Sukabumi menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang terdiri dari urusan wajib, baik urusan wajib pelayanan dasar maupun urusan wajib non pelayanan dasar, serta urusan pilihan.

Urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi terdiri dari **6 (enam)** urusan yaitu:

1. Urusan pendidikan;
2. Urusan kesehatan;
3. Urusan pekerjaan umum dan tata ruang;
4. Urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;



5. Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Urusan sosial.

Sedangkan **urusan wajib non pelayanan dasar** yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi terdiri dari **17** (tujuh belas) urusan yaitu:

1. Urusan lingkungan hidup;
2. Urusan kepemudaan dan olah raga;
3. Urusan penanaman modal;
4. Urusan koperasi dan UKM;
5. Urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
6. Urusan tenaga kerja;
7. Urusan pangan;
8. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana atau KB;
10. Urusan perhubungan;
11. Urusan komunikasi dan informatika;
12. Urusan pertanahan;
13. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. Urusan budaya;
15. Urusan statistik;
16. Urusan kearsipan; dan
17. Urusan perpustakaan.

Adapun **urusan pilihan** yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, terdapat **6** (enam) urusan, yaitu:

1. Kelautan dan Perikanan,
2. Pariwisata,
3. Pertanian,
4. Perdagangan,
5. Perindustrian, dan



6. Transmigrasi.

Sehingga total terdapat **29 (dua puluh sembilan) urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi.**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, dibentuk perangkat daerah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Tipe B;
2. Sekretariat DPRD tipe B;
3. Inspektorat tipe B;
4. Dinas, terdiri dari:
 - a. Dinas tipe A, yaitu:
 - 1) Dinas pendidikan dan kebudayaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - 2) Dinas kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
 - 3) Dinas ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, dan perikanan;
 - b. Dinas tipe B, yaitu:
 - 1) Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan perlindungan anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan perlindungan anak;



- 2) Dinas lingkungan hidup, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- 3) Dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
- 4) Dinas koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, dan perdagangan;
- 5) Dinas kepemudaan, olahraga, dan pariwisata, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
- 6) Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- 7) Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 8) Dinas komunikasi dan informatika, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian; dan
- 9) Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.

c. Dinas tipe C, yaitu:



- 1) Dinas perhubungan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - 2) Dinas sosial, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 3) Dinas tenaga kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; dan
 - 4) Dinas perpustakaan dan kearsipan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
5. Badan, terdiri dari :
- a. Badan tipe A, yaitu:
 - 1) Badan perencanaan pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
 - 2) Badan pengelolaan keuangan Daerah, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
 - b. Badan tipe B, yaitu badan penanggulangan bencana daerah menyelenggarakan sub urusan bencana
 - c. Badan tipe C, yaitu:
 - 1) Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan; dan
 - 2) Badan kesatuan bangsa dan politik dengan 2 (dua) bidang, yaitu badan kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Kecamatan terdiri dari :
- a. kecamatan tipe A, yaitu Kecamatan Cikole.
 - b. kecamatan tipe B, yaitu :



- 1) Kecamatan Warudoyong;
- 2) Kecamatan Lembursitu;
- 3) Kecamatan Gunung Puyuh;
- 4) Kecamatan Citamiang;
- 5) Kecamatan Baros; dan
- 6) Kecamatan Cibeureum.

Salah satu hal mendasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi, sampai dengan Bulan Desember tahun 2024 dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Sukabumi, per Desember 2024

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional Tertentu	567	1.088	1.655
Fungsional Umum	468	293	761
Struktural			
Eselon V	0	0	0
Eselon IV	208	147	355
Eselon III	79	34	113
Eselon II	22	6	28
Eselon I	0	0	0
Jumlah	1.344	1.568	2.912

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi, diolah 2024



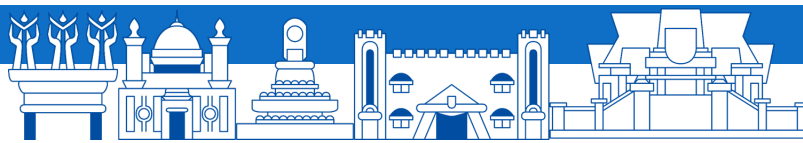
Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Sukabumi, per Desember 2024

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sampai dengan SD	29	2	31
SMP/Sederajat	24	4	28
SMA/Sederajat	193	70	263
Diploma I, II/Akta I, II	19	13	32
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	105	254	359
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D.	974	1.225	2.199
Jumlah	1.344	1.568	2.912

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi, diolah 2024

- ❖ Terdapat 2.912 orang PNS dan 727 orang PPPK sehingga total ada **3.639** orang ASN di Pemerintah Kota Sukabumi.
- ❖ Jumlah PNS Kota Sukabumi tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak **6,09% (189 orang)** dibandingkan dengan tahun 2023.
- ❖ Sebaran PNS berdasarkan tingkat kepangkatan menunjukkan data Golongan I (0,21%), Golongan II (9,15%), Golongan III (67,10%) dan Golongan IV (23,18%).
- ❖ Pemerintah Daerah Kota Sukabumi melaksanakan 29 urusan pemerintahan : 6 urusan wajib pelayanan dasar, 17 urusan wajib non pelayanan dasar dan 6 urusan pilihan yang dikerjakan oleh 31 perangkat daerah yang terdiri dari 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat Dewan, 1 Inspektorat, 3 Dinas Tipe A, 9 Dinas Tipe B, 4 Dinas tipe C, 2 Badan Tipe A, 1 Badan Tipe B, 3 Badan Tipe C dan 7 Kecamatan.

Aspek Strategis : dengan potensi organisasi dan SDM PNS yang ada, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi memiliki potensi SDM PNS yang berkualitas dengan sebaran tingkat kepangkatan pada



golongan III dan jenjang Pendidikan di level Sarjana. Hal ini menjadi kekuatan internal yang bisa dioptimalkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Strategic Issued : Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi di Kota Sukabumi dengan adanya peningkatan kinerja, pelayan publik dan pengembangan kesempatan inovasi. Sedangkan dari aspek SDM adalah efek penyederhanaan organisasi dan perubahan jabatan fungsional yang berdampak pada mutasi dan rotasi pegawai, serta kebijakan CPNS/PPPK bagi tenaga THL/TKS.

1.4. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena memiliki dampak yang signifikan bagi entitas yaitu daerah atau masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau ***kejadian penting*** atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu strategis dapat diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu permasalahan pembangunan daerah, dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan daerah, dan KLHS. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis



meningkatkan **akseptabilitas prioritas** pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Berdasarkan aspek strategis dan *Strategic Issued* yang telah diuraikan diatas yang dikombinasikan dengan perumusan isu strategis yang telah dilaksanakan dan dimuat dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, terdapat 6 (enam) isu strategis Daerah yang teridentifikasi, yaitu sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga dan sosial kemasyarakatan;
2. Peningkatan Infrastruktur dan tata kota;
3. Daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
4. Kualitas lingkungan hidup; dan
5. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi pemerintahan yang lebih baik; dan
6. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.





BAB II

Perencanaan Kinerja

KONTEN

2.1.	RPD KOTA SUKABUMI TAHUN 2024-2026	31
2.2.	PERJANJIAN KINERJA	51

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RPD KOTA SUKABUMI TAHUN 2024-2026

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan sistem perencanaan pembangunan nasional itu sendiri adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi akan berakhir pada 20 September Tahun 2023. Dengan demikian terdapat konsekuensi logis dimana Kota Sukabumi tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sampai nanti disusunnya RPJMD periode tahun 2025-2030 yang merupakan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih masa bakti 2025-2030.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yaitu RKPD, yang selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (*Inmendagri*) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), Pemerintah Daerah Kota Sukabumi harus menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 yang nantinya akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 disusun secara simultan dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026. RPD



ini merupakan kerangka pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025. Selain itu, RPD ini disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan hingga terpilihnya Wali Kota Sukabumi definitif hasil Pilkada serentak tahun 2024.

Penyusunan RPD pada prinsipnya sama dengan penyusunan RPJMD, hanya terdapat sedikit perbedaan dalam tahapan penyusunan dan substansi yang terkandung di dalamnya. Dalam penyusunan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2018-2023;
4. RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional;
7. Regulasi yang berlaku.

RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas, kerangka pendanaan dan program perangkat daerah, dan kinerja pemerintahan daerah akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi setiap tahunnya mulai tahun 2024. Adapun tahapan penyusunan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sepenuhnya mengacu pada Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, yaitu sebagai berikut :



1. Persiapan penyusunan rancangan RPD;
2. Penyusunan rancangan RPD;
3. Forum Perangkat Daerah/Konsultasi Publik (FPD/FKP);
4. Perumusan rancangan akhir RPD;
5. Reviu APIP;
6. Fasilitasi RPD; dan
7. Penetapan RPD.

Selanjutnya untuk penentuan program/ kegiatan/ subkegiatan dalam penyusunan Rencana RPD Kota Sukabumi akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan Tahun 2022;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan Tahun 2022 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku;
7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

RPD yang telah disusun selanjutnya dijabarkan dalam RKPD yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah. RPD menjadi dokumen yang sangat strategis, sebab merupakan :

1. Penjabaran pelaksanaan RPJPD periode atau tahap kelima;
2. Perwujudan dari rencana tata ruang wilayah Daerah tahun 2022- 2042;



3. Pedoman akhir dalam penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah;
4. Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah;
5. Instrumen dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja Penjabat Wali Kota dan kinerja kepala Perangkat Daerah; dan
6. Instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda.

Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategis dalam RPD dengan perencanaan strategis dan perencanaan operasional di Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Daerah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi.

Dengan disusunnya RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 maka seluruh entitas Kota Sukabumi diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif



yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud untuk mengetahui kinerja utama dalam kurun waktu 2024-2026.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kota Sukabumi dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan mempertimbangkan :

1. Visi dan misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025;
2. Analisis sasaran pokok dan arah kebijakan periode terakhir RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025; dan
3. Isu strategis aktual Kota Sukabumi.

Visi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 adalah Terwujudnya Kota Sukabumi sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman dan Taqwa. Adapun misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM yang beriman, bertaqwa dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas;
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
4. Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan amanah; dan
6. Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah.



Berdasarkan analisis sasaran pokok dan arah kebijakan periode terakhir RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, capaian pembangunan pada tahap ini ditandai dengan :

1. SDM yang semakin berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, dan berakhlak mulia;
2. Meningkatnya kualitas pendidikan;
3. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat;
4. Meningkatnya IKM berkelanjutan dan perdagangan yang berdaya saing;
5. Meningkatnya kapasitas ASN dalam menjalankan roda pemerintahan; dan
6. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang terjangkau dan didukung sarana prasarana.

Berdasarkan irisan visi misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, dan isu strategis aktual, maka tujuan dan sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024**

Tabel 2.1
Matriks Tujuan, Sasaran dan Indikator RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

TUJUAN/SASARAN/ OUTCO ME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Tujuan:						
Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,35	5,37	5,39	5,41
Sasaran:						
Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	Persen	3,80	4,00	4,20	4,40
Outcome:						
Meningkatnya iklim usaha yang kondusif	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen	69,3	80	82	85
Meningkatnya stabilitas pasokan dan harga pangan	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persen	4,88	5,88	6,38	6,88
	Persentase ketersediaan pangan pokok	Persen	100	100	100	100
Mewujudkan UMKM dan wirausaha naik kelas yang mampu bersaing	Persentase usaha mikro yang naik kelas	Persen	0,01	0,01	0,02	0,03



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

TUJUAN/SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
dipasar domestik dan global						
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan	Persen	20	40	60	80
Meningkatnya promosi produk lokal	Persentase promosi produk lokal yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100
Sasaran:						
Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Indeks Kota Kreatif	Poin	90	91,5	92	92,5
Outcome:						
Meningkatnya kegiatan ekonomi kreatif masyarakat	Nilai tambah ekonomi kreatif	Persen	14	16	19	22
Meningkatnya daya tarik wisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	21,78	21,80	21,90	22
	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Persen	4	4	6	7
Tujuan:						
	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,40	75,55	75,75	75,80



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

TUJUAN/SASARAN/ OUTCO ME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif						
Sasaran:						
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	71,55	71,58	71,68	71,77
Outcome:						
Terpenuhinya SPM Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	Persen	88.93	100	100	100
Meningkatnya literasi masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	65.34	70.5	71	72
Sasaran:						
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi	Poin	0,31	0,33	0,35	0,37
Outcome						
Terpenuhinya SPM Kesehatan	Indeks Pencapaian SPM Kesehatan	Persen	88.93	100	100	100
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Prevalensi stunting pada balita	Persen	6,28	6	5,75	5,5
	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Persen	100	100	100	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Persen	13,64	15,88	18,16	20,44
Meningkatnya kepesertaan JKN	Persentase kepesertaan JKN	Persen	98,43	98,5	98,6	98,7
Meningkatnya pembinaan keluarga berencana	Persentase keluarga yang mengikuti program KB	Persen	64,24	65	65,5	66
Sasaran:		Rp/				
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Pekerja	19,025	20,001	21,001	22,001
Outcome:						
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	80	81	82	83
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	80	85	87,5	90
Tujuan:						
Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Poin	64,50	65,00	65,25	65,50
Sasaran:						



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	85,20	86,00	86,20	86,50
Outcome:						
Meningkatnya konektivitas wilayah	Tingkat kemantapan jalan kota	Persen	84,54%	85	86	87
	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar PJU	Persen	82,85	83,54	83,87	84,2
Meningkatnya pengelolaan sampah dan sanitasi	Cakupan pengelolaan sampah	Persen	99,55	100	100	100
	Persentase jumlah RT yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	57,87%	58,30	58,73	59,16
Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Persentas berkurangnya jumlah RTLH	Persen	100,00%	69.44	38.88	0.69
	Luasan pengurangan kawasan kumuh	Ha	19,79	15	20	15
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kenyamanan	Predikat	Nyaman	Nyaman	Nyaman	Nyaman
	Indeks RTH	m2/orang	25	25,5	26	26,5
Sasaran:						
Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Indeks Rasa Aman	Persen	75,31	75,40	75,55	75,60
Outcome:						



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Terpenuhinya SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal trantibmas	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama	Persentase Konflik Antar Inter Umat Beragama yang terselesaikan	Poin	100	100	100	100
Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan penanganan resiko banjir dan longsor	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir dan longsor yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir WS kewenangan kota	Persen	57,32%	62,18	67,03	71,89
Terpenuhinya SPM bagi warga di kawasan rawan bencana dan warga korban bencana	Persentase pemenuhan SPM sub urusan bencana bagi daerah rawan dan korban bencana	Persen	53	55	56	57
Terpenuhinya SPM kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap bencana bagi korban bencana	Persentase pemenuhan SPM kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persen	100	100	100	100
Tujuan:						



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Indek Reformasi Birokrasi	Poin	71,05	73,00	74,00	75,00
Sasaran:						
Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	71,05	73,00	74,00	75,00
Outcome:						
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai standar	Persen	100	100	100	100
	Persentase pencapaian IKU	Persen	100	100	100	100
	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dan tingkat kota	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	Persen	96,67	97,33	97,66	98
Meningkatnya kapasitas ASN	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan kompetensi	Persen	7,68	7,9	8,0	8,5
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	Persentase penyelenggaraan pengadaan yang dilakukan secara online	Persen	100	100	100	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

TUJUAN/SASARAN/ OUTCO ME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
pengadaan barang dan jasa						
Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Ditindaklanjuti	Persen	45	76	77	78
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang Ditindaklanjuti	Persen	45	80	81	82
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kebijakan publik	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100	100
	Persentase koordinasi dan fasilitasi produk hukum daerah	Persen	100	100	100	100
	Persentase propemperda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya penggunaan aplikasi informatika di pemerintahan	Persentase pengelolaan aplikasi informatika yang digunakan dalam pemerintahan	Persen	90	93	95	97
Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan	Persen	100	100	100	100
Sasaran:						



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
Outcome:						
Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan Iptek	Persentase instansi/lembaga yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	100	100	100	100

Sumber : RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, Bappeda (Hasil Analisis)



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

Tabel 2.2
Logical Framework Pencapaian Tujuan Kesatu

TUJUAN	TUJUAN								
	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif								
	INDIKATOR TUJUAN								
	Laju Pertumbuhan Ekonomi								
SASARAN	SASARAN								
	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa						Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif		
	INDIKATOR SASARAN								
	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB						Indeks Kota Kreatif		
PROGRAM	OUTCOME								
	Meningkatnya iklim usaha yang kondusif	Meningkatnya stabilitas pasokan dan harga pangan		Mewujudkan UMKM dan wirausaha naik kelas yang mampu bersaing dipasar domestik dan global	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan	Meningkatnya promosi produk lokal	Meningkatnya kegiatan ekonomi kreatif masyarakat	Meningkatnya daya tarik wisata	
	INDIKATOR OUTCOME								
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persentase ketersediaan pangan	Persentase usaha mikro yang naik kelas	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan	Persentase promosi produk lokal yang dilaksanakan	Nilai tambah ekonomi kreati	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata
	PROGRAM								
	Pelayanan Penanaman Modal	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pemasaran Pariwisata
	INDIKATOR PROGRAM								
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persentase ketersediaan pangan pokok	Persentase usaha mikro yang naik kelas	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan	Persentase promosi produk lokal yang dilaksanakan	Nilai tambah ekonomi kreati	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata
PD	DPMPTSP	Diskumindag	DKP3	Diskumindag			Disporapar		



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

Tabel 2.3
Logical Framework Pencapaian Tujuan Kedua

TUJUAN	TUJUAN									
	Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif									
	INDIKATOR TUJUAN									
	Indeks Pembangunan Manusia									
SASARAN	SASARAN									
	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	
	INDIKATOR SASARAN									
	Indeks Pendidikan		Indeks Keluarga Sehat Sukabumi						Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	
PROGRAM	OUTCOME									
	Terpenuhinya SPM Pendidikan	Meningkatnya literasi masyarakat	Terpenuhinya SPM Kesehatan	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan			Meningkatnya kepesertaan JKN	Meningkatnya pembinaan keluarga berencana	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja
	INDIKATOR OUTCOME									
	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks Pencapaian SPM Kesehatan	Prevalensi stunting pada balita	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Persentase kepesertaan JKN	Persentase keluarga yang mengikuti program KB	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan
	PROGRAM									
	Pengelolaan Pendidikan	Pembinaan Perpustakaan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Penempatan Tenaga Kerja
	INDIKATOR PROGRAM									
	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks Pencapaian SPM Kesehatan	Prevalensi stunting pada balita	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Persentase kepesertaan JKN	Persentase keluarga yang mengikuti program KB	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan
PD	Disdikbud	Dispusip	Dinkes					Dalduk KB PPA	Disnaker	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

Tabel 2.4
Logical Framework Pencapaian Tujuan Ketiga

TUJUAN	TUJUAN																									
	Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan																									
	INDIKATOR TUJUAN																									
	Indeks Kota Layak Huni																									
SASARAN	SASARAN																									
	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas							Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana																		
	INDIKATOR SASARAN																									
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur							Indeks Rasa Aman																		
PROGRAM	OUTCOME																									
	Meningkatnya konektivitas wilayah		Meningkatnya pengelolaan sampah dan sanitasi		Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Terpenuhinya SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama		Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan penanganan resiko banjir dan longsor		Terpenuhinya SPM bagi warga di kawasan rawan bencana dan warga korban bencana		Terpenuhinya SPM kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap bencana bagi korban bencana									
	INDIKATOR OUTCOME																									
	Tingkat kemantapan jalan kota		Persentase ruas jalan yang memenuhi standar PJU		Cakupan pengelolaan sampah		Persentase jumlah RT yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		Persentas berkurangn ya jumlah RTLH		Luasan pengurangana n kawasan kumuh		Indeks Kenyamanan		Indeks RTH		Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal trantibmas		Persentase Konflik Antar Inter Umat Beragama yang terselesaikan		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir dan longsor yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir WS kewenangan kota		Persentase pemenuhan SPM sub urusan bencana bagi daerah rawan dan korban bencana		Persentase pemenuhan SPM kebutuhan dasar bagi korban bencana	
	PROGRAM																									
	Penyelengga raan Jalan		Penyelengga raan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Pengelolaan Persampaha n		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		Kawasan Permukiman		Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Pengelolaan Keanekarag aman Hayati (Kehati)		Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		Penanggulan g Bencana		Penanganan Bencana	
INDIKATOR PROGRAM																										
Tingkat kemantapan jalan kota		Persentase ruas jalan yang memenuhi standar PJU		Cakupan pengelolaan sampah		Persentase jumlah RT yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		Persentas berkurangn ya jumlah RTLH		Luasan pengurangana n kawasan kumuh		Indeks Kenyamanan		Indeks RTH		Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal trantibmas		Persentase Konflik Antar Inter Umat Beragama yang terselesaikan		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir dan longsor yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir WS kewenangan kota		Persentase pemenuhan SPM sub urusan bencana bagi daerah rawan dan korban bencana		Persentase pemenuhan SPM kebutuhan dasar bagi korban bencana		
PD	DPUTR	Dishub	DLH	DPUTR	DPUTR	DPUTR	DLH		Satpol PP Damkar		Kesbangpol		DPUTR		BPBD		Dinsos									



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

Tabel 2.5
Logical Framework Pencapaian Tujuan Keempat

TUJUAN	TUJUAN															
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif															
	INDIKATOR TUJUAN															
Indek Reformasi Birokrasi																
SASARAN	SASARAN															
	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis														Meningkatnya inovasi daerah	
	INDIKATOR SASARAN															
Indek Reformasi Birokrasi															Indeks Inovasi Daerah	
PROGRAM	OUTCOME															
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan			Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Meningkatnya kapasitas ASN	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan		Meningkatnya kualitas pelayanan dan kebijakan publik			Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Meningkatnya penggunaan aplikasi informatika di pemerintahan	Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan	Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan Iptek	
	INDIKATOR OUTCOME															
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai standar	Persentase pencapaian IKU	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dan tingkat kota	Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan kompetensi	Persentase penyelenggaraan pengadaan yang dilakukan secara online	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang Ditindaklanjuti	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase koordinasi dan fasilitasi produk hukum daerah	Persentase propempera yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Cakupan pelayanan publik di kecamatan	Persentase aplikasi informatika yang digunakan dalam pemerintahan	Persentase kepemilikan data administrasi kependudukan	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	
	PROGRAM															
	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perekonomian dan Pembangunan	Penyelenggaraan Pengawasan		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aplikasi Informatika	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Daerah
	INDIKATOR PROGRAM															
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai standar	Persentase pencapaian IKU	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dan tingkat kota	Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan kompetensi	Persentase penyelenggaraan pengadaan yang dilakukan secara online	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang Ditindaklanjuti	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase koordinasi dan fasilitasi produk hukum daerah	Persentase propempera yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Cakupan pelayanan publik di kecamatan	Persentase aplikasi informatika yang digunakan dalam pemerintahan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	
PD	Bappeda			BPKPD	BKPSDM	Setda-BPR, I	Inspektorat		Setda-Organisasi	Setda-Hukum	Setwan	Kecamatan	Diskominfo	Disdukcapil	Bappeda	



2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan ***kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur*** tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Sukabumi Tahun 2024 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPD Kota Sukabumi Tahun 2024. Pada Tahun 2023, dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja sebagai akibat adanya *Refocussing* Anggaran pada Perubahan Parsial APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024.

Perjanjian Kinerja Kota Sukabumi Tahun 2024 sebagai dasar bagi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Sukabumi Tahun 2024 disajikan pada Lampiran II.



Tabel 2.6
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

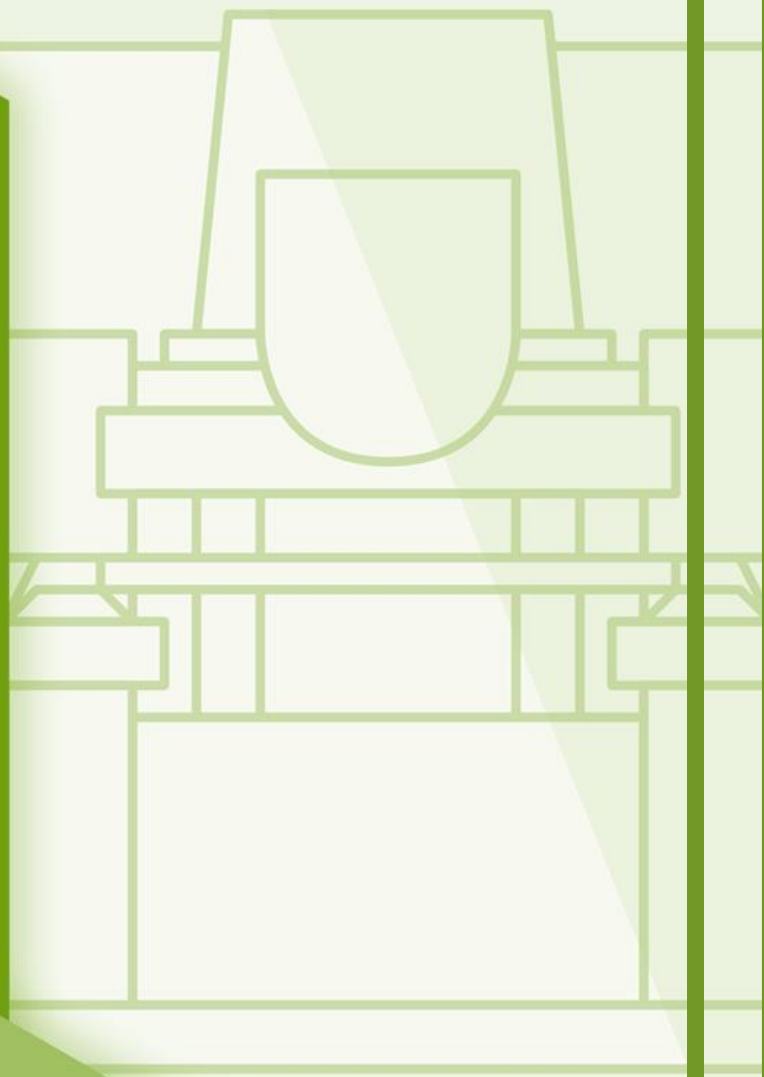
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	1) Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	Persen	4,00
2.	Berkembangnya sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif	2) Indeks Kota Kreatif	Poin	90,00
3.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	3) Indeks Pendidikan	Poin	71,58
4.	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	4) Indeks Keluarga Sehat Sukabumi	Poin	0,33
5.	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	5) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ Pekerja	20,001
6.	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	6) Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Persen	86,00
7.	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	7) Indeks Rasa Aman	Poin	75,40
8.	Meningkatnya inovasi daerah	8) Indeks Inovasi	Predikat	Inovatif

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi - Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024



BAB III

Akuntabilitas Kinerja



KONTEN

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	53
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024	55
3.3 Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Sukabumi	142

mengacu pada Perubahan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Kota Sukabumi Tahun 2024 dan APBD Kota Sukabumi Tahun 2024. Secara substantif, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024 merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota guna mewujudkan *Clean Government* dan *Good Governance*.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi diukur realisasinya berdasarkan tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun dan disepakati dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024 dan mekanismenya mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap IKU yang merupakan indikator dari sasaran strategis RPJMD dan sudah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerjanya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat



realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

- a. Tingkat Capaian Positif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Tingkat Capaian Negatif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, digunakan interpretasi pencapaian IKU berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana ditampilkan di bawah ini :

NO	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	WARNA
1	$91\% \leq 100\%$	SANGAT TINGGI	
2	$76\% \leq 90\%$	TINGGI	
3	$66\% \leq 75\%$	SEDANG	
4	$51\% \leq 65\%$	RENDAH	
5	$\leq 50\%$	SANGAT RENDAH	



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan penilaian pencapaian kinerja sasaran tersebut dapat diketahui IKU yang tercapai maupun yang tidak tercapai, selanjutnya disajikan pula data peningkatan atau penurunan realisasi kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk mengetahui capaian IKU Kota Sukabumi Tahun 2024 di tingkat provinsi maupun nasional, dilakukan perbandingan capaian IKU Kota Sukabumi Tahun 2024 dengan capaian indikator tersebut di Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. Adapun rumus perhitungan yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

a. Indikator Positif

$$X = \frac{\text{Realisasi Tahun } n - (n-1)}{\text{Realisasi Tahun } (n-1)} \times 100\%$$

b. Indikator Negatif

$$X = \frac{\text{Realisasi Tahun } (n-1) - n}{\text{Realisasi Tahun } (n-1)} \times 100\%$$

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dalam hal ini Pemerintah Kota Sukabumi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Pada Tahun 2024, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024, terdapat **8 (Delapan) IKU** yang merupakan indikator sasaran strategis RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Berikut ini adalah analisis pencapaian IKU berdasarkan Permenpan 53 Tahun 2014,



tentang Petunjuk teknis pelaporan kinerja instansi pemerintah, maka diuraikan sebagai berikut :

3.2.1 Pencapaian IKU Tahun 2024

Merujuk pada pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Penetapan indikator kinerja utama (IKU) bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan itu tidak hanya dipengaruhi oleh keberhasilan pencapaian *outcome* dan *output* saja, akan tetapi dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan baik internal dan eksternal. Penetapan IKU yang dijabarkan dalam bentuk target setiap tahun akan menjadi sarana bagi Pemerintah Kota Sukabumi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kota Sukabumi.

Oleh karena itu, dalam penentuan target IKU Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 tetap memperhatikan capaian target IKU pada periode sebelumnya dan memperhatikan kecenderungan/*trend* di masa depan yang dapat mempengaruhi



pencapaian IKU tersebut. Berikut ini adalah capaian IKU tahun 2024 yang disajikan dalam Tabel 3.1 :



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024**

Tabel 3.1
Capaian IKU Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi IKU Tahun 2024	Capaian IKU 2024 (%)	Interpretasi
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
1.	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	Persen	4	4,18	104,50	SANGAT TINGGI
2.	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Indeks Kota Kreatif (IKK)	Poin	90	96	106,67	SANGAT TINGGI
3.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan (IP)	Poin	71,58	72,43	101,19	SANGAT TINGGI
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Poin	0,33	0,35	106,06	SANGAT TINGGI
5.	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Peke rja	20.001	20.518	102,90	SANGAT TINGGI
6.	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Persen	86	80,23	93,29	SANGAT TINGGI
7.	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Indeks Rasa Aman (IRA)	Poin	75,4	75,4	100,00	SANGAT TINGGI
8.	Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah (IDI)	Predikat	Inovatif	Sangat Inovatif	100,00	SANGAT TINGGI
Rata – rata Capaian IKU Kota Sukaubumi Tahun 2024						101,83	SANGAT TINGGI

Sumber Data : Bappeda Kota Sukabumi, 2024



Berdasarkan Tabel 3.1 diatas, terdapat **7 (Tujuh)** Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencapai target Tahun 2024, dan hanya **1 (Satu)** IKU yang tidak tercapai. Capaian IKU Pemerintah Kota Sukabumi secara **rata-rata capaian IKU** adalah **101,83%**. Seluruh Indikator kinerja Utama (IKU), 8 indikator memiliki tingkat capaian kinerja **91%≤** (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh satu persen) sehingga diinterpretasikan ke dalam kategori kinerja **SANGAT TINGGI**. Berikut ini adalah analisis umum dari capaian IKU Tahun 2024 :

- ✓ Indeks Keluarga Sehat (IKS) menunjukkan capaian *tertinggi* yakni **106,06%** dan merupakan indikator sasaran utama pencapaian tujuan 2 (Dua) mengenai Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif.
- ✓ Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur menunjukkan capaian *terendah* yakni **93,29%** dan merupakan indikator sasaran utama pencapaian tujuan 3 (Tiga) mengenai Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan.
- ✓ Indikator Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB dan Indeks Kota kreatif yang merupakan indikator sasaran utama terendah pada pencapaian tujuan 1 (Satu) mengenai Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang Inklusif dengan Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menunjukkan capaian **95,16%** dengan capaian tahun 2024 sebesar **5,11%**.
- ✓ Kontribusi IKU terhadap capaian Indikator Tujuan yang lain diantaranya Indeks Pembangunan Manusia yang mencapai **102,83%** dengan capaian 77,69 poin, Indeks Kota Layak Huni yang mencapai **101,14%** dengan capaian 65,74 poin dan Indeks Reformasi Birokrasi yang mencapai **119,77%** dengan capaian 87,43 poin (Nilai Sementara).



3.2.2 Perbandingan Capaian IKU 2024 dengan Target Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai amanah dari Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB). Apabila dilihat dari sisi fungsi dan manfaat RPD maka sebenarnya kedudukannya sama dengan RPJMD hanya perbedaan signifikannya RPD tidak disusun melalui pendekatan politis dimana tidak menjabarkan visi misi dan janji kepala daerah terpilih. Dengan demikian, hubungan antara dokumen RPD dengan dokumen perencanaan lainnya sama maknanya dengan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya yang didalamnya mempertimbangkan keberhasilan dan kegagalan pembangunan di tahun-tahun sebelumnya dan memiliki keterhubungan yang kuat dengan perencanaan jangka panjang selanjutnya.

Oleh karena itu, RPD merupakan bagian yang ***terintegrasi*** dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Maka untuk melihat sinkronisasi dan integrasi antara RPD dengan RPJMD Sebelumnya, diperlukan analisis/kajian setidaknya di level *outcomes* atau *impact* yang terpetakan dalam IKU dan Indikator program utama pendukung pencapaian IKU kepala daerah tahun 2024. Berikut ini adalah perbandingan capaian IKU Tahun 2024 dengan Tahun 2023 :



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024**

Tabel 3.2
Capaian IKU Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024 dibandingkan dengan Capaian Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi IKU Tahun 2024	Capaian IKU 2024 (%)	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023 (%)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
1.	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	4	4,18	104,50	3,3	3,37	112,3
2.	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Indeks Kota Kreatif (IKK)	90	96	106,67	63,6	86,59	136,15
3.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan (IP)	71,58	72,43	101,19	69,83	72,34	103,59
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,33	0,35	106,06	0,36	0,32	88,89
5.	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	20.001	20.518	102,90	19.000	20.518	107,99
6.	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	86	80,23	93,29	82	80,15	97,74
7.	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Indeks Rasa Aman (IRA)	75,4	75,4	100,00	74,00	74,7	100,95
8.	Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah (IDI)	Inovatif	Sangat Inovatif	100,00	Inovatif	Inovatif	100,00

Sumber Data : Bappeda Kota Sukabumi, 2024



Berdasarkan Tabel 3.2 diatas, terdapat **2 (Dua)** IKU Tahun 2024 yang tidak terdapat di tahun 2023 namun angka capaiannya bisa diperoleh yakni Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dan Indeks Rasa Aman. Pada tahun 2023, indikator yang digunakan untuk kedua IKU tersebut adalah Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Kedua indikator tersebut mendukung pencapaian tujuan yang sama yakni pertumbuhan ekonomi daerah dan mewujudkan kenyamanan bagi masyarakat Kota Sukabumi. Sementara 6 (Enam) IKU Tahun 2024 terdapat juga di IKU Tahun 2023. Berikut ini adalah analisis umum dari capaian IKU Tahun 2024 dibandingkan dengan IKU Tahun 2023 :

- ✓ Pada Tahun 2024, terdapat 7 IKU yang mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan pada tahun 2023, terdapat 6 IKU yang mencapai target yang telah ditentukan.
- ✓ Kendatipun target yang ditentukan pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditentukan pada tahun 2023, namun tingkat ketercapaiannya menunjukkan kategori SANGAT TINGGI pada semua IKU Tahun 2024
- ✓ Selisih tertinggi antara capaian IKU tahun 2023 dengan IKU Tahun 2024 terdapat pada IKU 2 yakni Indeks Kota Kreatif (IKK) sebesar **29,48%**. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian target atas capaian tahun 2023 yakni 86,59 poin sehingga pada tahun 2024 target yang ditentukan diatas capaian tahun sebelumnya.
- ✓ Rata-rata capaian IKU Tahun 2024 sebesar 101,83% sedangkan rata-rata capaian IKU Tahun 2023 sebesar 118,85%



3.2.3 Perbandingan Capaian IKU 2024 dengan Target Akhir RPD 2024-2026

RPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dijabarkan dalam RKPD sebagai perencanaan tahunan Daerah. Prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD harus berpedoman pada RPD yang artinya harus selaras dengan program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPD. Selain itu rencana program dan kegiatan prioritas tahunan Daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPD.

Sebagaimana yang tersajikan dalam RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, maksud penyusunan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 adalah untuk menjaga **kesinambungan pembangunan** dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun tujuan penyusunan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 adalah :

1. Menjamin keselarasan tujuan dan sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 dengan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2025 dan isu-isu aktual;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. Sebagai panduan bagi seluruh entitas di Kota Sukabumi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten yang berbatasan.

Oleh karena itu capaian dari tahun per tahun dalam RPD sangatlah dibutuhkan untuk sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut adalah perbandingannya yang tersaji dalam Tabel dibawah ini :



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024**

Tabel 3.3
Capaian IKU Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir RPD
(Tahun 2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi IKU Tahun 2024	Capaian IKU 2024 (%)	Target Tahun 2026	Capaian (%)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
1.	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	4	4,18	104,50	4,40	95,00
2.	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Indeks Kota Kreatif (IKK)	90	96	106,67	92,5	153,6
3.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan (IP)	71,58	72,43	101,19	71,77	100,87
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,33	0,35	106,06	0,37	94,60
5.	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	20.001	20.518	102,90	22,001	93,55
6.	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	86	80,23	93,29	86,50	92,75
7.	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Indeks Rasa Aman (IRA)	75,4	75,4	100,00	75,60	99,74
8.	Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Inovatif	Sangat Inovatif	100,00	Inovatif	100

Sumber Data : Bappeda Kota Sukabumi, 2024



Berdasarkan Tabel 3.3 diatas, terdapat **3 (Dua)** IKU Tahun 2024 sudah mencapai target akhir RPD Tahun 2026 yakni Indeks Kota Kreatif **(153,6)**, Indeks Pendidikan **(100,87)** dan Indeks Inovasi Daerah yang sudah memperoleh Kota Sangat Inovatif. Artinya pada tahun 2025 dan 2026 harus dilakukan penajaman target terhadap *baseline* yang telah diperoleh pada capaian tahun 2024. Sehingga kedepan taget yang ditentukan bisa lebih SMART. Berikut ini adalah analisis umum dari capaian IKU Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir RPD Tahun 2026 :

- | | |
|--|---|
| <p>✓ <i>Gap Analysis</i> tertinggi berada pada pencapaian IKU 6 : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur yang baru mencapai 92,75% dari target yang ditentukan tahun 2026 yakni sebesar 86,50.</p> | <p>✓ Indeks Keluarga Sehat (IKS) juga telah melampaui target tahun 2025 yakni 0,35 poin, sedangkan indeks rasa aman sudah hampir mencapai target tahun 2025 yakni 75,55% (99,74% dari target Tahun 2026).</p> |
|--|---|

3.2.4 Perbandingan Capaian IKU 2024 dengan Capaian Tingkat Provinsi & Nasional

Perbandingan capaian IKU dengan tingkat provinsi dan nasional berguna untuk melihat adanya permasalahan pembangunan yang teratasi. Permasalahan pembangunan daerah merupakan **“gap expectation”** antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk



mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

Saat ini, negara-negara di seluruh dunia tengah berjuang untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi *Covid-19*, termasuk Indonesia. Ada tiga kunci menuju pemulihan ekonomi pasca pandemi. **Pertama**, memaksimalkan terbukanya lapangan kerja dalam sektor-sektor potensial seperti sektor digital melalui pembangunan kapasitas dan keterampilan yang relevan. **Kedua**, adalah mendorong produktivitas untuk menciptakan nilai tambah pada sektor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. **Ketiga**, menciptakan ekosistem untuk bumi yang layak huni, mendorong lapangan kerja yang berkelanjutan dan transisi energi yang adil dan terjangkau.

Kendati demikian, Indonesia perlu waspada lantaran jumlah penduduk yang jauh lebih besar, terutama periode tahun 2020-2030, dimana Indonesia ingin keluar dari *middle income trap*. Ini menjadi tantangan bagi generasi muda sehingga perlu meningkatkan produktivitasnya, salah satunya dengan terlibat aktif dalam menguatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Sementara di level provinsi, penduduk Jawa Barat mayoritas berada di wilayah Jawa Barat tengah ke utara dengan karakteristik industrial dan modern. Sisanya berada di wilayah tengah ke selatan dengan bentuk geografis yang curam karena banyak pegunungan. Distribusi penduduk yang timpang tersebut juga dikarenakan berbagai hal seperti ketersediaan infrastruktur yang masih timpang.

Pembangunan infrastruktur yang merata diperlukan antara utara dan selatan Jawa Barat. Hal ini diperlukan agar terjadi pemerataan investasi antara Jabar bagian utara dan selatan dalam rangka mendorong ketahanan dan inklusivitas pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Pembangunan kawasan selatan Jawa Barat



harus dipercepat lagi. Kawasan itu memiliki potensi pariwisata dan agribisnis. Namun untuk pengembangan Jawa Barat selatan perlu dukungan infrastruktur, seperti pusat distribusi dan pelabuhan. Kemudian pembangunan jaringan telekomunikasi untuk pengembangan pariwisata.

Perbandingan capaian Kota Sukabumi, Provinsi dan nasional ini juga berfungsi untuk melihat adanya permasalahan pembangunan yang berada disetiap level pemerintah daerah, diantaranya :

- | | |
|--|--|
| 1. Pemilihan umum dan pilkada serentak tahun 2024. | 4. Perbaikan ekonomi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa. |
| 2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan berdaya saing tinggi berlandaskan agama, budaya dan intelektualitas. | 5. Kemiskinan Ekstrem dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka (TPT). |
| 3. Permukiman kumuh, penataan lingkungan hidup dan pencegahan kebencanaan. | 6. Ketahanan pangan dan energi serta optimalisasi upaya penanganan <i>Stunting</i> . |
| | 7. Perbaikan reformasi birokrasi yang berdampak. |

Berdasarkan kesamaan permasalahan diatas, maka IKU Kota Sukabumi Tahun 2024 telah menunjukkan ***kontribusi langsung*** terhadap penyelesaian permasalahan di tingkat Provinsi maupun Nasional. Bahkan capaian IKU Kota Sukabumi Tahun 2024 telah melampaui capaian tingkat provinsi Jawa Barat maupun nasional. Berikut ini adalah data yang bisa disajikan dalam tabel dibawah ini :



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024**

Tabel 3.4
Capaian IKU Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024 serta Perbandingannya Terhadap
Capaian Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi IKU Tahun 2024	Capaian IKU 2024 (%)	Realisasi Jawa Barat	Realisasi Nasional	Capaian IKU 2024 P/N (%)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
1.	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	4	4,18	104,50	15,1	12,94	27,77 32,30
2.	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Indeks Kota Kreatif (IKK)	90	96	106,67	97,3	-	98,66
3.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan (IP)	71,58	72,43	101,19	65,12	64,29	111,23 115,77
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,33	0,35	106,06	-	-	-
5.	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	20.001	20.518	102,90	21.194	19.027	97,11 108,17
6.	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	86	80,23	93,29	73,50	70,25	109,16 114,21
7.	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Indeks Rasa Aman (IRA)	75,4	75,4	100,00	-	-	-
8.	Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah (IDI)	Inovatif	Sangat Inovatif	100,00	Sangat Inovatif	-	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, 2024



3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2024 serta Solusi yang Telah dilakukan

Pelaporan kinerja adalah rangkuman kerja yang menjelaskan capaian kinerja suatu instansi atau perorangan. Laporan ini disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejalan dengan apa yang menjadi tujuan pelaporan kinerja adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat;
2. Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan suatu tugas; dan
3. Sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran pada tahun mendatang

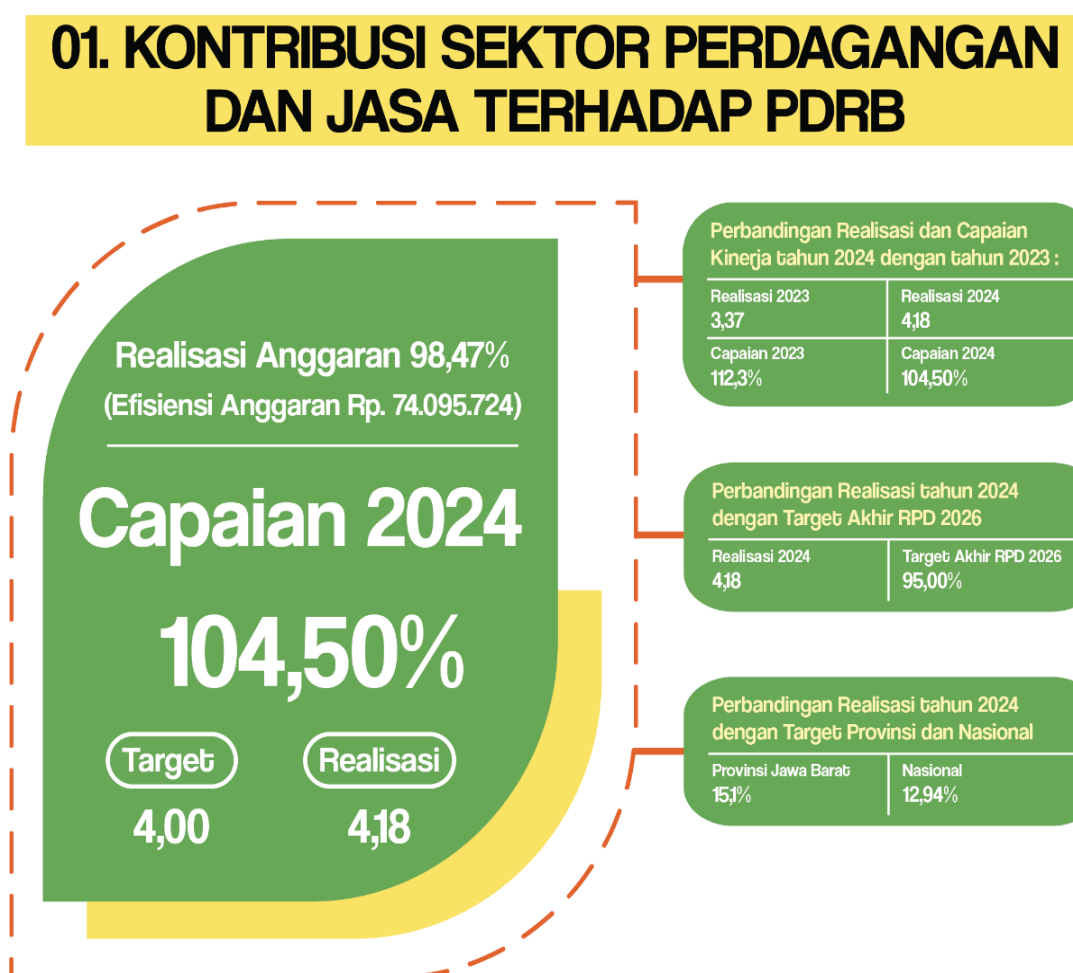
Maka penyusunan LKIP harus mampu memenuhi 3 (Tiga) tujuan diatas. Selain itu LKIP juga diharapkan bisa mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Selain itu penyusunan laporan harus memperhatikan prinsip-prinsip lain agar kualitas laporan menjadi baik yaitu :

1. Prinsip Lingkungan : menjelaskan bahwa LKIP memiliki pertanggungjawaban Isi laporan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing, dan memuat **keberhasilan maupun kegagalan**.
2. Prinsip Prioritas : Isi laporan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan dan upaya-upaya tindak lanjutnya.
3. Prinsip Manfaat : Manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.



Oleh karena itu, sebagai komitmen menjaga prinsip-prinsip penyusunan LKIP diatas, berikut ini kami uraikan analisis secara lebih mendalam per IKU dari 8 (Delapan) IKU yang ada, agar bisa memetakan penyebab kegagalan/keberhasilan dari pencapaian IKU tersebut serta dapat menjadi patokan dalam menyusun Rencana Tindak Lanjut untuk dilaksanakan di tahun yang akan datang.

3.2.5.1 Penjelasan Pencapaian IKU 1 : Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB



Gambar 3.1
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 :
Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB
Kota Sukabumi Tahun 2024**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi, 2024



Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan kegiatan ekonomi yang berdampak pada terjadinya ***peningkatan jumlah produksi barang dan jasa*** di suatu daerah pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di masyarakat. Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat melakukan perencanaan pembangunan dengan lebih efektif. Selain itu para pelaku usaha juga dapat memanfaatkan data tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai dasar dalam melakukan perencanaan pengembangan produk dan sumber daya. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan pengembangan pada sektor perekonomian. Untuk mengembangkan potensi ekonomi, akan lebih efektif jika pemerintah daerah memfokuskan pembangunan ekonomi daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Sektor perekonomian yang unggul dan potensial akan memberikan pengaruh yang signifikan pada pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah. Sektor unggulan adalah sektor yang dapat mendukung pertumbuhan atau perkembangan sektor lain, baik yang memberikan input maupun yang menggunakan produk produk sebagai input dalam proses produksi. Sektor atau sub sektor ekonomi utama sering disebut sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah yang memenuhi kriteria sebagai sektor yang maju, memiliki laju pertumbuhan yang cepat serta memberikan kontribusi yang relatif besar dibandingkan sektor lainnya. Suatu sektor dapat diklasifikasikan sebagai sektor ekonomi utama jika tingkat pertumbuhan dan kontribusinya lebih besar daripada sektor lainnya. Sektor utama suatu wilayah (*region*) sangat erat kaitannya dengan data PDRB wilayah tersebut.

Kota Sukabumi, merupakan kota jasa dibidang perdagangan dikarenakan tidak ada sumber daya alam yang bisa dikelola.



Sehingga tumpuan utama pertumbuhan ekonomi tentu pada sektor jasa, terutama perdagangan. Kontribusi perdagangan dan jasa terhadap PDRB diharapkan dapat meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Sukabumi Tahun 2024 yang merupakan Indikator Makro pembangunan daerah. Trend LPE Kota Sukabumi sejak tahun 2021 s.d 2024 berada di rentang 5,1 sd 5,4%.

Penambahan jumlah pertumbuhan industri diantaranya pada sektor Industri Agro. Kinerja nyata yang dihadapi oleh beberapa Usaha Industri Kecil dan Menengah adalah rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya nilai tambah, dan rendahnya kualitas produk. Rendahnya tingkat produktivitas dikarenakan para pelaku usaha melakukan produksi pada saat-saat tertentu atau berproduksi karena adanya pesanan saja. Rendahnya nilai tambah karena para pelaku usaha kurang termotivasi untuk melakukan inovasi dalam hal kemasan dan inovasi dalam hal produk yang diproduksinya. Rendahnya kualitas produk, banyak diantara para pelaku usaha meminimalisir anggaran produksinya dengan cara menurunkan kualitas bahan sehingga banyak diantara pelaku usaha memiliki kualitas produk yang kurang baik.

Faktor Keberhasilan yang dilakukan pada tahun 2024 dalam mencapai target adalah :

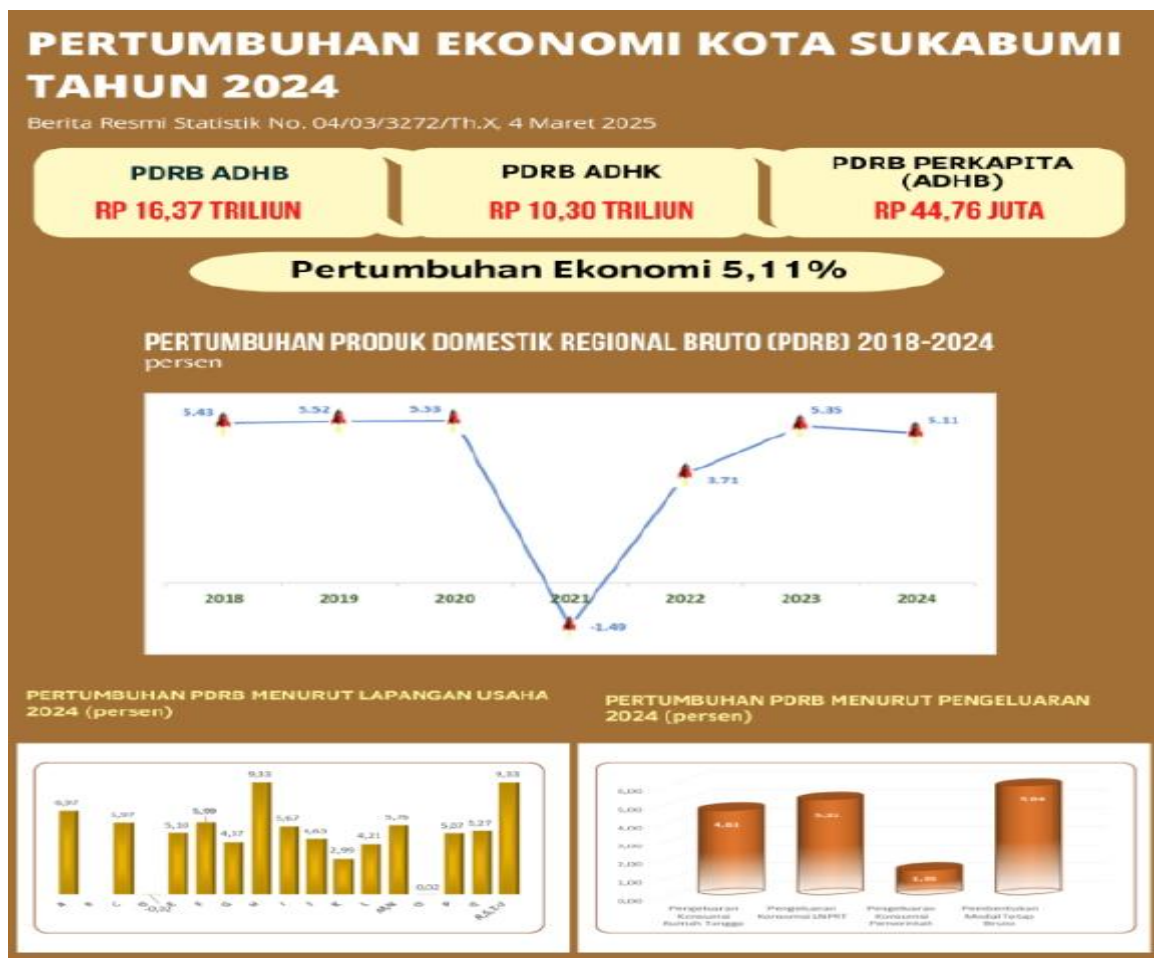
1. Dilakukan Perjanjian Kerjasama (MOU) DPMPSTSP dengan DISDUKCAPIL Kota Sukabumi untuk memperoleh data agregat berbasis NIK guna membantu optimalisasi pencapaian NIB;
2. Mengintensifkan pengawasan penanaman modal kepada pelaku usaha;
3. Memberikan Bimbingan Teknis Tata Cara Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Sementara Faktor penurunan Kontribusi perdagangan dan jasa terhadap PDRB pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

dikarenakan masih terbatasnya peluang investasi dengan analisis/kajian kelayakan proyek investasi yang siap ditawarkan karena belum adanya peta potensi investasi. Banyaknya pelaku usaha tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan alasan tidak tahu menahu karena menjadi alasan pusat dari pelaku usaha yang menyampaikan LKPM.



PDRB PER KAPITA	2022	2023 ⁽¹⁾	2024 ⁽²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)
Atas dasar harga berlaku (juta rupiah)	39,93	42,56	44,76
Atas dasar harga konstan 2010 (juta rupiah)	26,23	27,18	28,17
Persentase pertumbuhan PDRB per kapita (%)	3,79	3,60	3,65

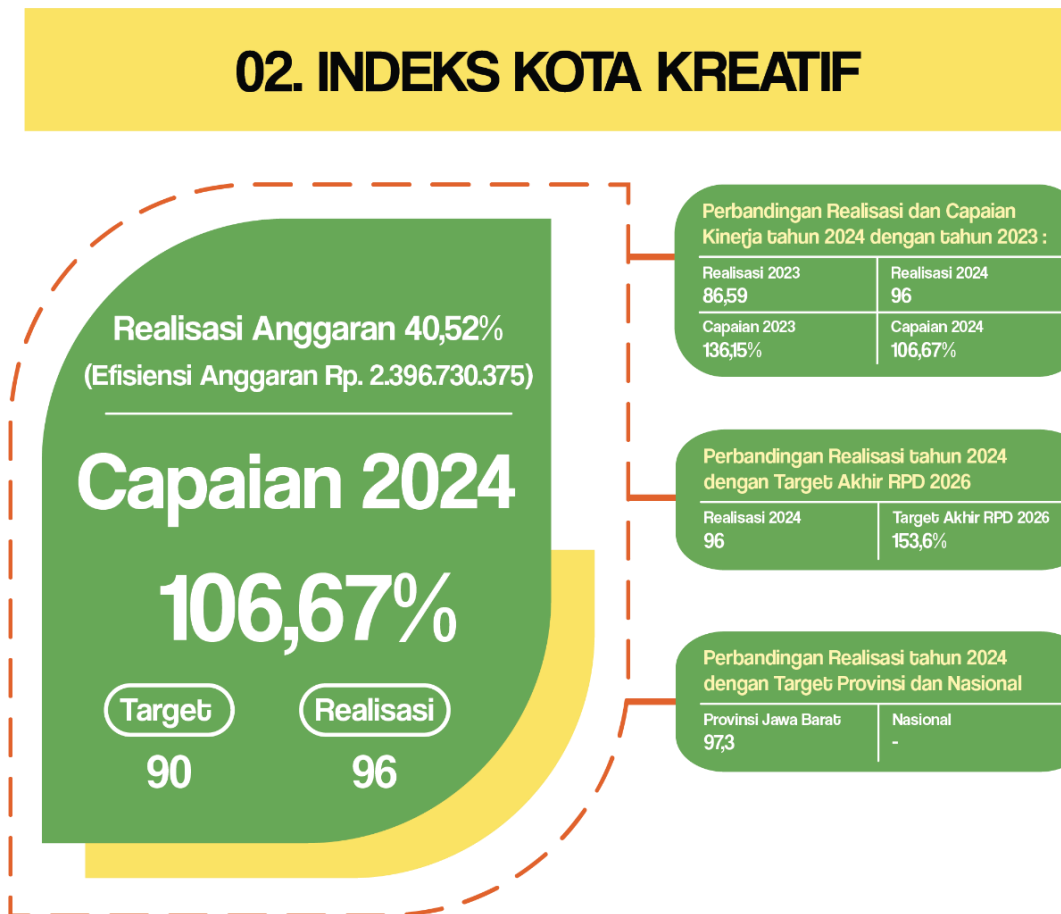
Gambar 3.2

Info Grafis Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2024

Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2025



3.2.5.2 Penjelasan Pencapaian IKU 2 : Indeks Kota Kreatif



Gambar 3.3
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 :
Indeks Kota Kreatif Kota Sukabumi Tahun 2024**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi, 2024

Sasaran terwujudnya masyarakat yang kreatif dan berbudaya diampu oleh pengampu utama (*leading sector*) yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi. Keberhasilan pencapaian sasaran terwujudnya masyarakat yang kreatif dan berbudaya dilihat dari pencapaian indikatornya yaitu Indeks Kota Kreatif.





Kota kreatif ditandai sebagai kota yang memiliki identitas kuat yang mengakar kepada keunikan karakter. Para pemangku kepentingan di kota tersebut memiliki pemahaman tentang apa yang menjadi kekuatan yang akan menjadikan kota mereka berbeda dibandingkan kota-kota lainnya. Namun secara umum kota kreatif ditandai dengan karakter yang

terbuka, memiliki jejaring yang luas, masyarakat yang cair dan dinamis, selalu terbuka dengan hal-hal yang baru serta mudah menyesuaikan diri dengan ide-ide kontemporer. Kota kreatif adalah salah satu strategi baru di mana orang-orang di dalam kota dapat berpikir, berencana, dan bertindak melalui cara-cara yang kreatif. Gelar kota kreatif yang telah diberikan kepada beberapa kota, salah satunya seperti Kota Sukabumi, telah menjadi bukti bahwa pemerintah telah memberikan perhatian kepada potensi kota yang bersangkutan.

Dilihat dari data diatas, Indeks Kota Kreatif Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah 96% dengan tingkat capaian sebesar 106,67 dari target yang telah ditetapkan yaitu 90. Penentuan target yang tinggi ini menunjukkan **optimisme dan usaha nyata** dari Kota Sukabumi untuk semakin mengukuhkan sebagai Kota Kreatif dan Inovatif. Dengan pencapaian indikator tersebut, Kota Sukabumi telah menjadi Kota Kreatif dengan memfokuskan pengembangan pada perluasan ide dan kreativitas terutama anak-anak muda untuk berkembang dalam dunia kreatif preneur yang ditampung dalam **Sukabumi Creative Center (SCH)** untuk membantu peningkatan pertumbuhan UMKM dan minat kaum muda kreatif di



dunia digital. Eksistensi kaum muda di SCH menunjukkan telah adanya ruang komunitas kreasi yang bersifat *Bottom Up* bagi terwujudnya kota kreatif. Selain itu pula menunjukkan adanya Rantai nilai kreasi-produksi-distribusi-konsumsi-konservasi dari setiap upaya-upaya kreatif yang dimunculkan. Sehingga dapat mewujudkan tujuan konsep pembangunan Kota Kreatif Indonesia adalah memberikan gambaran besar dan menetapkan koridor bagi pembangunan Kota Kreatif di Indonesia, sedangkan fungsinya menjadi rujukan bagi pembangunan Kota Kreatif di Indonesia yang dilakukan oleh lintas pelaku (pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas kreatif). Yang membedakan Kota Kreatif dari konsep kota lainnya seperti *liveable city*, *green city & resilient*, *smart* dan *competitive city* dan Kota Sukabumi telah mampu membuktikannya.

Sukabumi merupakan kota yang memiliki potensi dalam menjalankan industri kreatif. Berdasarkan hasil pemetaan Komite Ekonomi Kreatif (KEK) Kota Sukabumi pada 2024, jumlah pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di Kota Sukabumi berjumlah 623 (enam ratus dua puluh tiga) pelaku. Pelaku ekraf di Kota Sukabumi didominasi dari sub sektor Kriya berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) pelaku, Desain Komunikasi Visual terdapat 74 (tujuh puluh empat) pelaku dan kuliner yang terdapat 65 (enam puluh lima) pelaku ekraf. Data tersebut merupakan hasil pemetaan yang berasal dari *Form Online* dan *Website* Sukabumi Creative Fusion. Pengembangan Kota Kreatif di Kota Sukabumi dilakukan dengan kolaborasi *Penta Helix* yang terdiri dari akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah dan media. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing sektor dalam pengembangan Kota Kreatif adalah sebagai berikut :

1. Peran akademisi dalam kolaborasi pengembangan kota kreatif di Kota Sukabumi lebih diarahkan kepada pengembangan sumber daya manusia melalui riset dan

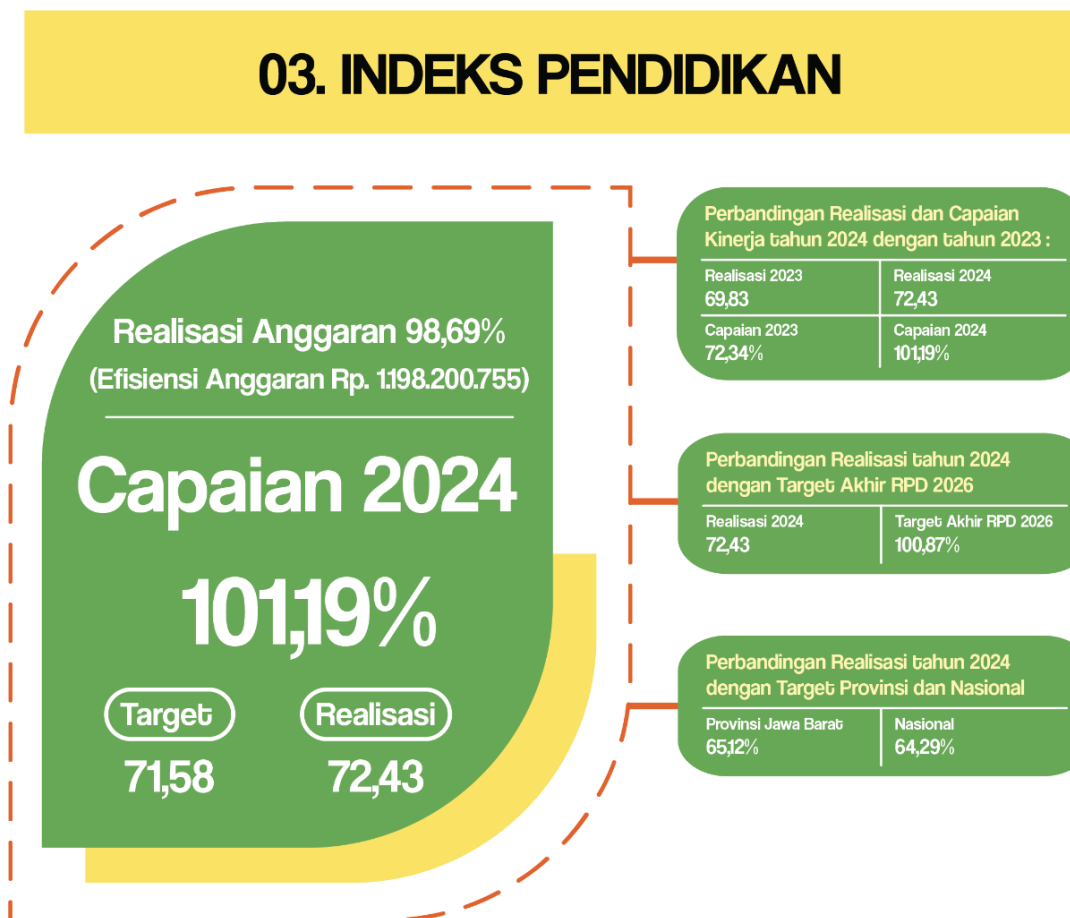


pengembangan ilmu pengetahuan. Akademisi bisa bekerja sama dengan mahasiswanya dalam melakukan penelitian atau pun dengan akademisi lain yang lintas sektor;

2. Pelaku usaha atau bisnis memiliki peranan pencipta produk dan jasa kreatif, pelaku bisnis ini juga berperan sebagai investor. Para pelaku bisnis kreatif menjalankan usaha kreatif yang turut menyumbang *income* bagi pendapatan daerah;
3. Komunitas kreatif seperti *Sukabumi Creative Center (SCH)* merupakan wadah jejaring pelaku kreatif lintas sub sektor juga menjadi tempat strategis bagi para pelaku kreatif. Komunitas juga dapat berfungsi sebagai alat memasarkan produk dan jasa kreatif melalui kegiatan atau event yang diadakan oleh komunitas. Melalui komunitas, peluang-peluang kolaborasi dapat terus diupayakan;
4. Pemerintah dalam kolaborasi pengembangan kota kreatif di Kota Sukabumi dan Bappeda Kota Sukabumi berperan sebagai koordinator dengan mengkoordinir dinas-dinas teknis terkait dalam pelaksanaannya maupun dalam pembuatan kebijakan (*regulator*) untuk menjamin keberlangsungan aktivitas kreatif di Kota Sukabumi; dan
5. Optimalisasi peran media dalam kolaborasi pengembangan kota kreatif di Kota Sukabumi. Hal tersebut terlihat karena media belum diposisikan sebagai *stakeholder* dalam kolaborasi proses penyusunan *roadmap*.



3.2.5.3 Penjelasan Pencapaian IKU 3 : Indeks Pendidikan



Gambar 3.4
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 :
Indeks Pendidikan Kota Sukabumi Tahun 2024**
Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi, 2024

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa atau negara, tanpa pendidikan di dalam sebuah bangsa maka dirasa bangsa tersebut akan tertinggal oleh bangsa lain. Pendidikan adalah upaya yang terorganisir, berencana dan berkelanjutan (terus menerus sepanjang hayat) dengan tujuan dan arah untuk membina manusia/anak didik menjadi individu yang lebih baik lagi dalam menjalankan kehidupannya dimana kehidupan seseorang meliputi kedewasaan dan berbudaya (*civilized*). Oleh karena itu, pendidikan menjadi hal yang penting dalam pembangunan suatu daerah dan menjadi salah



satu tolok ukur pembangunan manusia. Hasil dari pembangunan pendidikan tercermin dari Indeks Pendidikan. Untuk mengetahui hasil dari pembangunan pendidikan di Kota Sukabumi, dilakukan pengukuran Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks pendidikan terdiri dari Komponen indeks harapan lama sekolah dan indeks rata-rata lama sekolah

Dilihat dari Gambar 3.5 tersebut, realisasi Indeks Pendidikan Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah 72,43 dengan tingkat capaian sebesar 101,19% dari target yang telah ditetapkan yaitu 71,58 (enam puluh sembilan koma delapan tiga). Indeks pendidikan terdiri dari dua indikator perhitungan yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Selama kurun waktu **2020-2024, Indeks Pendidikan mengalami peningkatan**. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah dan peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah.

1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

RLS adalah rata-rata lamanya waktu yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan di suatu wilayah. indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa secara umum tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudah diselesaikan atau ditamatkan. Rata-rata Lama Sekolah Kota Sukabumi Tahun 2022-2024 terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, RLS Kota Sukabumi 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) atau **meningkat sebesar 0,01 point** lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat (8,87) dan Nasional (8,85). Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas jika di



rata-ratakan sudah sampai bangku kelas 1 SMA (**sudah melebihi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun**).

2. *Harapan Lama Sekolah (HLS)*

HLS adalah perkiraan lamanya sekolah (dalam tahun) yang akan dijalani oleh anak yang berumur 7 (tujuh) tahun. HLS dihitung berdasarkan penduduk usia 7 (tujuh) tahun ke atas agar konsisten dengan referensi umur pada program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah. Dengan perhitungan HPS ini ditujukan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem Pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya Pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak.

Harapan Lama Sekolah Kota Sukabumi tahun 2024 adalah **13,62** meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni 13,60 (tiga belas koma enam nol) tahun pada tahun 2023 atau **meningkat 0,02** (nol koma nol dua), lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat (12,80) dan Nasional (13,20). Angka ini menunjukkan bahwa lamanya waktu sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 (tujuh) tahun ke atas dimasa mendatang adalah selama 13,98 tahun atau setara Diploma I.

Keberhasilan Peningkatan Rata-rata Lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah dengan adanya dukungan anggaran program dan kegiatan pada pendidikan formal maupun non formal dimana salah satu solusi atau upayanya adalah Intervensi terhadap Program Pengelolaan Pendidikan melalui :

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar maupun pendidikan nonformal/kesetaraan;
2. Pemberian bantuan kepada siswa-siswi baik pada satuan Pendidikan formal maupun pendidikan non



formal/kesetaraan yang berasal dari keluarga yang tidak mampu; dan

3. Pemberdayaan satuan pendidikan nonformal berbasis kemasyarakatan untuk melayani penduduk di luar usia sekolah yang ingin menyelesaikan pendidikannya baik pada jenjang Paket A setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA.
4. Terwujudnya Akses dan Mutu Layanan Pendidikan yang Berkualitas, melalui :

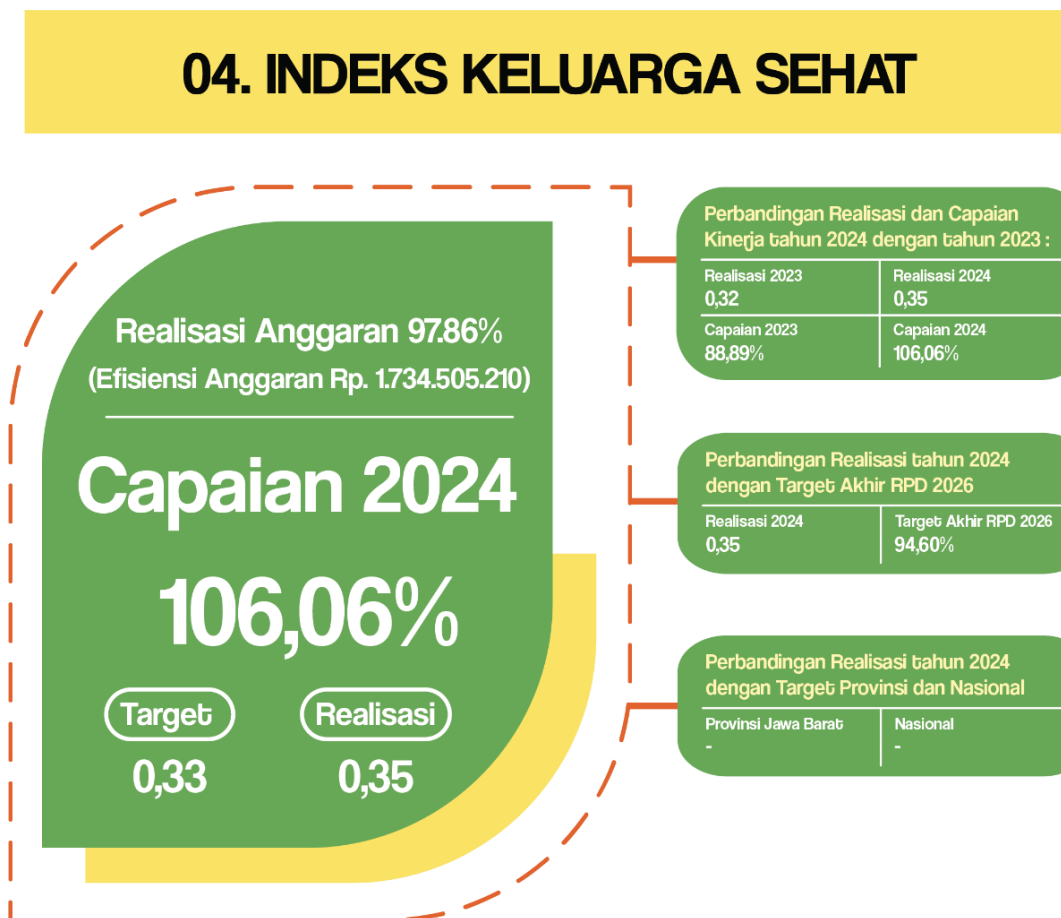


a. Melakukan Verval ATS US sebagai dasar untuk merumuskan intervensi yang tepat

- b. Melakukan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Pendidikan
- c. Melakukan perhitungan dan pemetaan kebutuhan guru sebagai dasar pengusulan pemenuhan sesuai kebutuhan
- d. Melakukan peningkatan kompetensi guru melalui program Guru Penggerak.



3.2.5.4 Penjelasan Pencapaian IKU 4 : Indeks Keluarga Sehat



Gambar 3.5
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 4 :
Indeks Keluarga Sehat Kota Sukabumi Tahun 2024**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi, 2024

Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diampu oleh beberapa perangkat daerah dengan pengampu utama (*leading sector*) yaitu Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dilihat dari pencapaian indikatornya yaitu Indeks Keluarga Sehat. Indeks Keluarga Sehat merupakan capaian salah satu fokus pembangunan di bidang kesehatan, terdapat 12 (dua belas) indikator yang harus diprioritaskan pelaksanaannya guna meningkatkan status kesehatan masyarakat menjadi keluarga sehat, yaitu sebagai berikut :

Keluarga mengikuti program keluarga berencana (KB) ;

1. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
2. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
3. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif;
4. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
5. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
6. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
7. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
8. Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
9. Keluarga sudah menjadi anggota jaminan kesehatan nasional (JKN);
10. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan
11. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

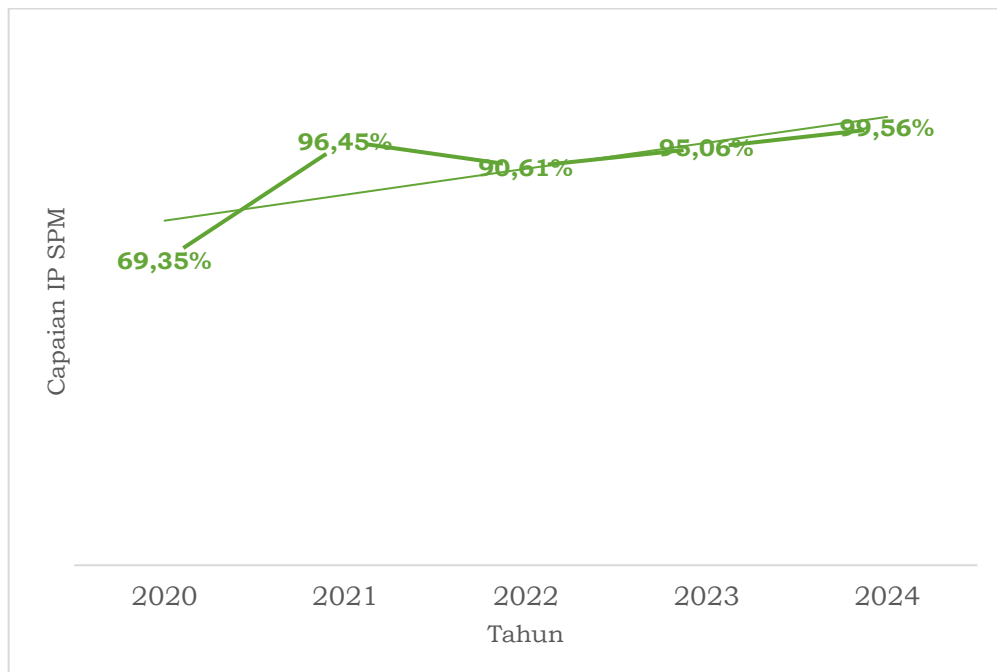
Berdasarkan analisis diatas capaian Indeks Keluarga Sehat Kota Sukabumi tahun 2024 adalah sebesar 0,35 dari target yang ditetapkan sebesar 0,33 atau dengan kata lain memiliki tingkat capaian 106,06%. Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat sebagai hasil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sukabumi sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat oleh perangkat daerah pengampu dalam hal ini Dinas Kesehatan.

Capaian tertinggi pada indikator keluarga sehat adalah kepemilikan akses sarana air bersih dan capaian terendah adalah perilaku anggota yang masih merokok di dalam rumah. Pencapaian Indeks Keluarga Sehat Kota Sukabumi tahun 2024 ini didukung



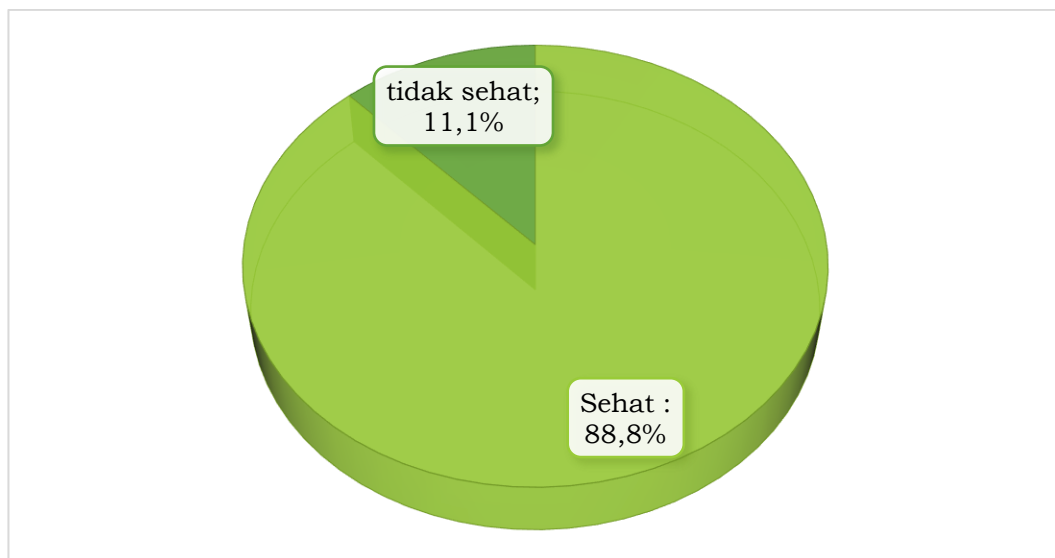
oleh banyak sektor antara lain diantaranya koordinasi lintas program dan kolaborasi semua unsur masyarakat yang berjalan dengan baik dan dikuatkan dengan peran Puskesmas Se-Kota Sukabumi agar tercipta komitmen yang berkesinambungan untuk mewujudkan keluarga sehat.

Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) kesehatan Kota Sukabumi pada tahun 2024 adalah sebesar 99,56 % terdapat kenaikan capaian dibandingkan dengan capaian IP SPM pada beberapa tahun kebelakang sebagaimana digambarkan pada grafik berikut :



**Grafik 3.1. Capaian IP SPM Kesehatan Kota Sukabumi
tahun 2020 - 2024**

Dapat disampaikan capaian indikator keluarga sehat dengan penilaian 12 indikator yang menggambarkan perilaku sehat, lingkungan yang sehat, dan peran pemerintah untuk mewujudkan masyarakat sehat untuk menggambarkan kondisi Kesehatan penduduk Kota Sukabumi Tahun 2024 ditampilkan dalam Gambar 3.4 di bawah ini :



Gambar 3.4
Sebaran Keluarga Sehat di Kota Sukabumi
Tahun 2023

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, 2024)

Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa penduduk Kota Sukabumi yang termasuk dalam kategori keluarga sehat sebesar 88,9% atau sebanyak 78.345 KK dengan rincian kategori Keluarga Sehat Paripurna 39% atau 30.144 KK, dan Keluarga Sehat 61% atau 48.134 KK. Adapun sebanyak 11,2 % atau 9.847 KK masuk kategori tidak sehat yang umumnya disebabkan adanya perilaku merokok di dalam rumah.



”Verifikasi Lomba Posyandu Tingkat Jawa Barat”

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

Secara umum status kesehatan keluarga dengan **kategori keluarga sehat** di Kota Sukabumi periode Tahun 2023-2024 mengalami **Kenaikan** dengan rincian sebagai berikut :



❖ Jumlah **keluarga tidak sehat berkurang 2.134 KK** atau sebesar 15,77%.

❖ Jumlah **keluarga sehat Bertambah 1.081 KK** atau sebesar 1,79%.

❖ Jumlah **keluarga sehat**

Paripurna mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 2.113 KK.

❖ Bertambahnya keluarga sehat paripurna dan berkurangnya keluarga tidak sehat dan sehat menjadi kunci keberhasilan perubahan IKS, karena dengan kondisi tersebut ada **trend positif** yang berhasil dicapai melalui optimalisasi pelayanan kesehatan terhadap 12 indikator keluarga sehat yang ada.

❖ Perubahan perilaku sehat pada keluarga menjadi kunci pencapaian IKS, selain mampu melakukan upaya kuratif dan rehabilitatif, keluarga yang sehat juga dituntut untuk mampu melakukan upaya promotif dan preventif bagi

❖ keluarganya dan masyarakat sekitar. Hal ini telah dicapai dan menunjukkan intensifnya **perubahan perilaku kesehatan** yang disosialisasikan oleh tenaga kesehatan saat kunjungan rumah maupun pelayanan di fasilitas kesehatan.

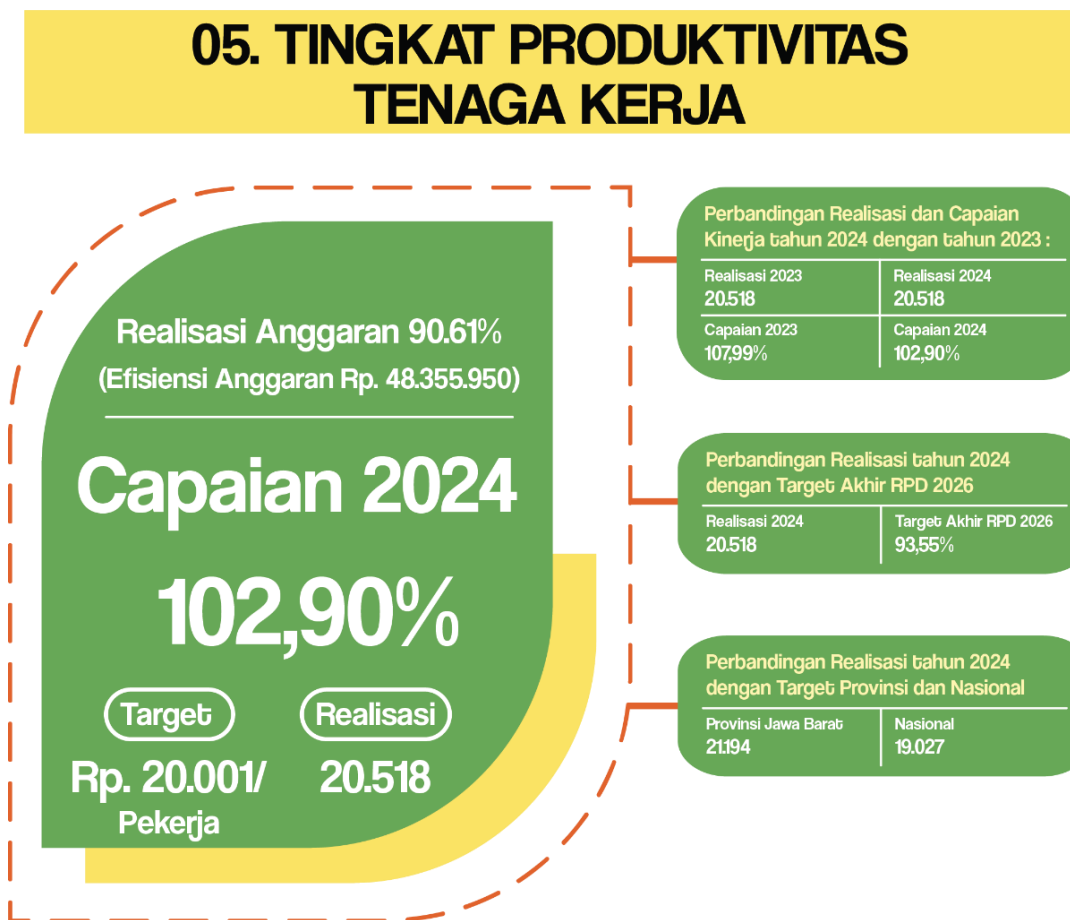


Tes Kebugaran Jasmani ASN
oleh DINKES Kota Sukabumi

“Inovasi Kesehatan”



**3.2.5.5 Penjelasan Pencapaian IKU 5 : Tingkat Produktivitas
Tenaga Kerja**



Gambar 3.6
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 5 :
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sukabumi
Tahun 2024**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi, 2024

Jumlah penduduk usia kerja di Jawa Barat pada Agustus 2024 berdasarkan penimbang hasil proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2020 diperkirakan sebanyak 38,67 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26,19 juta orang merupakan angkatan kerja. Dengan demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2024 sebesar 67,71 persen, mengalami peningkatan sebesar 1,22 persen poin dibandingkan keadaan Agustus 2023 (66,49 persen).

Penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 sebesar 24,42 juta orang, bertambah sekitar 0,91 juta orang (3,89 persen) jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2023 (23,50 juta orang). Sedangkan jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2024 mencapai 1,77 juta orang, berkurang sekitar 0,12 juta orang (6,36 persen) jika dibandingkan keadaan Agustus 2023 (1,89 juta orang). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat pada Agustus 2024 mencapai 6,75 persen, mengalami penurunan sebesar 0,69 persen poin dibandingkan TPT Agustus 2023 (7,44 persen). TPT Kota Sukabumi adalah **8,34%**, lebih rendah dari TPT tertinggi terjadi di Kota Cimahi sebesar 8,97 persen, sedangkan TPT terendah terjadi di Kabupaten Pangandaran sebesar 1,58 persen.

Perkembangan penduduk Kota Sukabumi usia 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja adalah 158.828 orang, lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2023 yakni sebanyak 156.762 orang atau **Naik 1,32%**. Sedangkan angka pengangguran pada tahun 2024 sebesar 14.547 orang, menurun dari tahun 2023 dengan angka 14.619 orang atau **Menurun 0,49%**. Dengan data tersebut maka dapat dilihat pula % angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja yakni sebesar **62,58% (109.124 orang) dari 174.375 orang** yang termasuk angkatan kerja di Kota Sukabumi. pencari kerja terbanyak di Kota Sukabumi pada tahun 2024 berdasarkan jenjang pendidikan adalah kelompok Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yakni di **25,93% & 22,18%**.

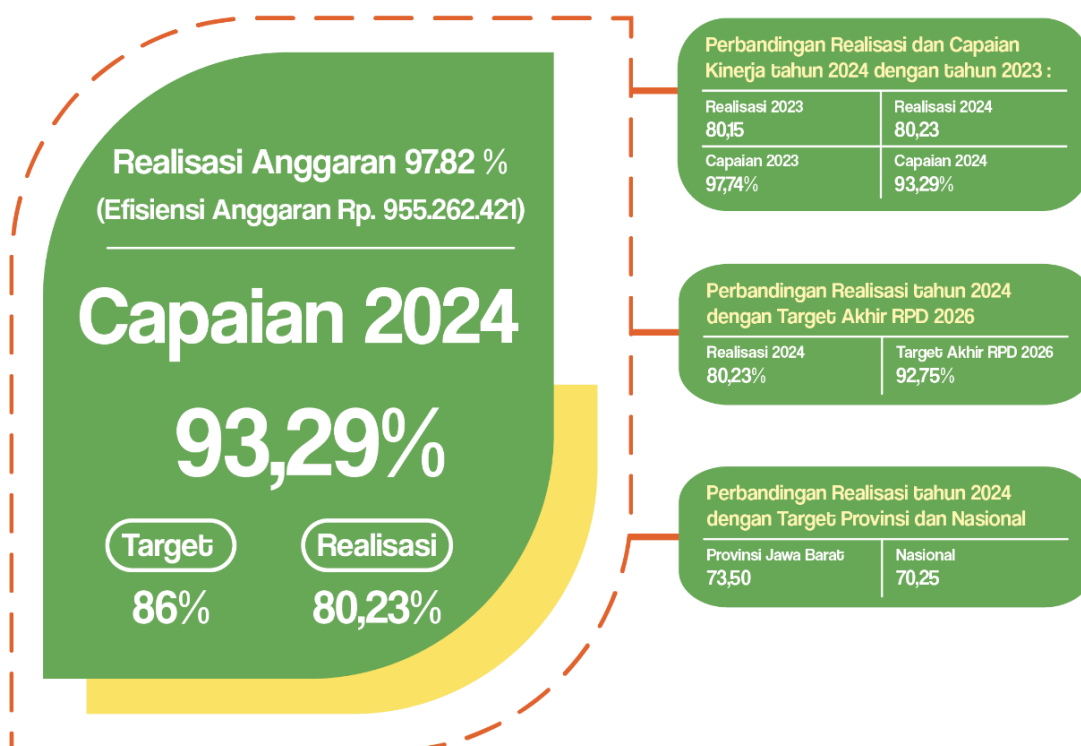
Berdasarkan data diatas, TPTK Kota Sukabumi yang sempat mencapai 32.218 rupiah per pekerja per jam di Tahun 2020, masih diperlukan upaya yang signifikan untuk mencapainya. Beberapa kendala yang ada diantaranya adalah jenis pekerjaan teknis yang sesuai dengan keahlian yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya Balai Latihan Kerja (BLK) yang memberikan pembekalan



dan penyaluran tenaga kerja secara langsung dan sesuai kebutuhan perusahaan.

3.2.5.6 Penjelasan Pencapaian IKU 6 : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

06. INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR



Gambar 3.7
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 6 :
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kota Sukabumi
Tahun 2024**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi, 2024

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan, ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. IKLI diharapkan menjadi suatu alat yang menghasilkan gambaran mengetahui perspektif masyarakat



secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat.

Penyusunan indeks kepuasan layanan infrastruktur sangat penting bagi Pemerintah Kota Sukabumi selaku penyedia layanan publik untuk mengetahui umpan balik berupa indeks kepuasan masyarakat atas penyediaan layanan infrastruktur. Indeks yang tinggi mencerminkan tingginya kualitas output dan outcome dari penyediaan layanan infrastruktur, begitu sebaliknya. Selain mengukur kepuasan masyarakat, indeks kepuasan layanan infrastruktur juga menginventarisasi keinginan serta harapan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih baik. Kinerja saat ini dan bagaimana kondisi yang diharapkan merupakan **feedback** yang dibutuhkan dalam rangka perbaikan kinerja untuk tahun berikutnya.

Faktor penentu keberhasilan pencapaian IKU 7 tentang IKLI ini adalah Kota Sukabumi telah mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung dalam Pembangunan IKLI. Unsur pertama menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi kuat sebagai (*regulator*) dan sebagai pemegang monopoli layanan. Unsur kedua, adalah orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan atau memerlukan layanan (penerima layanan) dan pada dasarnya tidak memiliki daya tawar atau tidak dalam posisi yang setara untuk menerima layanan. Untuk unsur kedua ini, Kota Sukabumi memiliki persepsi masyarakat yang baik tentang Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sementara unsur ketiga, adalah kepuasan pelanggan dalam menerima pelayanan. Unsur kepuasan pelanggan seharusnya menjadi perhatian penyelenggara pelayanan (Pemerintah). Pemerintah Kota Sukabumi telah menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi untuk memuaskan pelanggan,



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

dan dilakukan melalui upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan daerah dengan diraihnya penghargaan Tingkat Kepatuhan Tinggi **(Zona Hijau)** pada pelayanan publik dari Ombudsman Tahun 2024. Paradigma kebijakan publik di era otonomi daerah yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, memberikan arah terjadinya perubahan atau pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan, dari paradigma rule government bergeser menjadi paradigma **good governance** dengan menggunakan variable infrastruktur sebagai berikut :

No	Variabel		Unsur (Indikator) Kepuasan layanan Infrastruktur
	Jenis Infrastruktur	Infrastruktur yang difokuskan dalam penilaian	
A. Infrastruktur Dasar			1. Ketersediaan Fisik (<i>availability</i>) 2. Kualitas Fisik (<i>quality</i>) 3. Kesesuaian (<i>appropriateness</i>) 4. Pemanfaatan (<i>utility</i>) 5. Kontribusi terhadap perekonomian
1	Jalan dan Jembatan	1. Jalan Kota 2. Jalan Lingkungan 3. Jembatan	
2	Transportasi	1. Terminal 2. Stasiun 3. Angkutan umum bus 4. Kereta api 6. Transportasi angkutan para transit (seperti: ojek, becak, ojek online) 7. Perlengkapan Jalan (rambu, PJU, dan petunjuk jalan)	
3	Air bersih	1. Sumber air bersih 2. Layanan PDAM	
4	Persampahan	1. Tempat sampah 2. pengangkutan sampah	
5	Air Limbah	1. Septictank	
6	Jaringan Drainase	1. Jaringan Drainase	
7	Ruang publik	1. Kawasan Pedestrian (trottoar) 2. RTH/ Taman 3. Lapangan olahraga	
8	Komunikasi dan Informasi	1. Jaringan internet 2. Pelayanan Publik Berbasis Sistem	
9	Energi	1. Listrik 2. Stasiun pengisian bahan bakar	
B. Infrastruktur Sosial			
1	Pendidikan	Pendidikan	
2	Kesehatan	Kesehatan	
3	Perdagangan	1. Pasar	
4	Pariwisata	1. Fasilitas tempat wisata 2. Penginapan/hotel 3. Sarana penjualan oleh-oleh / souvenir	

No.	Kecamatan	Jumlah Responden	Presentase
1	Baros	76	15,90%
2	Cibeureum	57	11,92%
3	Cikole	105	21,97%
4	Citamiang	49	10,25%
5	Gunungpuyuh	34	7,11%
6	Lembursitu	79	16,53%
7	Warudoyong	78	16,32%
Jumlah		478	100,00%

Sumber : Hasil Survei, 2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

No	Variabel			Nilai Indeks	Mutu Pelayanan	Kinerja
	Jenis Infrastruktur	No	Infrastruktur yang difokuskan dalam penilaian			
A.	Infrastruktur Dasar					
		I	Jalan dan Jembatan	79,65	B	Baik
1		1	Jalan Kota	79,90	B	Baik
2		2	Jalan Lingkungan	79,40	B	Baik
3		3	Jembatan	79,64	B	Baik
		II	Transportasi	81,85	B	Baik
4		1	Terminal	80,73	B	Baik
5		2	Stasiun	83,16	B	Baik
6		3	Angkutan umum	81,50	B	Baik
7		4	Bus	81,60	B	Baik
8		5	Kereta api	82,91	B	Baik
9		6	Transportasi angkutan para transit	83,60	B	Baik
10		7	Perlengkapan Jalan (rambu,PJU)	79,46	B	Baik
		III	Air bersih	77,85	B	Baik
11		1	Sumber air bersih	79,88	B	Baik
12		2	Layanan PDAM	75,81	C	Kurang Baik
		IV	Persampahan	76,53	C	Kurang Baik
13		1	Tempat sampah	75,44	C	Kurang Baik
14		2	Pengangkutan sampah	77,62	B	Baik
		V	Air Limbah	76,37	C	Kurang Baik
15		1	Septictank	76,37	C	Kurang Baik
		VI	Jaringan Drainase	74,94	C	Kurang Baik
16		1	Jaringan Drainase	74,94	C	Kurang Baik
		VII	Ruang publik	79,99	B	Baik
17		1	Kawasan Pedestrian (trotoar)	79,99	B	Baik
18		2	RTH/ Taman	78,79	B	Baik
19		3	Lapangan olahraga	81,18	B	Baik
		VIII	Komunikasi dan Informasi	80,71	B	Baik
20		1	Jaringan internet	81,28	B	Baik
21		2	Pelayanan Publik Berbasis Sistem	80,14	B	Baik

No	Variabel			Nilai Indeks	Mutu Pelayanan	Kinerja
	Jenis Infrastruktur	No	Infrastruktur yang difokuskan dalam penilaian			
		IX	Energi	84,64	B	Baik
22		1	Listrik	85,46	B	Baik
23		2	Stasiun pengisian bahan bakar	83,83	B	Baik
B.	Infrastruktur Sosial					
		X	Pendidikan	84,05	B	Baik
24		1	Pendidikan	84,05	B	Baik
		XI	Kesehatan	83,93	B	Baik
25		1	Kesehatan	83,93	B	Baik
		XII	Perdagangan	82,48	B	Baik
26		1	Pasar	82,48	B	Baik
		XIII	Pariwisata	80,03	B	Baik
27		1	Fasilitas tempat wisata	78,90	B	Baik
28		2	Penginapan/hotel	82,24	B	Baik
29		3	Sarana penjualan oleh-oleh / souvenir	78,94	B	Baik
		IKLI KOTA SUKABUMI		80,23	B	Baik

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur di Kota Sukabumi termasuk dalam kondisi yang Baik. Hasil tabulasi data kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur yang ada di Kota Sukabumi menunjukkan bahwa skor kinerja atau



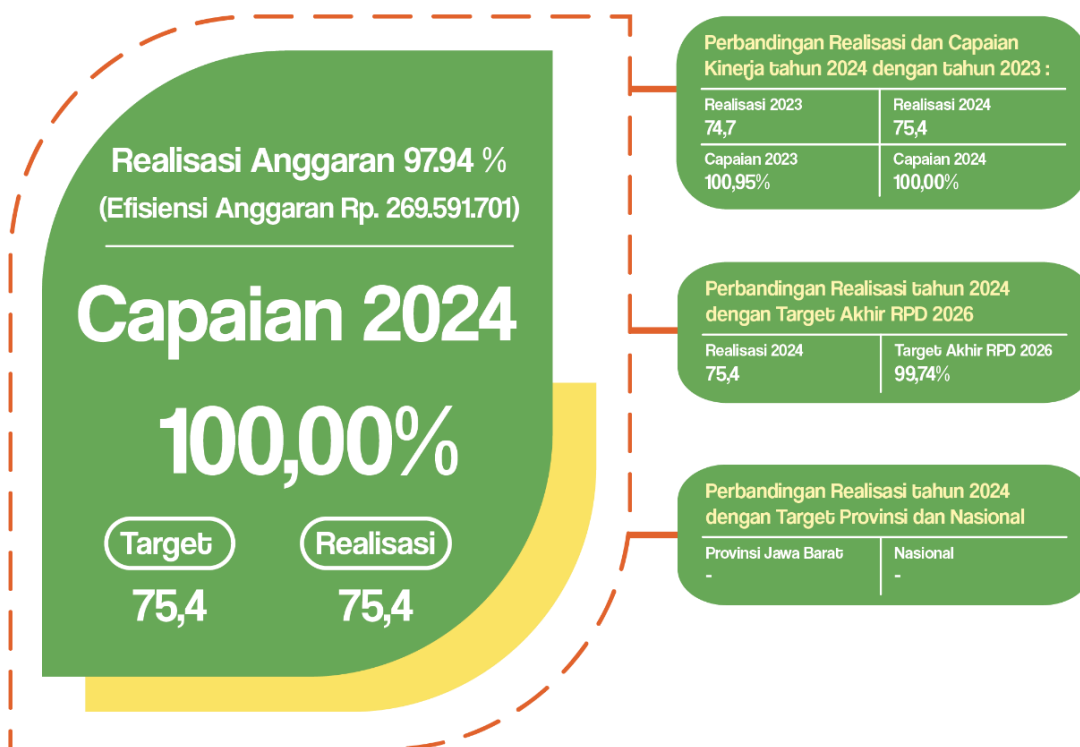
kepuasan masyarakat tertinggi terdapat pada aspek energi yaitu kelistrikan dengan nilai 85,46. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan listrik di Kota Sukabumi sudah baik. Sementara itu kinerja terendah yang masih dirasakan oleh masyarakat terdapat pada aspek drainase dengan nilai sebesar 74,94 termasuk dalam klafikasi C dan menunjukkan kinerja yang kurang baik.

Pemerintah daerah Kota Sukabumi perlu mengakselerasi peningkatan kualitas layanan infrastruktur pada infrastruktur yang memiliki kinerja C yang dibawah rata-rata nilai IKLI Kota Sukabumi yaitu : Layanan PDAM, Tempat sampah, Air limbah (*Septictank*), Jaringan drainase. Adapun infrastruktur yang menunjukkan skor yang tinggi karena berada di atas skor IKLI Kota Sukabumi ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pada setiap infrastruktur tersebut sudah tinggi. Akan tetapi, bukan berarti pemerintah kota juga turut puas dengan kondisi tersebut. Pemerintah Kota Sukabumi tetap perlu menetapkan kebijakan yang dapat mempertahankan kepuasan masyarakat kemudian secara perlahan meningkatkan kepuasan masyarakat Kota Sukabumi.



3.2.5.7 Penjelasan Pencapaian IKU 7 : Indeks Rasa Aman

07. INDEKS RASA AMAN



Gambar 3.8
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 :
Indeks Rasa Aman Kota Sukabumi Tahun 2024**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi, 2024

Indeks Rasa Aman adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas rasa aman dari gangguan baik dari dalam maupun dari luar, yang mencerminkan persepsi masyarakat terhadap keamanan di lingkungan mereka. Indeks Rasa Aman (IRA) merupakan indikator penting dalam menilai kualitas hidup dan kebijakan pembangunan daerah, karena mencerminkan persepsi masyarakat tentang keamanan dan ketenangan. Indikator ini berfungsi untuk membantu pemerintah dan pihak terkait untuk memahami tingkat kepuasan masyarakat terhadap keamanan dan mengambil langkah-langkah yang



diperlukan untuk meningkatkan rasa aman. Indeks ini diukur dengan menggunakan metode pengukuran melalui survei atau kuesioner yang ditujukan kepada masyarakat untuk mengetahui persepsi mereka tentang keamanan di lingkungan mereka. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Indeks Rasa Aman antara lain tingkat kejahatan, keberadaan aparat keamanan, partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, dan kualitas layanan publik.

Faktor pendukung keberhasilan yang paling besar adalah pada dimensi pemenuhan kesejahteraan sosial yang didalamnya termasuk mengenai kerukunan umat beragama dan kearifan social. Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Kota Sukabumi masih menjadi Kota Toleran di Tingkat Nasional. Berikut ini adalah rincian per dimensi IRA Tahun 2024 :

1. Keamanan dan Bencana : 66,29
2. Pemenuhan Kesejahteraan Sosial : 54,08
3. Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan : 86,37
4. Keamanan dari Kekerasan : 94,86

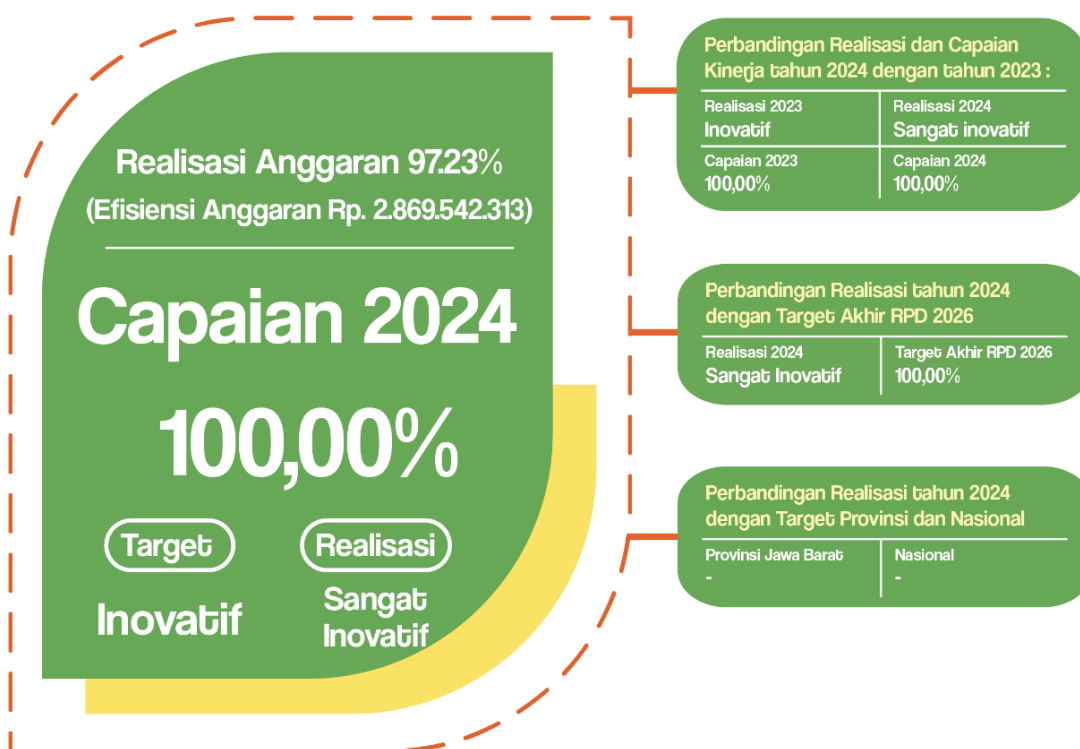
Analisis lebih jauh mengenai IRA per dimensi adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|--|
| ✓ Variable Kesiapsiagaan bencana perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut karena nilainya masih kecil yakni 46,50%. | ✓ Variabel kebebasan politik dan pemikiran sebesar 58,56%. Dan |
| ✓ Variabel pemenuhan terhadap kebutuhan social dan pengembangan diri berada pada skor 20,38%. | ✓ Variabel keamanan dan kekerasan komunal seperti kejadian perkelahian massa/tawuran dilingkungan selama sekitar satu tahun terakhir berada pada angka 86,75%. |



3.2.5.8 Penjelasan Pencapaian IKU 8 : Indeks Inovasi Daerah

08. INDEKS INOVASI DAERAH



Gambar 3.9
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 8 :
Indeks Inovasi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi, 2024

Indeks Inovasi Daerah yang merupakan Indikator Kinerja pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi 2024-2026 yang dipenuhi melalui pelaporan *Innovative Government Award (IGA)* Tahun 2024. Merujuk pada surat Perintah Tugas Wali Kota Sukabumi tentang Pelaporan Inovasi dengan melakukan pengisian/input data indikator Indeks Inovasi Daerah ke dalam sistem Kemendagri <https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id>.

Bidang Litbang Bappeda Kota Sukabumi sebagai fasilitator dan admin inovasi dalam pelaporan inovasi Kota Sukabumi Ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan optimalisasi pelaporan inovasi melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

I. Persiapan

1. Persiapan pelaporan *Innovative Government Award (IGA)* tahun 2024, yaitu :

- a. Melakukan Pendataan Inovasi lingkup Perangkat Daerah, Instansi, BUMD dan Sekolah di lingkungan Pemerintahan Kota Sukabumi, dengan dasar surat Nomor : PP.03.04/22/Litbang/Bappeda, penyampaian data inovasi melalui <https://bit.ly/pendataaninovasi>, sebagai langkah awal pengajuan Surat Keputusan Walikota tentang Daftar Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;
- b. Melakukan pendataan PIC Inovasi Perangkat Daerah dan Instansi, dengan dasar surat Nomor : PP.03.04/22/Litbang/Bappeda, dimana Langkah tersebut untuk pengajuan Surat Keputusan Wali Kota Sukabumi tentang Pembentukan Pamong Inovasi Daerah Tahun 2024;
- c. Melaksanakan roadshow sosialisasi inovasi dan verifikasi indikator inovasi lingkup Puskesmas, Labkesda dan RSUD di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi, dengan dasar surat Nomor : PP.03.04/191/Litbang/Bappeda, perihal Roadshow Sosialisasi Inovasi dan Verifikasi Pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2024, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari sampai dengan 20 Februari 2024, meliputi :
 - 1) Puskesmas Pabuaran Kota Sukabumi;
 - 2) Puskesmas Benteng Kota Sukabumi;
 - 3) Puskesmas Sukakarya Kota Sukabumi;



- 4) Puskesmas Gedongpanjang Kota Sukabumi;
- 5) Puskesmas Nanggaleng Kota Sukabumi;
- 6) Puskesmas Tipar Kota Sukabumi;
- 7) Puskesmas Baros Kota Sukabumi;
- 8) Puskesmas Limusnunggal Kota Sukabumi;
- 9) Puskesmas Cikundul Kota Sukabumi;
- 10) Puskesmas Lembursitu Kota Sukabumi;
- 11) Puskesmas Sukabumi Kota Sukabumi;
- 12) Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi;
- 13) Puskesmas Cipelang Kota Sukabumi;
- 14) Puskesmas Karang Tengah Kota Sukabumi;
- 15) Puskesmas Cibeureum Hilir Kota Sukabumi;
- 16) UPTD Labkesda Kota Sukabumi;
- 17) RSUD Al Mulk Kota Sukabumi;
- 18) RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi;

2. Melaksanakan roadshow sosialisasi inovasi dan verifikasi indikator inovasi lingkup Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari sampai dengan 20 Februari 2024, dengan dasar surat Nomor : PP.03.04/190/Litbang/Bappeda, meliputi :

- 1) Kecamatan Baros beserta Kelurahan Sudajaya Hilir, Kelurahan Baros, Kelurahan Jaya Mekar, Kelurahan Jaya Raksa;
- 2) Kecamatan Citamiang beserta Kelurahan Cikondang, Kelurahan Gedongpanjang, Kelurahan Citamiang, Kelurahan Tipar, Kelurahan Nanggaleng;
- 3) Kecamatan Lembursitu beserta Kelurahan Situmekar, Kelurahan Cipanengah, Kelurahan Sindangsari, Kelurahan Lembursitu, Kelurahan Cikundul;



- 4) Kecamatan Gunung Puyuh beserta Kelurahan Sriwidari, Kelurahan Karamat, Kelurahan Gunung Puyuh, Kelurahan Karang Tengah;
 - 5) Kecamatan Cikole beserta Kelurahan Kebonjati, Kelurahan Subangjaya, Kelurahan Cikole, Kelurahan Selabatu, Kelurahan Cisarua, Kelurahan Gunung Parang;
 - 6) Kecamatan Warudoyong beserta Kelurahan Dayeuh Luhur, Kelurahan Nyomplong, Kelurahan Warudoyong, Kelurahan Sukakarya, Kelurahan Benteng;
 - 7) Kecamatan Cibeureum beserta Kelurahan Sindang Palay, Kelurahan Limusnunggal, Kelurahan Cibeureum Hilir, Kelurahan Babakan.
3. Pada tanggal 3 Juli 2024 Bidang Litbang Bappeda Kota Sukabumi membuat **Surat Perintah Tugas Wali Kota Sukabumi**, Nomor : KP.06.01/1169/IV/I/BAPP/2024 tentang Pelaporan Inovasi dengan melakukan pengisian/input data indikator Indeks Inovasi Daerah ke dalam sistem Kemendagri RI melalui laman web : <https://indeks.inovasi.bsikdn.kemendagri.go.id>

II. Pengisian

Tahap awal dilakukan dengan memvalidasi data IGA yang terdiri dari 36 indikator. Dalam rangka memberikan pemahaman teknis tatacara pengisian indikator data dukung inovasi Innovative Government Award (IGA), Bidang Litbang Bappeda Kota Sukabumi melakukan Bimbingan Teknis bagi Perangkat Daerah, Puskesmas, RSUD, BUMD dan Sekolah. Pelaksanaan Bimbingan Teknis penginputan Indeks Inovasi Daerah, Innovation Government Award (IGA) Tahun 2024, pada hari senin tanggal 8 Juli 2024, bertempat di Hotel Horison Kota Sukabumi, dengan narasumber ibu



Ahdaniyah Siregar S.Sat dari BSKDN Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri);

III. *Reward dan Punishment*

1. Berdasarkan Pasal 388 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ditegaskan bahwa Kepala Daerah melaporkan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian inovasi daerah berdasarkan laporan dari kepala daerah. Terhadap hasil penilaian inovasi daerah tersebut, diberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah.
2. Menteri Dalam Negeri memberikan penghargaan IGA kepada Pemenang dan mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) Bidang Inovasi Daerah
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa apabila Pemerintah Daerah tidak melaporkan hasil Inovasi Daerah akan dikenakan **sanksi Administratif/Teguran**.
4. Akan dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Inovasi Daerah Kota Sukabumi bulan November-Desember tahun 2024, dimana diberikan penghargaan untuk 10 Perangkat Daerah/Instansi Terbaik dan 2 penghargaan untuk 2 inovator terbaik. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memotivasi semua Perangkat Daerah/instansi dalam pemenuhan indikator data dukung inovasi dalam Pelaporan Inovasi nya ke Kemendagri dan juga sebagai wujud loyalitas dan dukungan kepada Kepala Daerah dalam mencapai Target Indeks Inovasi Daerah (IID) yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Kepala Daerah Kota Sukabumi.



IV. Tahapan *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pengisian Data Indeks Inovasi Daerah tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Pengukuran Indeks (analisis) dibulan Agustus sampai dengan Oktober 2024;
3. Penetapan Indeks Inovasi Daerah di bulan Oktober 2024;
4. Tahapan Presentasi Kepala Daerah pada bulan Oktober 2024;
5. Tahapan Validasi Lapangan yang akan dilakukan oleh Kemendagri di bulan Oktober sampai dengan bulan November 2024;
6. Sidang Tim Penilai pada bulan November 2024;
7. Penghargaan *Innovative Government Award* Tahun 2024 akan dilaksanakan di bulan Desember Tahun 2024.

V. Rekapitulasi

Jumlah Inovasi Perangkat Daerah, Instansi, BUMD dan Sekolah di Kota Sukabumi yang dilaporkan sejumlah 305 inovasi. Inovasi dengan point kematangan di atas 70 dan melalui proses kirim ke Kemendagri sebanyak 238 inovasi, sedangkan inovasi yang tidak terkirim sejumlah 67 inovasi dikarenakan point kematangan nya rendah dibawah 70.



3.2.5.9 Implementasi Rencana Aksi LHE SAKIP Tahun 2023 Tingkat Kota Sukabumi

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Kota Sukabumi Tahun 2023, Inspektorat telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, dan telah memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam mewujudkan budaya kinerja tinggi di tingkat Perangkat Daerah pada akhir Desember 2024. Evaluasi program dan kegiatan yang dilakukan juga telah dapat mengidentifikasi potensi adanya penggunaan anggaran yang kurang efektif dan efisien. Seluruh perangkat daerah telah menyusun matriks tindak lanjut LHE APIP Internal Tahun 2023 yang diimplementasikan pada tahun 2024.

Sementara untuk tingkat Kota Sukabumi, dari pelaksanaan evaluasi SAKIP Kota Sukabumi Tahun 2023, terdapat beberapa rekomendasi yang disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, yaitu :

1. Melakukan **penyempurnaan dokumen perencanaan** level Kota, dan memastikan hasil penyempurnaan tersebut tertuang dengan baik dalam penetapan RPJMD tahun berikutnya agar tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya berorientasi pada hasil

Tindak Lanjut :

Tim SAKIP Kota Sukabumi telah melaksanakan proses pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dengan memperhatikan *Logical Framework* dari RPD Kota Sukabumi dan memastikan tujuan/sasaran di RPJMD/Renstra Perangkat Daerah berorientasi hasil.

2. **Menjabarkan kinerja** mulai dari level Wali Kota sampai level individu sehingga tercipta keselarasan dan mendorong tercapainya kinerja organisasi dengan memastikan kesesuaian antara sasaran, indikator maupun target yang ditetapkan;



Tindak Lanjut :

- 1) Mensosialisasikan *Levelling* Kinerja berjenjang dari IKU Wali Kota sampai dengan IKU Kepala Perangkat Daerah sebagai bahan input ke aplikasi SIPEKA;
 - 2) Memastikan *Levelling* Kinerja juga dilakukan pada masing-masing perangkat daerah dan diinput dalam SIPEKA;
 - 3) Memonitor proses, kendala dan evaluasi SIPEKA.
3. Melakukan **perbaikan dokumen perencanaan** pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil;

Tindak Lanjut :

Terlaksananya *Desk* Kinerja dengan Bappeda dan perangkat daerah dalam penginputan aplikasi SIPEKA, sehingga *levelling kinerjanya* sudah semakin SMART. Serta melakukan perbaikan dalam *Cascading & Proses Bisnis* yang tertuang dalam RPD dan Renstra PD.

4. **Melakukan reviu** terhadap program dan kegiatan agar seluruhnya mendukung tercapainya sasaran strategis dan prioritas pembangunan daerah

Tindak Lanjut :

Telah dilaksanakan penyamaan persepsi dan penguatan tim verifikasi dokumen perencanaan dan melaksanakan proses reviu internal di masing-masing perangkat daerah;

5. **Melengkapi manual IKU** baik di tingkat Pemkot maupun PD dengan definisi operasional, formulasi serta sumber data pada masing-masing indikatornya;

Tindak Lanjut :

- 1) Melakukan penguatan pemanfaatan Satu Data Indonesia (SDI) yang meliputi metadata kinerja dengan wali data dan penyedia data dari masing-masing Perangkat Daerah;
- 2) Menyusun Kebijakan Penerapan aplikasi SIPEKA yang di dalamnya memfasiliasi meta data (penjabaran kinerja);



- 3) Melakukan Penguatan tim SDI terhadap perangkat daerah dan wali data tingkat Kota Sukabumi;
6. ***Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja*** sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pada ASN;
- Tindak Lanjut :*
- Telah dilakukan pelaksanaan rencana aksi manajemen talenta di BKPSDM yang mendukung implementasi Sistem Merit Kota Sukabumi.
7. ***Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja*** dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan kinerja;
- Tindak Lanjut :*
- Telah dilakukan pendampingan dari tim provinsi pada Bimtek SAKIP Kota Sukabumi, menyamakan format LKIP pada seluruh Perangkat daerah, melakukan verifikasi dan validasi LKIP Kota Sukabumi dan Perangkat daerah serta mengadakan pendampingan penyusunan LKIP Perangkat Daerah.
8. Memanfaatkan informasi dalam Laporan Kinerja baik level Pemkot maupun PD sebagai ***dasar pertimbangan*** dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas dalam dokumen perencanaan tahun berikutnya;
- Tindak Lanjut :*
- Telah dilakukan pembahasan dengan Tim SAKIP Kota Sukabumi dan mulai memperbaiki dokumen perencanaan pembangunan berdasarkan evaluasi LKIP.
9. Melakukan ***monitoring atas tindak lanjut rekomendasi*** hasil evaluasi AKIP unit kerja dilakukan secara berkala, sehingga mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Pemda dan PD.



Tindak Lanjut : Melaksanakan monitoring atas tindak lanjut secara berkala atas rekomendasi hasil Evaluasi AKIP perangkat daerah.

10. ***Meningkatkan kapasitas evaluator*** dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sehingga mampu memberikan rekomendasi yang dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD;

Tindak Lanjut : Mengikuti bimtek atau *coaching* yang diselenggarakan secara daring pada media yang tersedia/pelatihan di kantor sendiri/bimbingan teknis evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, sehingga diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja Perangkat daerah.

11. Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal sebagai bagian dari penilaian ***reward and punishment*** kepada PD, sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP.

Tindak Lanjut :

1. Mengevaluasi regulasi atas penilaian ***reward and punishment (peDe HaDe)*** bagi Perangkat Daerah yang memiliki kinerja terbaik berdasarkan pada kategori Kinerja, Realisasi Anggaran, Nilai SAKIP dan Nilai RB oleh bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi.
2. Berkoordinasi dengan tim TAPD untuk dukungan anggaran implemtasi penilaian *reward and punishment* atas hasil evaluasi AKIP PD.
3. Menyusun kebijakan Pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal sebagai bagian dari penilaian *reward and punishment* kepada PD, sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP

Sedangkan untuk menanggapi rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024, Pemerintah Kota Sukabumi telah membuat Rencana



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

Aksi Tindaklanjuti LHE SAKIP Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Matriks rencana tindaklanjuti tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari LkjiP Tahun 2024 ini dan menjadi Lampiran.



Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan LKIP untuk perbaikan dan perencanaan kinerja selanjutnya, maka analisis pencapaian IKU diatas disajikan analisis keberhasilan dan kegagalan dengan metode SWOT. Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam menganalisis dan mengevaluasi keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta menghasilkan solusi yang telah dilakukan yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Daerah. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor



eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*) dan ancaman (*threat*). Dengan demikian Daerah harus bisa memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Analisa ini secara logis dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan berkaitan dengan visi dan misi perusahaan serta tujuan organisasi. Sehingga analisis SWOT dapat digunakan sebagai alat efektif untuk menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi organisasi, sebagai proses pengambilan keputusan untuk menentukan strategi. Pada dasarnya alternatif strategi yang diambil harus di arahkan pada usaha- usaha untuk menggunakan kekuatan dan memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang- peluang serta mengatasi ancaman. Sehingga dari matriks SWOT tersebut akan memperoleh empat kelompok alternatif strategi yang disebut strategi SO, strategi ST, strategi WO, dan strategi WT. Berikut ini kami sajikan analisis SWOT untuk menentukan strategi yang dipilih :



Tabel 3.5
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2024 serta Solusi yang Telah dilakukan

INTERNAL	
STRENGTH (KEKUATAN)	WEAKNESSES (KELEMAHAN)
1. Komitmen Kepala Daerah bersama kepala perangkat daerah yang tinggi dibuktikan dengan adanya dukungan kebijakan dan administrasi publik yang baik; 2. Terbangunnya komunikasi yang efektif sehingga memudahkan proses kolaborasi & koordinasi; 3. Terdapatnya sistem teknologi informasi yang mendukung pencapaian kinerja yang mempermudah proses pengendalian dan monev kinerja;	1. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM (terutama JF teknis) dalam menjalankan tugas & fungsi; 2. Kota Sukabumi termasuk kedalam kota dengan kategori fiskal yang lemah, sehingga pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan belum optimal; 3. Belum meratanya pemahaman budaya kerja yang baik di aparaturnya pemerintahan;
EKSTERNAL	
OPPORTUNITIES (PELUANG)	TREATH (TANTANGAN)
1. Adanya pola kemitraan <i>Pentahelix</i> yang tinggi dalam proses Pembangunan di Kota Sukabumi; 2. Kota Sukabumi yang strategis sebagai <i>Hub</i> & menjadi kota jasa sektor Pendidikan, Kesehatan dan perdagangan bagi daerah sekitar; 3. Persepsi publik yang baik terhadap pemerintahan;	1. Adanya kebijakan yang berdampak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah; 2. Adanya tuntutan dari Masyarakat terhadap pelayanan publik dan kinerja pemerintahan yang lebih baik; 3. Dinamisasi ekologi administrasi yang tinggi sehingga berdampak terhadap kualitas kegiatan yang diberikan;



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024**

DSA	STRENGTH (KEKUATAN)	WEAKNESSES (KELEMAHAN)
OPPORTUNITIES (PELUANG)	<u>SO : Use/Build S to take Advantege O</u> 1. Mengoptimalkan kebijakan kepala daerah dalam rangka meningkatkan kemitraan dengan unsur <i>pentahelix</i>; 2. Memanfaatkan sistem teknologi informasi dalam mempromosikan Kota Sukabumi sebagai pusat jasa untuk meningkatkan persepsi publik terhadap pemerintahan;	<u>WO : Take Advantege of O by Overcoming W</u> 1. Meningkatkan Kerjasama dengan lintas sektor dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM; 2. Meningkatkan PADS Kota Sukabumi melalui optimalisasi sektor jasa; 3. Mensosialisasikan Budaya Kerja BerAKHLAK kepada seluruh aparat & Masyarakat;
TREATH (TANTANGAN)	<u>ST : Use S to take Avoid/Block T</u> 1. Mengajukan usulan CASN berdasarkan analisis kebutuhan pegawai dan kelembagaan; 2. Mengoptimalkan fungsi perencanaan, penganggaran dan pengendalian;	<u>WT : Minimize W to Avoid/Block T</u> 1. Meningkatkan fungsi kolaboratif dengan pemerintah provinsi dan pusat; 2. Mengajak masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam perbaikan pelayanan publik;
STRATEGIC ACTION /POLICY	1. <i>Meningkatkan tata Kelola reformasi birokrasi yang berdampak di setiap sektor pemerintahan;</i> 2. <i>Memanfaatkan sistem teknologi informasi dalam perbaikan perencanaan, penganggaran, pengendalian pada setiap sektor pemerintahan;</i>	1. <i>Mengoptimalkan adaptabilitas pemerintah daerah terhadap peluang Kerjasama dan kemitraan dengan sektor pentahelix;</i> 2. <i>Meningkatkan PADS Kota Sukabumi melalui optimalisasi sektor jasa dengan mengajak masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam perbaikan pelayanan publik;</i>

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, 2024



3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Kinerja Tahun 2024

3.2.6.1 IKU 1 : Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB

Pada tahun 2024, pencapaian jumlah IKM yang dibina dari target 3,55% dapat terealisasi pada Tahun 2024 sebesar 2,66% (74 Unit Usaha), dengan Jumlah Industri Tahun 2024 sebesar 2.854 Unit Usaha. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan produktivitas, nilai tambah dan kualitas produk yaitu dengan adanya dukungan pembiayaan yang relatif mudah diakses dan penetrasi pasar yang baik mendorong produktivitas IKM.



Pada Tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi memfasilitasi 10 UMKM melalui berbagai produk UMKM yang akan di Pamerkan dalam beberapa acara Pameran di *Ciwalk* Bandung, *UKMK Corners* setiap *weekend* di pusat-pusat Kota serta fasilitasi kegiatan UMKM di Bandara/Stasiun/Terminal.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024



Pada Bidang Perdagangan kegiatan untuk perbaikan Pasar Degung yang di beberapa tempat yang mengalami kerusakan, untuk Kegiatan pelaksanaan Pelayanan Diskumindag juga melaksanakan beberapa Pelayanan terdiri dari Fasilitasi pembuatan SKA (Surat Keterangan Asal), Pengawasan Barang Pokok Penting dan Strategis di beberapa Pasar di Kota Sukabumi, Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP dan Perlengkapannya, Pengawasan UTTP, BDKT dan Satuan Ukur dan semua pelaksanaan Kegiatan tersebut telah terealisasi di Tahun 2024. Sehingga Capaian Kinerja sebesar 100%.

Pertumbuhan Usaha Mikro di targetkan pada Tahun 2024 sebesar 0,09% dengan Realisasi sebesar 0,69% dengan capaian kinerja sebesar 766,67%, indikator ini terealisasi dari Jumlah Kegiatan Pelatihan Wirausaha Baru yang ditargetkan 150 Peserta di APBD murni dan di Perubahan Anggaran Menjadi 220 Peserta dan terealisasi seluruhnya sebanyak 220 Peserta, kegiatan tersebut meliputi Pelatihan Vokasi Pengolahan Pangan Angkatan I - IV.

Selain itu kontribusi langsung yang mengakibatkan keberhasilan pencapaian IKU 1 adalah peran serta dari Koeprasi. Pada Tahun 2024, meningkatnya Koperasi Sehat dan Cukup Sehat dari target 19,83% dapat terealisasi sebesar 14,78% (244 Unit),



penambahan Koperasi Aktif Tahun 2024 sebanyak 9 Koperasi (3,69%) dari jumlah seluruhnya sebanyak 372 Koperasi. Wujud nyata kontribusi perdagangan terhadap PDRB melalui Koperasi dapat dilihat dari Gambar dibawah ini :



Grafik 3.2.

Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2024

Sumber : Diskumindag Kota Sukabumi, 2024

Pada Triwulan I jumlah investasi yang masuk sebesar Rp. 360.841.867.520, pada Triwulan II jumlah investasi yang masuk sebesar Rp. 209.241.179.626, pada Triwulan III jumlah pengaduan yang masuk sebesar Rp. 389.823.528.236, pada Triwulan IV jumlah investasi yang masuk sebesar Rp. 290.219.463.303, jadi jumlah keseluruhan investasi pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.250.131.038.685. Pada tahun 2024 investor berjumlah 24.109, tahun 2023 investor sebanyak 8.483. kenaikan investasi dan jumlah pengusaha merupakan pencetus utama program/kegiatan yang mendukung IKU 1.

Untuk pertumbuhan nilai investasi didukung oleh program pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang meliputi



berbagai macam kegiatan antara lain pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis, pendampingan pelaporan LKPM, fasilitasi penyelesaian masalah penanam modal, pemantauan dan pengawasan penanaman modal dimana semua kegiatan tersebut dapat mendorong para pelaku usaha untuk dapat mencatatkan realisasi investasinya. Program promosi penanaman modal juga mendorong pencapaian indikator kinerja peningkatan jumlah investasi

Pelaksanaan pelayanan perizinan yang diukur dengan indikator Nilai Investasi didukung oleh program pelayanan penanaman modal yang meliputi kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan, pemantauan pemenuhan komitmen maupun penanganan pengaduan yang seluruh kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan proses perizinannya.

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal juga mendukung indikator Nilai Investasi melalui inovasi Si Jimat Boss. Pelaksanaan pelayanan perizinan dapat dilakukan pengolahan data perizinan, publikasi data dan informasi agar dapat dimanfaatkan masyarakat serta mendukung indikator nilai Investasi. Adapun kegiatan Program ini Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota.

Pada tahun 2024, jumlah sampel pangan yang diperiksa sebanyak adalah 122 (seratus dua puluh dua) sampel terdiri dari 32 sampel sayur dan buah, dan 74 sampel pangan asal ikan serta sampel pangan peternakan sebanyak 21 sampel. Lokasi pengambilan sampel adalah di pedagang eceran Pasar Pelita, Pasar Ciwangi Sukabumi, KAC, Kelompok Wanita Tani dan beberapa Kelompok Tani. Dari 122 jenis sampel yang dianalisa tersebut, terdapat 9 sampel pangan yang terindikasi tidak aman yaitu 3



sampel pangan sayuran dan 1 sampel pangan asal ikan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh optimalnya penyelenggaraan pengawasan keamanan kepada masyarakat dalam mengedukasi mengenai keamanan pangan, memberikan penyuluhan, pelatihan dan lain-lai dalam rangka memberikan kesadaran kepada para produsen pangan baik pangan sayuran maupun pangan asal ikan dalam penggunaan bahan-bahan kimia baik dalam budidaya maupun pada proses olahannya sehingga penggunaan bahan-bahan kimia itu pada saat diuji laboratorium diketahui terdeteksi menggunakan bahan kimia melebihi ambang batas yang diijinkan.

Pemerintah daerah pada tahun 2024 telah secara konsisten melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan pada pasar tradisional dan pasar modern di Kota Sukabumi. Tidak kurang sebanyak 19 lokasi telah dilakukan pengawasan keamanan pangan secara terpadu bersama unsur kepolisian, unsur kodim, Diskumindag, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.



3.2.6.2 IKU 2 : Indeks Kota Kreatif

Berdasarkan *Logical Frame Work* pencapaian tujuan pertama yakni terciptanya ekonomi kota yang inklusif dengan sasaran berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, indeks kota kreatif ini didukung oleh 3 (Tiga) program yakni Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan program pemasaran pariwisata. Dari ketiga program yang ada, program pemasaran pariwisata dan program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata merupakan program yang berkontribusi paling besar melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pasanggiri Mojang Jajaka Tingkat Kota Sukabumi

Mojang dan Jajaka Kota Sukabumi adalah perwujudan dari generasi muda unggulan Kota Sukabumi yang dapat memerankan dirinya sebagai obor dalam gerakan Kebudayaan dan kepariwisataan di Kota Sukabumi khususnya, serta gerakan pembangunan seluruh aspek kehidupan pada umumnya. Mojang Jajaka Kota Sukabumi juga merupakan pencerminan 'sosok ideal' generasi muda Kota Sukabumi yang modern, populer namun mempertahankan jati diri sunda yang berciri “MASAGI” : Pengkuh Agamana, Luhung Elmuna, Jembar Budayana, Rancage Gawena, sebagai representasi citra positif Jawa Barat dari segala aspeknya.

Pasanggiri Mojang Jajaka Kota Sukabumi merupakan ajang pemilihan generasi muda unggulan yang dapat melahirkan generasi muda Kota Sukabumi masa kini dengan kualitas terbaik dan nantinya akan ikut berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita bangsa, melestarikan seni dan budaya daerah serta menjadi insan pariwisata yang unggul.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024



2. Sukabumi Suka Menari



Jumlah Sanggar atau Komunitas yang terlibat dalam pementasan HTD 2024 lalu di Sukabumi sebanyak 121 Sanggar atau Komunitas yang terdiri dari Sanggar, Extracuriculer Sekolah, UKM Kampus, Komunitas Seni dan Budaya, juga MGMP Seni Budaya. Para penampil yang terlibat terdiri dari 121 Sanggar atau Komunitas dan 589 Total jumlah penari terdiri dari berbagai asal daerah diantaranya, Kota dan

Kabupaten Sukabumi, Bogor, Cimahi, Cianjur, Depok, Bandung, Jakarta, Tangerang, Magelang dan Provinsi Jawa Barat, DKI, Banten, Jawa Timur. Dalam perhitungan sekitar 3000 Pentonton



hadir secara bergiliran dalam kurun waktu 14 jam pelaksanaan pagelaran dan perputaran uang mencapai 200jt dalam sektor kuliner, bazzar, oleholeh, hotel dan penginapan.

Pentas Akbar ini merupakan sebuah rangkaian ke giatan sebagai berikut : Pementasan pertunjukan tari tradisional, pementasan tari hiburan (tari kreasi anak & remaja, modern dance, KPop dan semua yang berhubungan dengan tari), seminar Pendidikan tentang seni tari, talk show interaktif tentang industry seni tari, pementasan eksperimental kontemporer, kegiatan menari Bersama.

3. Pameran Kembang Nusa



Pelaksanaan pameran Batik, Fashion, Craft dan Aksesoris Kemilau Batik Anggun Nusantara (Kembang Nusa) mulai selasa tanggal 03 September 2024 sampai dengan Minggu 08 September 2024 dengan mengikutsertakan beberapa produk dari pengrajin batik Kota

Sukabumi. Pada kesempatan ini Kota Sukabumi menghadirkan produk- produk yang terdiri dari fashion, kriya dan aksesoris batik hasil karya pengrajin2 batik kota sukabumi mitra diskumindag dan disporapar, dan pelayanan umum dari dpmptsp, dan disdukcapil.

Produk batik yang dipamerkan diantaranya dari : Batik Lokatmala, Batik Geulis, Batik Kakak dan beberapa produk dari galeri rumah Batik Fractal. Pameran tidak hanya diikuti oleh

dinas-dinas dari kota kabupaten di Jawa Barat tetapi juga pengrajin-pengrajin dari Provinsi lain di Indonesia. Kota Sukabumi meraih penghargaan Stand Terbaik I pada pameran Kemilau Batik Anggun Nusantara (Kembang Nusa) Batik, Fashion, Craft dan Aksesoris tahun 2024 ini.

3.2.6.3 IKU 3 : Indeks Pendidikan

Berdasarkan *Logical Frame Work* pencapaian tujuan kedua yakni terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif, terutama pada sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat ditunjang oleh indikator indeks pendidikan diampu oleh 2 (dua) program utama yakni pengelolaan pendidikan dengan indikator pencapaian SPM Pendidikan dan program pembinaan perpustakaan dengan indikator nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat. Untuk indeks pencapaian SPM pendidikan, dibangun berdasarkan pemenuhan indikator sarana & prasarana, tingkat partisipasi dan retata kemampuan numerasi serta literasi peserta didik. Berikut ini adalah capaian program SPM Bidang pendidikan tahun 2024 :

Capaian Tingkat Partisipasi anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Anak Usia Dini (APS) tahun 2024 sebesar 84,5 % Adapun program dan kegiatan yang menunjang capaian tersebut melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini yang dijabarkan didalam Program Pengelolaan Pendidikan dan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini yang meliputi :

- a. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD;
- b. Rehab Sedang/Berat Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD;
- c. Pengadaan Mebel PAUD;



- d. Sosialisasi Parenting, Program Stunting PAUD, Sosialisasi PAUD HI;
- e. Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan satuan PAUD;
- f. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Penyelenggaraan PAUD (BOSP);

Capaian Tingkat Partisipasi anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar (APS) tahun 2024 sebesar 99,94 % Adapun program dan kegiatan yang menunjang capaian tersebut melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Dasar yang dijabarkan didalam Program Pengelolaan Pendidikan dan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang meliputi :

- a. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- b. Pengadaan Mebel Sekolah
- c. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- d. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- e. Workshop Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan Sekolah Dasar
- f. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
- g. Pembangunan Ruang Kelas Baru
- h. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- i. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Capaian Tingkat Partisipasi anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (APS) tahun 2024 sebesar 96,93 % Adapun program dan kegiatan yang menunjang capaian tersebut melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah Pertama yang dijabarkan didalam Program Pengelolaan Pendidikan dan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang meliputi :

- a. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah



- b. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- c. Pengadaan Mebel Sekolah
- d. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
- e. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- f. Workshop pemutakhiran data pokok Pendidikan sekolah menengah pertama
- g. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik



Tingkat Capaian Rerata kemampuan literasi sekolah dasar bersarkan asesmen nasional berdasarkan Raport Pendidikan tahun 2024 mencapai 100% memenuhi target yang telah ditentukan sedangkan Tingkat capaian rerata numerasi sekolah dasar berdasarkan asesmen nasional mencapai 100%. Tingkat Capaian Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang

Mendapatkan Minimal Akreditasi B Mencapai 96,81%. Tingkat Capaian Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D IV mencapai 100% dan memenuhi target yang telah ditentukan.

Untuk Jenjang Satuan Pendidikan Sekolah dasar Tingkat Capaian Indeks Iklim Keamanan SD Tahun 2024 mencapai 96,81, Tingkat Capaian Indeks Iklim Inklusifitas SD Tahun 2024 Mencapai 91,84 dan Tingkat Capaian Indeks Iklim Kebinekaan SD Tahun

2024 mencapai 98,91. Sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Capaian Indeks Iklim Keamanan SMP Tahun 2024 mencapai 92,46, Tingkat Capaian Indeks Iklim Inklusifitas Tahun SMP Tahun 2024 Mencapai 93,11 dan Tingkat Capaian Indeks Iklim Kebinekaan SMP Tahun 2024 mencapai 99,17.



Indeks Kegemaran Membaca Masyarakat dengan nilai 78,54. Untuk indikator ini menggabungkan 2 hasil penilaian IPLM dengan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat yang telah diukur oleh Perpustakaan Nasional melalui kegiatan Kajian Perpustakaan yang dilaksanakan serentak untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia. Untuk Capaian Indikator Kinerja ini dihasilkan dari penyelenggaraan perpustakaan yang ada di Kota Sukabumi yang telah melaksanakan Akreditasi Perpustakaan dan sudah mendapatkan sertifikat dari Perpustakaan Provinsi Jawa Barat dengan target 33 tercapai 48 (**Capaian 145,45%**) atau meningkat sebesar 45,45%.

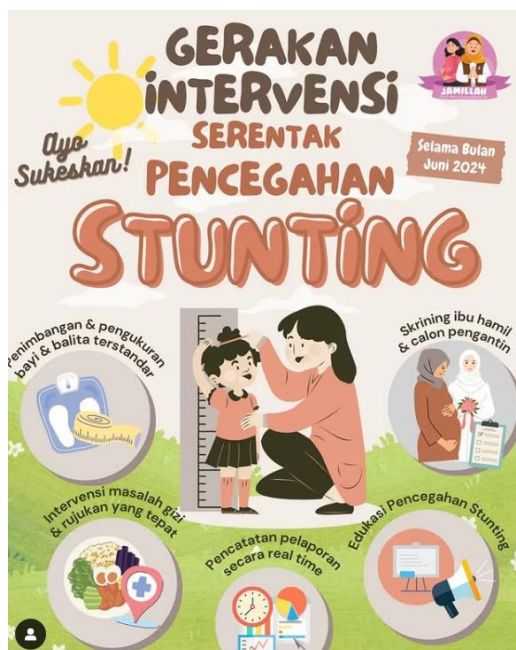
3.2.6.4 IKU 4 : Indeks Keluarga Sehat

Berdasarkan *Logical Frame Work* pencapaian tujuan kedua yakni terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif, terutama pada sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ditunjang oleh indikator indeks keluarga sehat diampu oleh 2 (Dua) program utama yakni Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dan program pembinaan keluarga berencana di Dinas DaldukKBP3A. Berikut ini adalah data dukung dari program



tersebut yang berkontribusi terhadap pencapaian IKU 4 indeks keluarga sehat tahun 2024 :

- ❖ Capaian indikator SPM Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024 dari 12 indikator, hanya 2 yang tidak mencapai target yakni Indikator pelayanan kesehatan pada usia produktif yakni **98,37%** (Naik dari tahun 2023 yakni 72,04%) dan indikator pelayanan ODGJ yakni **95,56%** (Naik dari tahun 2023 sebesar 91,49%).
- ❖ Angka *Stunting* di Kota Sukabumi Tahun 2024 berdasarkan perhitungan TB/U adalah **5,85%** atau 1.183 balita.
- ❖ Pada tahun 2024 Persentase ketersediaan obat esensial di Puskesmas yang ada di Kota Sukabumi adalah sebesar 100%. Ini berarti selama tahun 2024 dari 40 jenis obat esensial yang harus ada di Puskesmas telah terjamin ketersediaanya dan dapat dijangkau oleh masyarakat.



**“SUKABUMI Bebas STUNTING
2030”**

❖ Sampai dengan tahun 2024 telah terakreditasi sebanyak 22 Fasyankes terdiri dari : 6 Rumah Sakit, 15 Puskesmas, 1 Laboratorium Kesehatan Daerah.

❖ Kader Kesehatan remaja dan Dokter cilik merupakan actor promosi Kesehatan yang paling efektif dalam meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat pada anak sekolah, serta mampu meningkatkan perubahan perilaku positif anak-anak.

- ❖ Kota Sukabumi memiliki 461 posyandu dengan 100% Tingkat keaktifannya dan termasuk kategori posyandu Mandiri.



- ❖ Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Sukabumi telah mencapai **98,52%** atau 364.623 jiwa.

- ❖ Pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdapat Standar Nasional pada indikator Meningkatnya Cakupan Kesertaan Ber-KB, Usia Nikah Pertama, Meningkatnya Cakupan Peserta KB MKJP, dan Cakupan

PUS yg Belum Ber KB (*Unmetneed*) walaupun belum dapat memenuhi pencapaian target yang telah ditentukan nasional kecuali indikator Meningkatnya Cakupan Kesertaan Ber-KB yang dapat melampaui target nasional dengan capaian sebesar 100%.

- ❖ Keberhasilan mencapai Target Indikator Kinerja tersebut berkat kerjasama yang baik pada OPD Internal juga eksternal, yaitu dengan lini lapangan, UPTD PPA, maupun pihak eksternal yaitu *stakeholder* seperti Lembaga Masyarakat atau antar OPD.

3.2.6.5 IKU 5 : Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Berdasarkan *Logical Frame Work* pencapaian tujuan kedua yakni terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif, terutama pada sasaran meningkatnya produktivitas tenaga kerja ditunjang oleh indikator tingkat produktivitas tenaga kerja diampu oleh 2 (Dua) program utama yakni program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dan program penempatan tenaga kerjadi

Dinas Ketenagakerjaan Kota Sukabumi. Berikut ini adalah data dukung dari program tersebut yang berkontribusi terhadap pencapaian IKU 5 tahun 2024 :

- ❖ Pada tahun 2024, Dinas Ketenagakerjaan Kota Sukabumi telah melaksanakan beberapa pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pencari kerja diantaranya yakni pelatihan tata boga, pelatihan mencukur, pelatihan menjahit dan pelatihan barista untuk kalangan milenial. Total peserta pelatihan berjumlah 175 orang.
- ❖ Permintaan pelatihan tenaga kerja yang lebih dibutuhkan oleh para pencari kerja diantaranya adalah keterampilan yang sifatnya teknis modern seperti *design*, teknologi/komputerisasi dan *broadcasting* serta pembekalan kewirausahaan (terutama sektor perdagangan langsung).
- ❖ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Sukabumi pada tahun 2024 adalah sebesar 62,58 persen, yang artinya 62,58 persen dari penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) aktif secara ekonomi. Jumlah penduduk bekerja tahun 2024 tercatat sebanyak 159.828 jiwa, yang mana 47,10 persen diantaranya bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai.
- ❖ Produktivitas tenaga kerja menunjukkan hubungan antara output (hasil kerja) dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Oleh karena itu, dua factor determinan tersebut harus dipenuhi dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mengoptimalkan pemanfaatan waktu yang diberikan.
- ❖ Dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja juga, Kota Sukabumi telah melaksanakan *Job Fair* tahun 2024 dengan mengikutsertakan tidak kurang dari 112 perusahaan dan menampung 1.215 tenaga kerja.



- ❖ Pola kemitraan dengan perusahaan di dalam dan luar Kota Sukabumi menjadi faktor penentu lain yang patut menjadi perhatian.



3.2.6.6 IKU 6 : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Berdasarkan *Logical Frame Work* pencapaian tujuan ketiga yakni terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan, terutama pada sasaran terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas ditunjang oleh indikator tingkat produktivitas tenaga kerja diampu oleh 8 (delapan) program dan melibatkan 3 perangkat daerah yakni DPUTR, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup. Berikut ini adalah data dukung dari program tersebut yang berkontribusi terhadap pencapaian IKU 6 tahun 2024 :

- ❖ Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan oleh DPUTR berkontribusi 114,2% terhadap pencapain IKU 6 dan program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan indikator Persentase Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum Sesuai Standar realisasinya mencapai 52,95%.

- ❖ Persentase Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh memperoleh capaian sebesar 100,00%. Capaian ini adanya ketersediaan anggaran bankeu untuk pekerjaan Pelaksanaan Berdayakan Sungai Untuk Tuntaskan Kumuh (Bunga Untukmu) pada tahun 2024 sebesar 156,4854 m2 dengan keluaran (output) 156,4854 m2 dan Pelaksanaan Penataan Kawasan Kumuh Tematik (Tawa Kita) sebesar 535,5649 m2 dengan keluaran (output) 535,5649 m2.
- ❖ Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dengan indicator indeks kenyamanan menunjukkan capaian 100%.
- ❖ Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang dikerjakan oleh Dinas Perhubungan melalui indikator Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Aman dan Nyaman menunjukkan capaian 81,3%.
- ❖ Sementara infrastruktur yang berada di bawah skor IKLI Kota Sukabumi yaitu : jalan kota, jalan lingkungan, jembatan, perlengkapan jalan, sumber air bersih, layanan PDAM, tempat sampah, pengangkutan sampah dan *drainase* menjadi fokus perbaikan infrastruktur di tahun 2025.
- ❖ Infrastruktur yang sudah menunjukkan progres perbaikan seperti angkutan umum, ruang-ruang publik, fasilitas pendidikan-kesehatan dan olahraga serta pasar dan hotel tetap harus mendapatkan perhatian khusus untuk dijaga kenyamanan dan kualitasnya.
- ❖ Capaian indikator Persentase Jalan Kota dalam Kondisi Mantap tahun 2024 sebesar 104,40%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada sasaran ini sangat baik, ketersediaan program dan anggaran untuk penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur. Pencapaian pada tahun 2024 sebesar 104,357 Km dicapai melalui kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dengan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

keluaran (output) 117.796 Km tingkat kemantapan jalan di kota sukabumi 104,357 Km atau 88,59% pada tahun 2024.



3.2.6.7 IKU 7 : Indeks Rasa Aman

Berdasarkan *Logical Frame Work* pencapaian tujuan ketiga yakni terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan, terutama pada sasaran terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana ditunjang oleh indikator indeks rasa aman diampu oleh 8 (delapan) program dan melibatkan 5 (Lima) perangkat daerah yakni DPUTR, Kesbangpol, BPBD, Satpolpp Damkar dan Dinas Sosial. Berikut ini adalah data dukung dari program tersebut yang berkontribusi terhadap pencapaian IKU 7 tahun 2024 :

- ❖ Persentase Gangguan Kamtramtibmas yang dapat diselesaikan 100%. *Outcome* program ini adalah Persentase Gangguan Kamtramtibmas yang dapat diselesaikan, rumusan perhitungan yaitu jumlah pengaduan/Pelanggaran yang diselesaikan sebanyak 524 kasus serta Jumlah pengaduan/ pelanggaran yang masuk sebanyak 524 kasus maka capaian kinerjanya adalah 100%.





- ❖ Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan indikator persentase Unjuk Rasa yang disebabkan konflik antar dan inter umat beragama yang terfasilitasi 100%
- ❖ Pelaksanaan Koordinasi Forum Koordinasi Dan Komunikasi Intelijen Di Daerah (FKKID) secara umum mengacu pada Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/87-Kesbangpol/2019 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Dan Komunikasi Intelijen Di Daerah (FKKID) Kota Sukabumi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mempermudah pelaksanaan koordinasi, penghimpunan data, dan fakta yang terjadi di wilayah Kota Sukabumi yang berkaitan dengan isu-isu strategis menyangkut keamanan dan ketertiban. Kegiatan-



kegiatan FKKID sampai saat ini masih berkesinambungan dengan mengadakan rapat-rapat koordinasi dan mengantisipasi berbagai permasalahan yang dapat mengganggu kondusifitas Kota Sukabumi, sehingga pelaksanaan Siskamswakarsa di Kota Sukabumi lebih meningkat.

- ❖ Penanggulangan Bencana Prosentase Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana Bagi Daerah Rawan dan Korban Bencana. Sebaran kejadian berdasarkan Kalender Periode Bulan, terdapat lonjakan tinggi pada Bulan September (42 kali), Maret dan Oktober (28 kali), disusul November (21 kali), Februari (15 kali), Desember (11 kali), Mei (10 kali), April dan Juni (8 kali), Juli (3 kali), Agustus (2kali), dan kejadian terendah pada Bulan Januari (1 kali). Hal ini dapat dimengerti bahwa 3 Kecamatan yang mendominasi tersebut memiliki topografi dan bentangan alam yang rentan terhadap bencana dan secara demografi/penduduk berisiko tinggi karena merupakan kawasan padat penduduk dan padat perumahan serta permukiman yang hasil pantauan mayoritas warga terpapar tinggal di dataran yang rawan longsor seperti daerah tebing dan dekat bantaran aliran sungai serta kondisi kontur tanah yang labil (antropogenik) rawan bencana.
- ❖ Program Tagana masuk Sekolah yang berkolaborasi dengan BPBD ini pada tahun 2024 telah menghasilkan **10.963 peserta** didik yang mengikuti sosialisasi kebencanaan.





- ❖ Secara keprograman upaya-upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah :
1. Pembentukan Kelurahan Siaga Bencana di 33 kelurahan se-kota Sukabumi (100%).
 2. Sosialisasi dan pengenalan dini pencegahan dan penanggulangan bencana.
 3. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam;
 4. Pelatihan Simulasi Penanggulangan Bencana;
 5. Pemetaan Daerah Rawan Bencana dan Penetapan Lokasi Evakuasi Korban Bencana Alam;
 6. Pencegah adan pengurangan Risiko Bencana;
 7. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana;
 8. Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana;
 9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman /Korban Bencana Alam; Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara;

- ❖ Hal antisipatif lain yang harus mendapatkan perhatian adalah adanya kejadian bencana di luar wilayah Kota Sukabumi, yakni di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Karena secara wilayah kedua daerah tersebut berada di daerah rawan bencana dan tentu memerlukan kesiapsiagaan dari daerah terdekat sebelum tim dari Basarnas dan provinsi hadir. Oleh karena itu sinergi dengan keduanya sangat perlu dijalin.

3.2.6.8 IKU 8 : Indeks Inovasi Daerah

Berdasarkan *Logical Frame Work* pencapaian tujuan keempat yakni terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif, terutama pada sasaran meningkatnya inovasi daerah ditunjang oleh indikator indeks inovasi daerah diampu oleh 1 (Satu) program di Bappeda yakni program penelitian dan pengembangan daerah. Berikut ini adalah data dukung dari program tersebut yang berkontribusi terhadap pencapaian IKU 8 tahun 2024 :

- ❖ Kota Sukabumi dinobatkan sebagai Kota Sangat Inovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri, yang membuktikan komitmen Pemkot Sukabumi dalam menciptakan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
- ❖ Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah di Kota Sukabumi telah menunjukkan progress yang sangat baik, yakni :
 - Tahun 2021 : 99 Inovasi
 - Tahun 2022 : 158 Inovasi
 - Tahun 2023 : 258 Inovasi
 - Tahun 2024 : 305 Inovasi



- ❖ Kota Sukabumi telah mengeluarkan peraturan daerah tentang Inovasi yang menjadi rujukan pelaksanaan kegiatan inovasi daerah.

**LEMBARAN DAERAH
KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2021 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 19 MEI 2021

NOMOR : 3 TAHUN 2021

TENTANG : INOVASI DAERAH

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2021

- ❖ Dalam festival inovasi Tahun 2024 telah diperoleh pemenang-pemenang sebagai berikut : Puskesmas SUkakarya, Puskesmas Ciboureum, Puskesmas Lembursitu, kelurahan jayamekar dan RSUD Al-MULK.
- ❖ Inovasi KOPI ONLINE (Layanan Interaktif Konseling dan Pelayanan Informasi Obat Digital) menjadi inovasi unggulan kategori Inovasi Digital, inovasi tematik urusan Pelayanan Dasar (Kesehatan) pada IGA Tahun 2024,



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

- ❖ Inovasi SIBENTO MAMA (Modifikasi Bentuk Makanan Pokok Untuk Meningkatkan Asupan Makan Pada Anak Usia 1-6 Tahun) menjadi inovasi unggulan kategori Inovasi Non Digital, inovasi tematik urusan Pelayanan Dasar (Kesehatan) pada IGA Tahun 2024.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024**

Tabel 3.6
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian IKU 2024 (%)	Program/Kegiatan - Pengampu	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Menunjang/ Tidak
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
1.	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	104,50	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) – Diskumindag	Persentase usaha mikro yang naik kelas	0,01	Menunjang
				Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri – Diskumindag	Persentase promosi produk lokal yang dilaksanakan	100	Menunjang
				Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat – DKP3	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok	103,11	Menunjang
				Pelayanan Penanaman Modal - DPMPTSP	Nilai IKM	114,2	Menunjang
2.	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Indeks Kota Kreatif (IKK)	310,38	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual - Disporapar	Nilai tambah ekonomi kreatif	100	Menunjang



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Disporapar	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	100	Menunjang
				Pemasaran Pariwisata - Disporapar	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	75	Menunjang
3.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan (IP)	101,15	Pengelolaan Pendidikan - Disdik	Indeks Capain SPM Pendidikan	91,15	Menunjang
				Pembinaan Perpustakaan - Dispusipda	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	69,27	Menunjang
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	106,06	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat- Dinkes	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)	108,3	Menunjang
					Prevalensi Stunting Pada Balita	102,6	
					Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial	100	
					Persentase Fasilitas Pelayanan Terakreditasi Paripurna	100	
					Persentase Kepesertaan JKN	100,6	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

				Pembinaan Keluarga Berencana (KB) – DaldukKBP3A	Persentase keluarga yang mengikuti program KB	72,59	Menunjang
5.	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja – Disnaker	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	461.64	Menunjang
				Penempatan Tenaga Kerja - Disnaker	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	75.73	Menunjang
6.	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	93,29	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh - DPUTR	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	114,02	Menunjang
				Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - DLH	Indeks Kenyamanan	100	Menunjang
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah – DPUTR	Persentase Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum Sesuai Standar	52,95	Menunjang
				Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Dishub	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Aman dan Nyaman	81,3	Menunjang
7.	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Indeks Rasa Aman (IRA)	100,00	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum – SatpolPP & Damkar	Persentase Gangguan Kamtramtibmas yang dapat diselesaikan	100	Menunjang



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024**

				Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya - Bakesbangpol	Persentase Unjuk Rasa yang disebabkan konflik antar dan inter umat beragama yang terfasilitasi	100	Menunjang
				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) - DPUTR	Luasan Kawasan Permukiman Tanpa Banjir dan Longsor	100,03	Menunjang
				Penanggulangan Bencana - BPBD	Prosentase Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana Bagi Daerah Rawan dan Korban Bencana	0,60	Menunjang
8.	Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah (IDI)	100,00	Penelitian dan Pengembangan Daerah – Bappeda	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100	
				Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik - Kecamatan		100	Menunjang
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota – Setda & Semua PD	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100	Menunjang

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, 2024



3.2.7 Analisis Efektifitas dan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian IKU Wali Kota Sukabumi Tahun 2024

Analisis efektivitas dan efisiensi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Sukabumi Tahun 2024 dilakukan untuk melihat sejauh mana sumber daya yang digunakan cukup efisien untuk mencapai target kinerja sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Suatu kinerja dikatakan **efektif** apabila **target kinerjanya tercapai**, sedangkan sumber daya dikatakan **efisien** apabila masih terdapat **siswa anggaran yang tidak terserap dalam pencapaian kinerja yang efektif**.

Analisis efektivitas dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja Pj. Wali Kota Sukabumi Tahun 2024 :

- 1. Tujuan 1** : Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif, menunjukkan **kinerja efektif** dikarenakan kinerja kedua IKUnya telah mencapai target yang ditetapkan (104,50% dan 106,67%) dengan **efisiensi anggaran mencapai 2,47 Milyar**.
- 2. Tujuan 2** : Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif, menunjukkan **kinerja efektif** dikarenakan kinerja ketiga IKUnya telah mencapai target yang ditetapkan (101,19%, 106,06% dan 102,90%) dengan **efisiensi anggaran mencapai 2,98 Milyar**.
- 3. Tujuan 3** : Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan, menunjukkan **kinerja efektif** pada IKU 7 yakni indeks rasa aman dengan capaian 100% namun pada IKU 6 yakni indeks kepuasan layanan infrastruktur



tidak mencapai target dengan capaian 93,29%. Total efisiensi anggaran pada tujuan 3 adalah **efisiensi anggaran mencapai 1,22 Milyar.**

4. **Tujuan 4** : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif, menunjukkan **kinerja efektif** dengan capaian 100% dengan **efisiensi anggaran mencapai 2,86 Milyar.**
5. Secara keseluruhan Pemerintah Kota Sukabumi telah menunjukkan kinerja **Sangat Tinggi** (7 dari 8 IKU Sudah mencapai target) dengan total efisiensi anggaran mencapai **9,54 Milyar.**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024**

Tabel 3.7
Analisis Efektifitas dan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian IKU Wali Kota Sukabumi Tahun 2024

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN IKU (%)	EFEKTIF/ TIDAK EFEKTIF	Pagu Perubahan TA 2024	Realisasi Anggaran TA 2024	Persentase Capaian (%)	EFISIEN/ TIDAK EFISIEN	% Efisiensi	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
TUJUAN 1 : TERCIPTANYA EKONOMI KOTA SUKABUMI YANG INKLUSIF								
SASARAN 1 : Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa								
IKU 1 : Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	104,50	Efektif	4.831.098.050	4.757.002.326	98,47	Efisien	1,53	Diskumindag, DPMPTSP & DKP3
SASARAN 2: Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif								
IKU 2 : Indeks Kota Kreatif	106,67	Efektif	4.029.809.250	1.633.078.875	40,52	Efisien	59,48	Disporapar, Diskominfo & DPMPTSP
TUJUAN 2 : TERCIPTANYA KUALITAS SDM YANG BERKARAKTER DAN KOMPETITIF								
SASARAN 3 : Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat								
IKU 3 : Indeks Pendidikan	101,19	Efektif	91.558.127.553	90.359.926.798	98,69	Efisien	1,31	Disdik - Dispusipda
SASARAN 4 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat								
IKU 4 : Indeks Keluarga Sehat	106,06	Efektif	81.174.370.338	79.439.865.128	97.86	Efisien	2,14	Dinkes – Dinsos - Kesra – DaldukKBP3A
SASARAN 5 : Meningkatnya produktivitas tenaga kerja								



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

IKU 5 : Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	102,90	-	515.000.000	466.644.050	90.61	Efisien	9,39	Disnaker-DPMPTSP
TUJUAN 3 : TERWUJUDNYA RUANG KOTA YANG NYAMAN DAN BERKELANJUTAN								
SASARAN 6 : Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas								
IKU 6 : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	93,29	Tidak Efektif	43,815,231,768	42,859,969,347	97.82	Tidak Efisien	2,18	DPUTR, DLH & Dishub
SASARAN 7 : Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana								
IKU 7 : Indeks Rasa Aman	100	Efektif	13,086,573,698	12,816,981,997	97.94	Efisien	2,06	Satpolpp Damkar, Bakesbangpol, DPUTR & BPBD
TUJUAN 3 : TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN INOVATIF								
SASARAN 8 : Meningkatkan inovasi daerah								
IKU 8 : Indeks Inovasi Daerah	100	Efektif	103,702,293,329	100,832,751,016	97.23	Efisien	2,77	Semua PD – Bappeda <i>Leading Institution</i>

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, 2024



**3.3 REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KOTA
SUKABUMI TAHUN 2024**

Pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri dari pengelolaan pendapatan dan belanja daerah berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Berdasarkan capaian kinerja pendapatan Daerah Tahun 2024 menunjukkan tren yang terus meningkat. Berikut ini adalah rincian realisasi pendapatan dan belanja daerah Kota Sukabumi periode desember tahun anggaran 2024 (*unauditted*) :

- ❖ Jumlah pendapatan daerah sebesar **Rp. 1,331,427,011,097,-** dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Pendapatan asli daerah **Rp. 437.033.662,447,-**
 - ✓ Pendapatan transfer **Rp. 756.381.673.981,-**
 - ✓ Transfer Pemerintah Pusat **Rp. 20.857.154,-**
 - ✓ Pendapatan transfer antar daerah **Rp. 100.834.188.665**
 - ✓ Pendapatan lain-lain yang sah **Rp. 16.320.332.004,-**
- ❖ Jumlah belanja daerah sebesar **Rp. 1.330.938.750.204,-** dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Belanja Operasi **Rp. 1.245.687.121.044,-**
 - ✓ Belanja Modal **RP. 81.795.600.160,-**
 - ✓ Belanja Tak Terduga **RP. 3.456.029.000,-**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024**

Tabel 3.8
Analisis Realisasi Anggaran dalam Pencapaian IKU Wali Kota Sukabumi Tahun 2024

TUJUAN/SASARAN/ OUTCOME	PROGRAM PENGAMPU	ANGGARAN TAHUN 2024			
		MURNI	PERUBAHAN	REALISASI	%
a	b	c	d	e	f
Tujuan : Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif		11,176,067,950	8,860,907,300	6,390,081,201	72.12
Sasaran :		7,158,505,950	4,831,098,050	4,757,002,326	98.47
Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Pelayanan Penanaman Modal	463,488,150	820,704,150	803,205,150	97.87
	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	80,050,500	82,995,500	77,459,000	93.33
	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3,157,278,700	2,332,446,800	2,331,477,000	99.96
	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	2,066,717,450	1,149,217,450	1,108,726,223	96.48
	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1,315,501,150	370,264,150	365,994,953	98.85
	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	75,470,000	75,470,000	70,140,000	92.94
Sasaran :		4,017,562,000	4,029,809,250	1,633,078,875	40.52



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	66,947,500	44,197,500	44,197,500	100.00
	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3,788,779,000	3,818,776,250	1,422,045,875	37.24
	Pemasaran Pariwisata	161,835,500	166,835,500	166,835,500	100.00
Tujuan : Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif		162,943,710,009	173,247,497,891	170,266,435,976	98.28
Sasaran :		89,706,965,400	91,558,127,553	90,359,926,798	98.69
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Pengelolaan Pendidikan	84,898,252,700	86,722,214,853	85,584,151,259	98.69
	Pembinaan Perpustakaan	4,808,712,700	4,835,912,700	4,775,775,539	98.76
Sasaran :		72,766,744,609	81,174,370,338	79,439,865,128	97.86
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	69,721,229,996	78,128,855,725	76,423,552,538	97.82
	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3,045,514,613	3,045,514,613	3,016,312,590	99.04
Sasaran :		470,000,000	515,000,000	466,644,050	90.61
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	440,000,000	485,000,000	436,644,050	90.03
	Penempatan Tenaga Kerja	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00
Tujuan : Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan		51,428,053,778	56,901,805,466	55,676,951,344	97.85



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

Sasaran :		39,501,242,778	43,815,231,768	42,859,969,347	97.82
Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Penyelenggaraan Jalan	14,902,809,015	18,609,958,015	18,199,124,966	97.79
	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3,926,813,227	4,640,621,977	4,579,128,492	98.67
	Pengelolaan Persampahan	9,409,538,686	8,641,279,926	8,598,131,151	99.50
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4,028,889,000	4,706,389,000	4,608,850,728	97.93
	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1,050,000,000	733,790,000	731,575,300	99.70
	Kawasan Permukiman	4,308,000,000	4,608,000,000	4,324,804,011	93.85
	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,637,489,400	1,637,489,400	1,583,088,442	96.68
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	237,703,450	237,703,450	235,266,257	98.97
Sasaran :		11,926,811,000	13,086,573,698	12,816,981,997	97.94
Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3,087,424,500	3,009,761,750	2,891,754,868	96.08
	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	378,959,500	405,459,500	299,864,500	73.96
	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	8,460,427,000	8,967,101,748	8,941,225,029	99.71
	Penanggulangan Bencana	0	704,250,700	684,137,600	97.14



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif		100,012,320,978	103,702,293,329	100,832,751,016	97.23
Sasaran :	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2,276,582,850	2,504,643,850	2,475,122,485	98.82
Meningkatnya inovasi daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4,259,757,900	4,357,328,850	4,310,224,904	98.92
	Pengelolaan Keuangan Daerah	12,254,365,379	7,808,048,142	6,982,180,069	89.42
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,075,321,084	1,101,671,084	1,088,908,591	98.84
	Perekonomian dan Pembangunan	541,978,000	571,978,000	563,200,016	98.47
	Penyelenggaraan Pengawasan	648,320,000	532,320,000	512,867,025	96.35
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35,560,092,471	37,357,933,492	36,732,934,807	98.33
	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	12,764,343,219	16,558,919,136	15,419,468,316	93.12
	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	19,258,439,450	21,182,544,350	21,075,854,042	99.50
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	9,903,362,625	9,985,165,425	9,982,989,773	99.98
	Aplikasi Informatika	373,239,000	373,239,000	372,039,000	99.68
	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	126,722,000	136,705,000	135,641,330	99.22
	Penelitian dan Pengembangan Daerah	969,797,000	1,231,797,000	1,181,320,658	95.90
	JUMLAH	325,560,152,715	342,712,503,986	333,166,219,537	97.21

Sumber : BPKPD Kota Sukabumi, 2024





BAB IV

Penutup

KONTEN

4.1. KESIMPULAN	202
4.2. RENCANA TIDAK LANJUT	204

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Sukabumi Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pj. Wali Kota Sukabumi berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan ini menggambarkan hasil **evaluasi kinerja** dan analisis dengan fokus pada sasaran yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, yang berupa analisis dan pengukuran kinerja terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sasaran strategis dan capaian Misi RPD.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap capaian IKU Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024, diperoleh beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ❖ Pada Tahun 2024 dengan adanya RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, dimana terjadi perubahan tujuan, sasaran dan indikator sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Sukabumi maka terdapat perubahan **19 (sembilan belas) IKU** pada Tahun 2024 menjadi 8 IKU yang **menembak 4 (empat) Tujuan**;
- ❖ Secara keseluruhan, rata-rata kinerja pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah **101,83% (SANGAT BAIK)** dengan total efisiensi anggaran sebesar **Rp. 9.546.284.449,-**
- ❖ Untuk pencapaian IKU pada seluruh misi yang ada dalam RPD Tahun 2024, ditembak oleh 82 Program, 112 Kegiatan dan 284 Sub kegiatan.



Uraian diatas memperlihatkan bahwa perkembangan penyelenggaraan pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam pencapaian empat tujuan RPD menunjukkan tingkat ketercapaian kinerja dan efisiensi anggaran yang sangat baik. Hal ini memberikan optimisme pencapaian tujuan dan sasaran Kota Sukabumi yang menjadi pertanggungjawaban terhadap harapan dan kepercayaan masyarakat Kota Sukabumi. Dukungan komitmen yang tinggi, terbangunnya komunikasi efektif antar implementator, terdapatnya sistem teknologi informasi dalam memantau kinerja dan inovasi serta budaya organisasi yang berintegrasi menjadi faktor-faktor pendorong yang kuat dalam terwujudnya kondisi ini.

4.2. RENCANA TIDAK LANJUT

Meskipun hampir seluruh IKU memiliki tingkat capaian $\geq 91\%$ (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh satu persen) atau dengan kata lain memiliki kinerja **SANGAT BAIK**. Terdapat 1 (Satu) IKU yang belum mencapai target yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur. Sebagai tindak lanjut terhadap indikator yang belum mencapai target 100% (seratus persen) dan *maintainance* pencapaian IKU yang sudah mencapai target, maka dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Merujuk pada rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun 2024, sebagaimana yang sudah dilaporkan dalam Matriks Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2024 maka Pemerintah Kota Sukabumi akan mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja dengan melakukan upaya-upaya perbaikan sebagai berikut :



- a. Segera melengkapi dokumen PK Perangkat Daerah khususnya penjenjangan kinerja dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi untuk kemudian disampaikan melalui esr.menpan.go.id.
- b. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan terutama reviu indikator kinerja Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria SMART.
- c. Mereviu rencana aksi Perangkat Daerah sehingga selaras dengan yang telah ditetapkan dalam PK dan dapat terukur setiap triwulan.
- d. Mengoptimalkan pengukuran kinerja melalui Aplikasi SIPEKA sebagai bentuk monev kinerja berkala dan berjenjang.
- e. Mengintruksikan untuk penyusunan Renstra Periode 2025-2029, seluruh Perangkat Daerah diwajibkan untuk menambahkan Definisi Operasional dan Formulasi Penghitungan pada Tabel TC. 27.
- f. Melanjutkan pemberian **award** sebagai bentuk *Rewards & Punishment* kepada 3 Perangkat Daerah dengan Capaian Kinerja terbaik Tahun 2024 berupa Dana Stimulan. Begitupun 3 Perangkat Daerah terbawah dalam Capaian Kinerja, dipaparkan pada saat Evaluasi dengan Kepala Daerah.
- g. Telah mensosialisasikan kepada seluruh PD untuk menyampaikan LKIP PD melalui berbagai media dan website Kota Sukabumi -> Dikerjakan pada bulan Februari & Maret 2025.
- h. Telah melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan LKIP Perangkat Daerah & Memverifikasi Format & Mekanisme LKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 -> Dikerjakan pada bulan Februari & Maret 2025.



- i. Menyampaikan MTL LHE SAKIP 2024 sebagai dasar untuk menyusun RPJMD dan Renstra 2025-2030 kepada tim SAKIP Kota dan semua perangkat daerah.
 - j. Dari segi evaluasi, LHE AKIP akan diengkap dengan menyajikan temuan dan rekomendasi tentang kekurangan dan solusi untuk seluruh aspek
 - k. Melanjutkan jumlah evaluator yang dilatih tahun sebelumnya, maka akan dilakukan peningkatan kapasitas evaluator dengan mengikuti diklat evaluasi SAKIP.
2. Menjaga pencapaian target pada indikator-indikator yang telah melampaui target dengan terus melakukan koordinasi kolaborasi, pemantauan dan pengendalian secara terstruktur dimulai dari sistem perencanaan sampai dengan evaluasi kinerja agar tetap terpantau keberhasilannya.

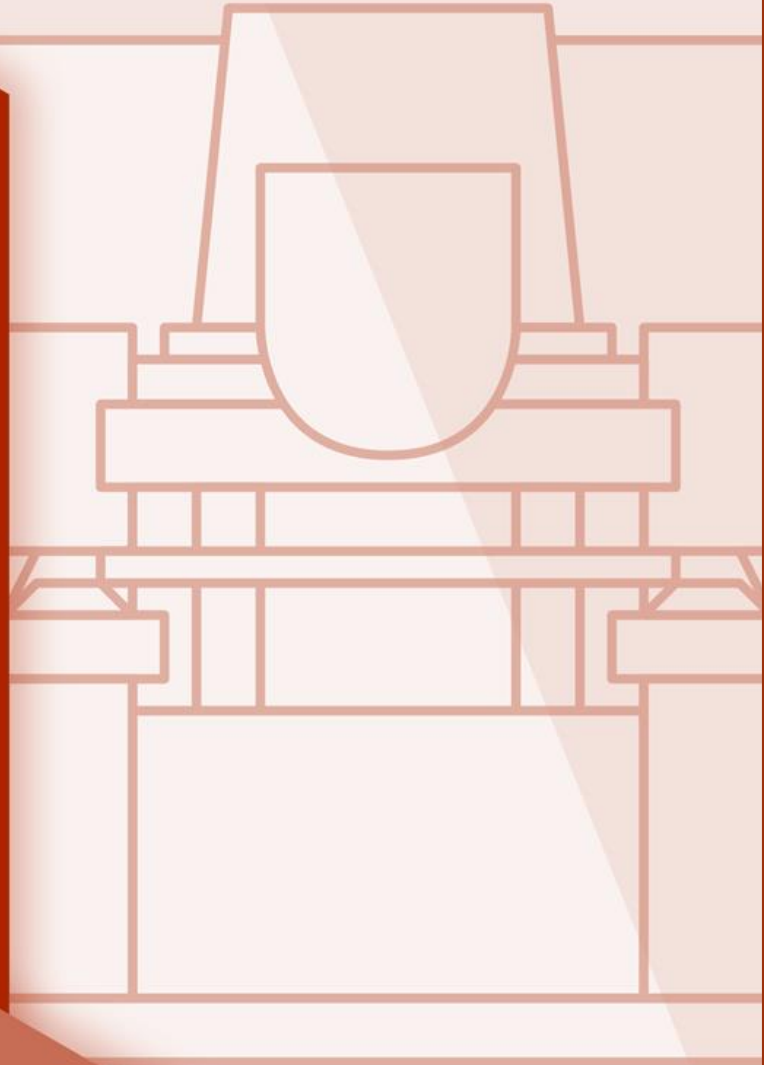
Pemerintah Daerah Kota Sukabumi akan terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui berbagai inisiatif strategis, langkah-langkah inovatif dan sinergis seluruh sektor melalui pendekatan *Whole of Government (WoG)* yang menitikberatkan pada peran serta aktif seluruh elemen pembangunan di Kota Sukabumi. Semoga akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi semakin meningkat sehingga bisa mencapai pemerintahan yang kapabel, bersih dan akuntabel yang mendorong peningkatan reformasi birokrasi yang mendukung terwujudnya *Good Governance* di Kota Sukabumi.

Sukabumi, 25 Maret 2024
WALIKOTA SUKABUMI,

H. AYEP ZAKI



DAFTAR PENGHARGAAAN Tahun 2024



PENGHARGAAN YANG DIRAIH KOTA SUKABUMI



Penghargaan Indeks Kota Toleran dari Setara Institute For Democracy and Peace
Selasa, (30/1/2024) Di Hotel Sahid, Jakarta.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024



Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Penyerahan **Penghargaan Indeks Kualitas Pengisian JPT**. di Aula Gedung Sate Pemprov Jabar. Jumat, 16/03/24



Penghargaan Di Ajang Baznas Awards 2024, Yaitu Kategori **Kepala Daerah Pendukung Zakat Terbaik** di Hotel Bidakara, Jakarta pada Kamis, 29 Februari 2024.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024



Dua Penghargaan Sebagai **“Kota Terbaik Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah & Kota Dengan Penerapan Inovasi Daerah Di Jawa Barat”** pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2024 kali ini diselenggarakan di Bandung, tepatnya di Hotel Luxury, pada Senin (22/4/2024)



Penghargaan Kota Dengan Kinerja Surveilans AFP Dan Discarded MR Terbaik Kedua Tingkat Nasional Dari Kementerian Kesehatan RI Pada Minggu, 19 Mei 2024 Di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 untuk Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bertempat di Aula lantai 1 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, pada hari Selasa, 21 Mei 2024



Penghargaan UHC (Universal Health Coverage) Awards 2024 yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan di Jakarta pada Kamis, 8 Agustus 2024.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024



Kota Sukabumi meraih Juara 3 pada Paritrana Award Kategori Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Penghargaan ini diberikan dalam sebuah acara penganugerahan yang berlangsung di Aula Gedung Sate, Bandung, pada Sabtu, 24 Agustus 2024



Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menerima penghargaan pada ajang Apresiasi Pemasaran Pariwisata Indonesia (APPI) 2024 yang digelar pada Senin, 9 September 2024, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024



Kota Sukabumi Raih Penghargaan
Green Leadership Nirwasita Tantra 2023

Pemerintah Kota Sukabumi bersama DPRD menerima penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (Kemen LHK). Pada Rabu (18/9/2024) di Auditorium Dr Ir Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Jakarta.



Pemkot Sukabumi Raih Penghargaan BPHTB PTSL,
dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Pemerintah Kota Sukabumi meraih penghargaan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atas Dukungan dalam pembebasan Bea perolehan hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Sukabumi. dalam momen Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tahun 2024, di Halaman Gedung Sate Bandung, Selasa (24/9/2024).



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024



Pemerintah Kota Sukabumi kembali menorehkan prestasi dalam bidang keterbukaan informasi. Pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2024 yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat di Gedung Merdeka Bandung, Kamis (14/11/2024),



Pemerintah Kota Sukabumi Menerima Anugerah Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia tingkat Provinsi Jawa Barat. Bertempat di Grand Sunshine Resort & Convention, Bandung, Rabu (4/12/2024),



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024



Kota Sukabumi dinobatkan sebagai Kota Sangat Inovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2024 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, pada Kamis (5/12/2024) di Hotel Mercure, Surabaya.



Kota Sukabumi meraih penghargaan APBD Award 2024 dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan ini diberikan atas capaian Kota Sukabumi dalam kategori Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tertinggi se-Indonesia. Acara penyerahan penghargaan berlangsung pada Rabu, 18 Desember 2024, di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024



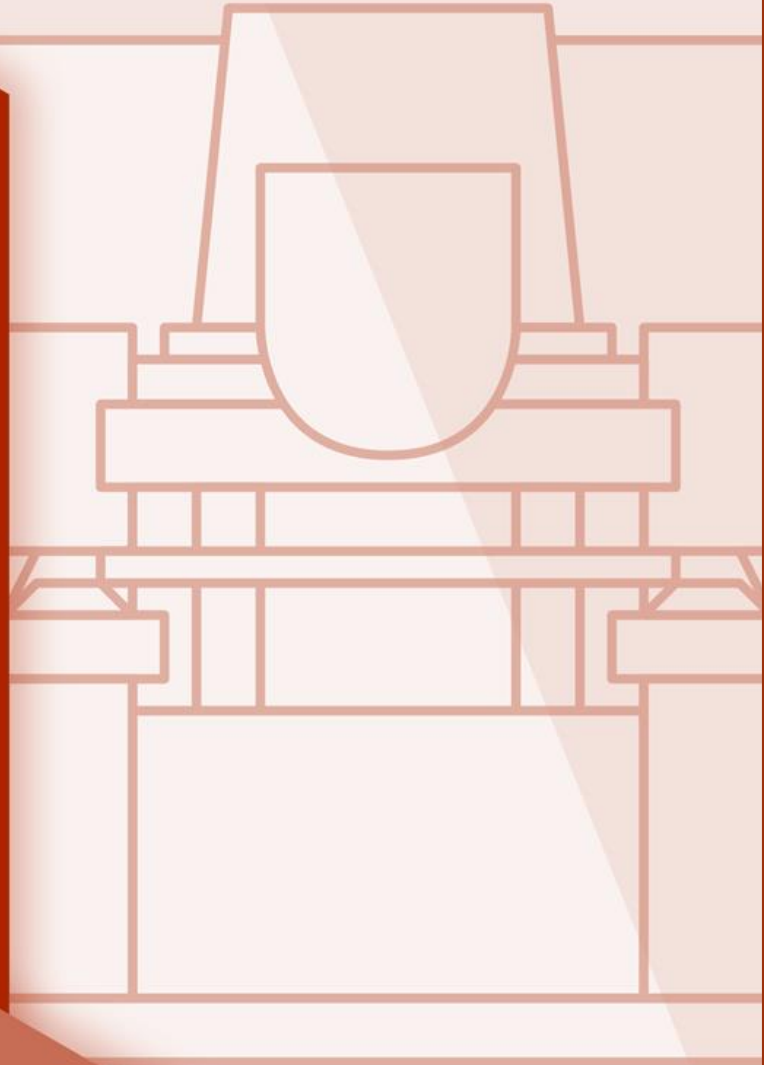
Penjabat Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji hadir di malam penganugerahan Sukabumi Award 2024 dalam rangka hari ulang tahun Radar Sukabumi ke-16 di Hotel Anugerah, pada Senin (30/12/2024).





LAMPIRAN LKIP

Tahun 2024



**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP
INTERNAL TERHADAP LKJIP PERANGKAT
DAERAH DI KOTA SUKABUMI TAHUN 2024**

Dapat diakses pada link google drive :

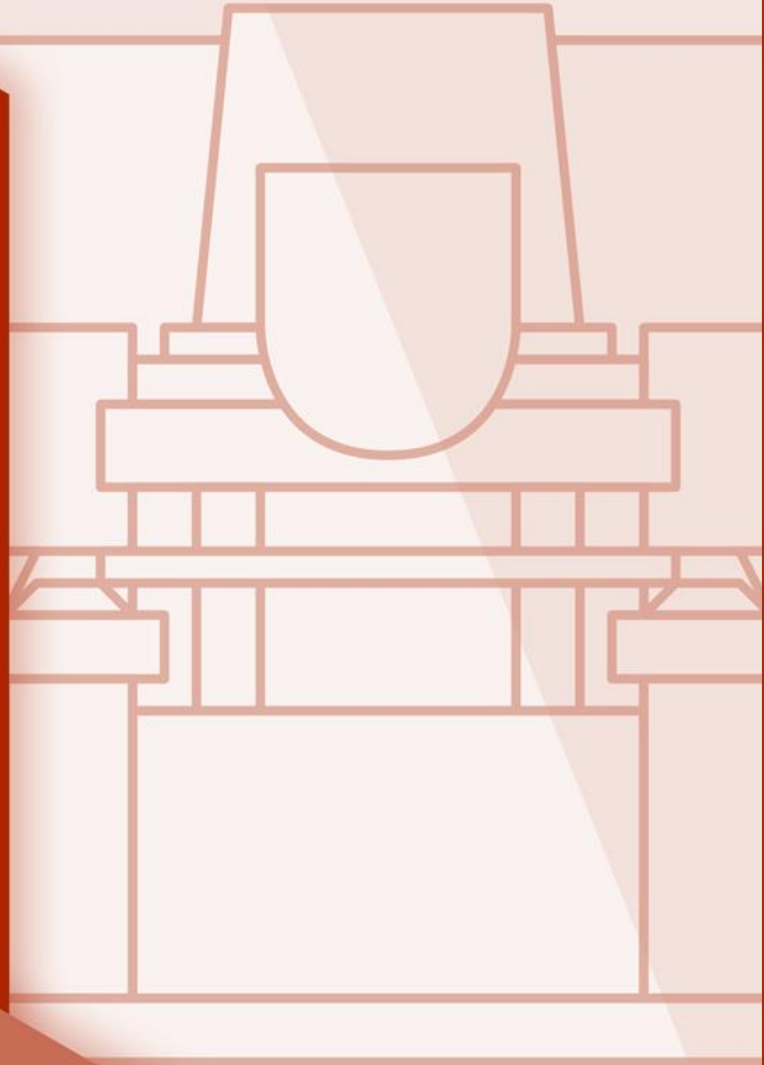
https://bit.ly/LHE_AKIP_24





LAMPIRAN LKIP

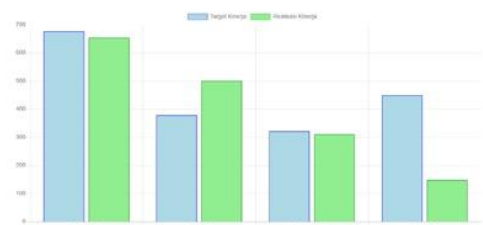
Tahun 2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

APLIKASI SIPEKA UNTUK PERENCANAAN & PENGUKURAN KINERJA DI KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

PEMANFAATAN MENU SIPEKA



No	Nama Struktural	Anggaran			Kinerja	Aktivitas	Jumlah %	Kriteria
		Pagu	Realisasi	%				
1.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Frendy Yuwono, S.T.	1.466.521.550	1.445.354.608	98,530000	99,99	92,765000	97	ST
2.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Nenden Eviyanti, S.H.	1.374.279.850	1.359.036.173	98,746667	100,01	100,116667	100	ST
3.	Bidang Penelitian dan Pengembangan Muhammad Ismail Aini, S.T., M.A.P.	1.231.797.000	1.181.320.658	96,430000	100,00	100,270000	99	ST
4.	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Erni Agus Riyani, S.Si., M.A.P.	1.516.527.450	1.505.834.123	99,085000	99,99	96,430000	99	ST
5.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Asep Supriadi, AMKG., SKM., M.Tr.A.P.	2.504.643.850	2.475.122.485	98,700000	80,00	97,333333	92	ST
6.	Sekretariat LUTPI ALIP, ST.M.A.P.	10.492.124.296	10.331.132.959	98,403333	78,57	68,906667	82	ST
Total / Rata2		18.585.893.996	18.297.801.006	98,45	108	85	97	ST



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

Browser: Chrome | URL: sipeka.sukabumikota.go.id/# | Theme-Logo: BAPPEDA KOTA SUKABUMI

Administrator

Search Friend

Dashboard

Pengaturan +

RPM +

Rencana Strategi +

Rencana Kerja +

RPBD +

Perjanjian Kinerja +

Pengendalian Perangko +

Realisasi Kinerja +

Evaluasi Kinerja -

Kinerja & Anggaran

Monitoring Perubahan Anggaran

Efektivitas & Efisiensi (Tahunan)

Warna Kinerja

Tools +

EVALUASI KINERJA & ANGGARAN

REKAP CAPAIAN ANGGARAN & KINERJA

(Ganda klik tabel untuk Realisasi Kinerja)

Detail

NO	PERANGKAT DAERAH	REALISASI KINERJA TAHUN 2024					DETAIL EVALUASI KINERJA	
		ANGGARAN (%)	IKU (%)	PROGRAM (%)	KEGIATAN (%)	SUB KEGIATAN (%)	JUMLAH RATA-RATA (%)	
1.	SATUAN POLIS PAMONG PRAGA DAN PEMADAM KEBAKARAN	98.38	100	100	100	100	99.94	View
2.	DINAS KESEHATAN	97.82	99.50	100	99.84	99.82	99.60	View
3.	KECAMATAN WARUJOONG	99.01	98.29	100	99.46	99.46	99.24	View
4.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	98.37	97.88	100	99.77	99.74	99.15	View
5.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	99.03	100	99.82	97.28	97.45	98.72	View
6.	KECAMATAN GUNUNG PUKUH	99.61	100	100	100	99.78	99.98	View
7.	DINAS PERSEKUTUAN UMUM DAN TATA RUANG	97.74	99.42	99.98	97.74	97.95	98.57	View
8.	KECAMATAN BAROS	99.07	100	100	96.67	96.67	98.48	View

Browser: Chrome | URL: sipeka.mitrarifida.com/# | Theme-Logo: DINAS KESEHATAN

Search Friend

Dashboard

Pengaturan +

Rencana Strategi +

Rencana Kerja +

RPBD +

Perjanjian Kinerja +

Pengendalian Perangko +

Realisasi Kinerja +

Evaluasi Kinerja -

Kinerja & Anggaran

Monitoring Perubahan Anggaran

Efektivitas & Efisiensi (Tahunan)

Warna Kinerja

Tools +

REKAP KEGIATAN LIST KEGIATAN

Subbag. Perencanaan dan Pelaporan

No	Kegiatan	Kode	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Rencana Anggaran	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0001	Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.000.000	21.000.000	View
2		1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.000.000		View
3		1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.750.000	3.750.000	View
4		1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	9.525.000	9.525.000	View
5		1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	153.750.000	3.750.000	View



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

SIPEKA
Sistem Informasi Pengelolaan dan Evaluasi Kinerja

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA MATRIKS RENJA

2024

Show 10 entries

				Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
3	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai standar Persentase pencapaian IKU		0			
4			Persentase Dokumen Perencanaan yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA (%)		100 %			
5			Persentase pencapaian IKU (%)		100 %			
6	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kota Sukabumi (Dokumen)		33 Dokumen	121.786.400		
7	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPMD/RKP (Sesuai Kebutuhan jika RPMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)		3 Dokumen	0		

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

SIPEKA
Sistem Informasi Pengelolaan dan Evaluasi Kinerja

DINAS KESEHATAN

1.02.01 PROGRAM PENANGKAP URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

No.	Nama Aktivitas	Target	Satuan	Rencana Pelaksanaan	Ruang	Sumber Dana	Koordinator	Pelaksana	Tagging
1	Rancangan Awal Renja (Buku)	1	Buku		5.000.000	Berkas/ Proposal	11.Indra Permana SKM		
2	Berita Daerah (Buku)	1	Buku		3.000.000	APBD/YSO	11.Indra Permana SKM		
3	Rancangan Akhir Renja (Buku)	1	Buku		3.000.000	APBD/YSO	11.Indra Permana SKM		
4	RPO Dinas Kesehatan Kota Sukabumi (Konsultasi)	1	Kegiatan		10.000.000	DWK,Non Fiskal	11.Indra Permana SKM		





Bagian
Organisasi

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif